



ST 2023
SENSUS PERTANIAN



2022

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PUSAT STATISTIK
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
(AUDITED)

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Di samping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 9 Mei 2023

Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Indeks Tabel	viii
Indeks Grafik	xiii
Indeks Singkatan	xiv
Indeks CaLK LRA	xv
Indeks CaLK Neraca	xvi
Indeks CaLK LO	xvii
Indeks CaLK LPE	xviii
Indeks CaLK Pengungkapan Penting Lainnya	xix
Pernyataan Tanggung Jawab	xx
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3 Basis Akuntansi	14
A.4 Dasar Pengukuran	14
A.5 Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	23
B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	26
B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27
B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	29
B.1.4 Pendapatan Denda	29
B.1.5 Pendapatan Lain-lain	30
B.2 Belanja	33
B.2.1 Belanja Pegawai	39
B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	40
B.2.1.2 Belanja Uang Lembur	42
B.2.1.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	43
B.2.2 Belanja Barang	44
B.2.2.1 Belanja Barang Operasional	45
B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional	48
B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan	51
B.2.2.4 Belanja Jasa	52
B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan	55

	B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	58
	B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri	63
B.2.3	Belanja Modal	64
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah	65
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67
	B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya	68
	B.2.3.5 Belanja Dalam Rangka COVID-19	68
C.	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	70
C.1	Aset	70
C.1.1	Aset Lancar	70
	C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	70
	C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	71
	C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	73
	C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	75
	C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak	76
	C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	78
	C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	79
	C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	80
	C.1.1.9 Persediaan	81
C.1.2	Aset Tetap	83
	C.1.2.1 Tanah	84
	C.1.2.2 Peralatan dan Mesin	88
	C.1.2.3 Gedung dan Bangunan	90
	C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya	94
	C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	96
	C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan	96
C.1.3	Piutang Jangka Panjang	98
	C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	98
	C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	99
C.1.4	Aset Lainnya	100
	C.1.4.1 Aset Tak Berwujud	100
	C.1.4.2 Aset Lain-lain	101
	C.1.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	102
C.2	Kewajiban	104
C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	104
	C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	104
	C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	106
	C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka	106

	C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	108
	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	108
C.3		Ekuitas	109
	C.3.1	Ekuitas	109
D.		Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	110
	D.1	Pendapatan Operasional	110
	D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	110
	D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	110
	D.2	Beban Operasional	111
	D.2.1	Beban Pegawai	112
	D.2.2	Beban Persediaan	113
	D.2.3	Beban Barang dan Jasa	113
	D.2.4	Beban Pemeliharaan	114
	D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	115
	D.2.6	Beban Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	115
	D.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115
	D.2.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	116
	D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	116
	D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	116
	D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	117
	D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	117
	D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117
	D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	118
E.		Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	119
	E.1	Ekuitas Awal	119
	E.2	Surplus (Defisit) LO	119
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	119
	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	119
	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	120
	E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122
	E.3.4	Koreksi Lain-Lain	125
	E.4	Transaksi Antar Entitas	126
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	126
	E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	127
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	128
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	128
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	129
	E.5	Ekuitas Akhir	129
F.		Pengungkapan Penting Lainnya	130
	F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	130
	F.2	Revisi DIPA	130
	F.3	Rekening BPS	137
	F.4	Kerja Sama Swakelola Tipe I	137
	F.5	Kerja Sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNBPN	138
	F.6	Kerja Sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	140



F.7	Hibah Langsung Luar Negeri	141
F.8	Hibah Langsung Dalam Negeri	145
F.9	Pengungkapan Lain-Lain	147



INDEKS TABEL

	Halaman
1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Ringkasan Neraca	2
3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	12
4. Rincian Jumlah Satker UAKPA	12
5. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB	14
6. Penggolongan Kualitas Piutang	16
7. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
8. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud	18
9. Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja	20
10. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	21
11. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana	22
12. Rincian Pagu Belanja Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	22
13. Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan PNBPN	23
14. Perbandingan Realisasi Penerimaan TA 2022 dan 2021	25
15. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program	33
16. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	34
17. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Periode TA 2022 dan 2021	37
18. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	37
19. Perbandingan Realisasi Belanja Periode TA 2022 dan 2021	38
20. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji Dan Tunjangan PNS	40
21. Realisasi Belanja Gaji Dan Tunjangan PNS TA 2022 dan 2021	41
22. Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur	42
23. Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2022 dan 2021	43
24. Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	43
25. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito TA 2022 dan 2021	44
26. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional	46
27. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2022 dan 2021	47
28. Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Sumber Dana	47
29. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	48
30. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2022 dan 2021	50
31. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana	50
32. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan	51
33. Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2022 dan 2021	52



34.	Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana	52
35.	Pagu dan Realisasi Belanja Jasa	53
36.	Realisasi Belanja Barang Jasa TA 2022 dan 2021	54
37.	Realisasi Belanja Barang Jasa Berdasarkan Sumber Dana	54
38.	Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan	55
39.	Estimasi Klaim Kerugian Asuransi BMN TA 2023	56
40.	Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 dan 2021	57
41.	Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Sumber Dana	57
42.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	58
43.	Pengembalian Realisasi Belanja Paket <i>Meeting</i> Petugas yang Tidak Melaksanakan Pencacahan	59
44.	Realisasi Belanja Barang Perjalanan Dalam Negeri TA 2022 dan 2021	62
45.	Realisasi Belanja Barang Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana	63
46.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	63
47.	Realisasi Belanja Barang Perjalanan Luar Negeri TA 2022 dan 2021	64
48.	Realisasi Belanja Barang Perjalanan Luar Negeri Berdasarkan Sumber Dana	64
49.	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal	65
50.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021	65
51.	Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan Lokasi dan Peruntukannya	65
52.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021	66
53.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dan 2021	67
54.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2022 dan 2021	67
55.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2022 dan 2021	68
56.	Pagu dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Covid-19	68
57.	Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi Covid-19	69
58.	Rincian Aset Lancar	70
59.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah/Satker	71
60.	Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran	71
61.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker	72
62.	Rincian Mutasi Transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas	72
63.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>) per Wilayah/Satker	74
64.	Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	75
65.	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Wilayah/Satker	75
66.	Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker	77
67.	Mutasi Piutang Bukan Pajak	77
68.	Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	78



69.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker	79
70.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	80
71.	Rincian Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	80
72.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	81
73.	Rincian Persediaan	81
74.	Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker	82
75.	Rincian Aset Tetap	83
76.	Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2022	83
77.	Perubahan Saldo Tanah Tahun 2022 dan 2021	84
78.	Rincian Pembelian Tanah per Wilayah	86
79.	Rincian Hibah Masuk Tanah per Wilayah	86
80.	Rincian Hibah Keluar Tanah per Wilayah	86
81.	Rincian Transfer Tanah	87
82.	Rincian Penambahan Tanah melalui KDP	87
83.	Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021	88
84.	Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021	90
85.	Rincian Pembelian Gedung dan Bangunan per Wilayah	91
86.	Rincian Hibah Masuk Gedung dan Bangunan per Wilayah	92
87.	Rincian Hibah Keluar Gedung dan Bangunan per Wilayah	92
88.	Rincian Transfer Gedung dan Bangunan	93
89.	Rincian Aset Tetap Lainnya	94
90.	Rincian KDP Per Wilayah/Satker	96
91.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021	97
92.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap	97
93.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2022	98
94.	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	99
95.	Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR	99
96.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	100
97.	Rincian Aset Lainnya	100
98.	Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021	100
99.	Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021	101
100.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021	102
101.	Rincian Nilai Buku Aset Lainnya	103



102.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	104
103.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	104
104.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker	105
105.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker	106
106.	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker	108
107.	Rincian PNBPN Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	110
108.	Perbandingan PNBPN Lainnya LO dan LRA per 31 Desember 2022	110
109.	Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2022 dan 2021	112
110.	Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA per 31 Desember 2022	112
111.	Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	113
112.	Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2022 dan 2021	113
113.	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2022 dan 2021	114
114.	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2022 dan 2021	115
115.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 2021	116
116.	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021	116
117.	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021	117
118.	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021	117
119.	Rincian Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	117
120.	Rincian Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021	118
121.	Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	119
122.	Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan	120
123.	Rincian Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi	120
124.	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas	126
125.	Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain	126
126.	Rincian Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar	127
127.	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung	128
128.	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	129
129.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe I	138
130.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Pagu Nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS)	138
131.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Anggaran dan Realisasi	138
132.	Rekapitulasi Kerja Sama PNBPN-Non APBN BPS	139
133.	Rekapitulasi Kerja Sama PNBPN- APBN BPS	140



134.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Nilai PKS	140
135.	Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Anggaran dan Realisasi	140
136.	Rekapitulasi Kerja Sama RPL- APBN BPS	141
137.	Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (Bentuk Uang) Tahun Anggaran 2022	142
138.	Rincian SPHL/SP3HL/MPHLBJIS Berdasarkan Nomor Dokumen Tahun Anggaran 2022	142
139.	Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS	146
140.	Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah	146



INDEKS GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021	24
2 Perbandingan Realisasi PNBPN Tahun Anggaran 2022 dan 2021	25
3 Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Periode Tahun Anggaran 2022	38



INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BMN	:	Barang Milik Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
MONSAKTI	:	<i>Monitoring</i> SAKTI
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAKTI	:	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP/TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

INDEKS CaLK LRA

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN		Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah		
	B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	23
Catatan	B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	26
Catatan	B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27
Catatan	B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	29
Catatan	B.1.4 Pendapatan Denda	29
Catatan	B.1.5 Pendapatan Lain-lain	30
Belanja		
	B.2 Belanja	33
Catatan	B.2.1 Belanja Pegawai	39
	B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	40
	B.2.1.2 Belanja Uang Lembur	42
	B.2.1.3 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	43
Catatan	B.2.2 Belanja Barang	44
	B.2.2.1 Belanja Barang Operasional	45
	B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional	48
	B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan	51
	B.2.2.4 Belanja Jasa	52
	B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan	55
	B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	58
	B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri	63
Catatan	B.2.3 Belanja Modal	64
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah	65
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67
	B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya	68
	B.2.3.5 Belanja Dalam Rangka COVID-19	68

INDEKS CaLK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA			Halaman
	C.1	ASET	70
	C.1.1	Aset Lancar	70
Catatan	C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	70
Catatan	C.1.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	71
Catatan	C.1.1.3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	73
Catatan	C.1.1.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	75
Catatan	C.1.1.5	Piutang Bukan Pajak	76
Catatan	C.1.1.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	78
Catatan	C.1.1.7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	79
Catatan	C.1.1.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	80
Catatan	C.1.1.9	Persediaan	81
	C.1.2	Aset Tetap	83
Catatan	C.1.2.1	Tanah	84
Catatan	C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	88
Catatan	C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	90
Catatan	C.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	94
Catatan	C.1.2.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	96
Catatan	C.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	96
	C.1.3	Piutang Jangka Panjang	98
Catatan	C.1.3.1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	98
Catatan	C.1.3.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	99
	C.1.4	Aset Lainnya	100
Catatan	C.1.4.1	Aset Tak Berwujud	100
Catatan	C.1.4.2	Aset Lain-lain	101
Catatan	C.1.4.3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	102
	C.2	Kewajiban	104
	C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	104
Catatan	C.2.1.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	104
Catatan	C.2.1.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	106
Catatan	C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	106
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	108
Catatan	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	108
	C.3	Ekuitas	109
Catatan	C.3.1	Ekuitas	109

INDEKS CaLK LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL		Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah		
D.1	Pendapatan Operasional	110
D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	110
Catatan D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	110
D.2	Beban Operasional	111
Catatan D.2.1	Beban Pegawai	112
Catatan D.2.2	Beban Persediaan	113
Catatan D.2.3	Beban Barang dan Jasa	113
Catatan D.2.4	Beban Pemeliharaan	114
Catatan D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	115
Catatan D.2.6	Beban Barang Diserahkan Kepada Masyarakat	115
Catatan D.2.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115
Catatan D.2.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	116
D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	116
Catatan D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	116
Catatan D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	117
D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	117
Catatan D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117
Catatan D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	118



INDEKS CaLK LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			Halaman
Catatan	E.1	Ekuitas Awal	119
Catatan	E.2	Surplus (Defisit) LO	119
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	119
Catatan	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	119
Catatan	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	120
Catatan	E.3.3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	122
Catatan	E.3.4	Koreksi Lain-Lain	125
Catatan	E.4	Transaksi Antar Entitas	126
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	126
	E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	127
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	128
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	128
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	129
Catatan	E.5	Ekuitas Akhir	129



INDEKS CaLK PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA		Halaman
F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	130
F.2	Revisi DIPA	130
F.3	Rekening BPS	137
F.4	Kerja Sama Swakelola Tipe I	137
F.5	Kerja Sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNBPN	138
F.6	Kerja Sama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	140
F.7	Hibah Langsung Luar Negeri	141
F.8	Hibah Langsung Dalam Negeri	145
F.9	Pengungkapan Lain-Lain	147



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 9 Mei 2023

Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

Margo Yuwono

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp51.171.714.629,00 atau mencapai 132,66 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp38.574.858.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.311.231.645.255,00 atau mencapai 97,08 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.560.888.091.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	TA 2022			TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara	38.574.858.000	51.171.714.629	132,66	58.276.873.675
Belanja Negara	8.560.888.091.000	8.311.231.645.255	97,08	3.729.754.031.373

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2022 dan 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.422.698.715.205,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp171.876.193.389,00, Aset Tetap (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp5.182.226.391.992,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp171.040.919,00, dan Aset Lainnya (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp68.425.088.905,00.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp91.537.986.794,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar Rp5.331.160.728.411,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset				
Aset Lancar	171.876.193.389	101.289.651.655	70.586.541.734	69,99
Aset Tetap	5.182.226.391.992	5.215.196.751.679	(32.970.359.687)	(0,63)
Piutang Jangka Panjang	171.040.919	46.009.595	125.031.324	271,75
Aset Lainnya	68.425.088.905	116.997.593.682	(48.572.504.777)	(41,52)
Jumlah Aset	5.422.698.715.205	5.433.530.006.611	(10.831.291.406)	(0,20)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	91.537.986.794	85.271.874.817	6.266.111.977	7,35
Jumlah Kewajiban	91.537.986.794	85.271.874.817	6.266.111.977	7,35
Ekuitas				
Ekuitas	5.331.160.728.411	5.348.258.131.794	(17.097.403.383)	(0,32)
Jumlah Ekuitas	5.331.160.728.411	5.348.258.131.794	(17.097.403.383)	(0,32)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	5.422.698.715.205	5.433.530.006.611	(10.831.291.406)	(0,20)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.366.306.307,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp8.377.393.519.450,00, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp8.356.027.213.143,00. Kegiatan Non Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami surplus sebesar Rp11.172.991.770,00. Defisit dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional menyebabkan BPS mengalami Defisit-LO sebesar Rp8.344.854.221.373,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp5.348.258.131.794,00 dikurang dengan Defisit-LO sebesar Rp8.344.854.221.373,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp55.026.417.799,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp8.272.730.400.191,00

sehingga menghasilkan Ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.331.160.728.411,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2022 didasarkan pada basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara.

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono
Margo Yuwono

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2022			TA 2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
A.I Pendapatan Negara					
A.I.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.I.1.a Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	B.1.1	5.146.295.000	7.748.341.184	150,56	6.568.494.459
A.I.1.b Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	B.1.2	31.368.939.000	16.451.800.916	52,45	31.468.625.998
A.I.1.c Pendapatan Jasa Lainnya	B.1.3	0	0	0,00	73.640.000
A.I.1.d Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	B.1.4	4.310.000	5.521.292.054	128.104,22	1.007.389.815
A.I.1.e Pendapatan Denda	B.1.5	283.038.000	1.313.032.692	463,91	789.068.935
A.I.1. f Pendapatan Lain - Lain	B.1.6	1.772.276.000	20.137.247.783	1.136,24	18.369.654.468
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak		38.574.858.000	51.171.714.629	132,66	58.276.873.675
Jumlah Pendapatan Negara		38.574.858.000	51.171.714.629	132,66	58.276.873.675
A.II Hibah		0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		38.574.858.000	51.171.714.629	132,66	58.276.873.675
B. Belanja Negara					
B.1 Belanja Pegawai	B.2.1	2.329.604.586.000	2.282.380.174.486	97,97	2.082.334.903.082
B.2 Belanja Barang	B.2.2	6.058.443.749.000	5.860.512.565.577	96,73	1.419.190.329.975
B.3. Belanja Modal	B.2.3	172.839.756.000	168.338.905.192	97,40	228.228.798.316
Jumlah Belanja Negara		8.560.888.091.000	8.311.231.645.255	97,08	3.729.754.031.373

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

III. NERACA

**BADAN PUSAT STATISTIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Des-22	31-Des-21
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	89.371.020	210.032.717
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.2	57.062.405	13.468.139
Jumlah Kas dan Bank		146.433.425	223.500.856
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.1.3	58.277.265.214	29.156.790.398
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.1.4	682.163.135	0
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.5	1.632.771.160	1.966.650.019
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.6	(8.163.699)	(54.254.687)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		1.624.607.461	1.912.395.332
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.1.1.7	19.199.873.303	25.091.395.301
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.8	(17.578.304.708)	(20.256.262.658)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR (<i>Netto</i>)		1.621.568.595	4.835.132.643
Jumlah Piutang (Bersih)		3.246.176.056	6.747.527.975
Persediaan	C.1.1.9	109.524.155.559	65.161.832.426
Jumlah Aset Lancar		171.876.193.389	101.289.651.655
Aset Tetap			
Tanah	C.1.2.1	3.157.600.032.227	3.073.624.926.935
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	2.150.345.084.810	2.213.461.424.348
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	1.977.048.451.023	1.965.638.353.882
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.4	42.782.106.086	51.799.058.979
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.5	28.019.577.278	1.201.034.560
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.6	(2.173.568.859.432)	(2.090.528.047.025)
Jumlah Aset Tetap		5.182.226.391.992	5.215.196.751.679
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.1.3.1	189.728.799	46.240.799
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.1.3.2	(18.687.880)	(231.204)
Tagihan Tuntutan TP/TGR (<i>Netto</i>)		171.040.919	46.009.595
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		171.040.919	46.009.595
Aset Lainnya			
Aset tak Berwujud	C.1.4.1	390.531.435.503	393.320.447.281
Aset Lain-lain	C.1.4.2	286.977.715.708	180.442.628.983
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.3	(609.084.062.306)	(456.765.482.582)
Jumlah Aset Lainnya		68.425.088.905	116.997.593.682
JUMLAH ASET		5.422.698.715.205	5.433.530.006.611
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Pada Pihak Ketiga	C.2.1.1	90.985.070.100	84.632.175.591
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.1.2	573.343	5.679.586
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	447.546.691	412.777.434
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.4	89.371.020	210.032.717
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	15.425.640	11.209.489
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		91.537.986.794	85.271.874.817
JUMLAH KEWAJIBAN		91.537.986.794	85.271.874.817
EKUITAS			
Ekuitas	C.3.1	5.331.160.728.411	5.348.258.131.794
JUMLAH EKUITAS		5.331.160.728.411	5.348.258.131.794
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.422.698.715.205	5.433.530.006.611

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,

Margo Yuwono

IV. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PUSAT STATISTIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	21.366.306.307	34.789.890.921
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		21.366.306.307	34.789.890.921
Jumlah Pendapatan Operasional		21.366.306.307	34.789.890.921
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.1	2.287.085.450.501	2.083.556.785.665
Beban Persediaan	D.2.2	115.075.308.785	66.017.573.201
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	3.823.244.186.829	910.652.974.186
Beban Pemeliharaan	D.2.4	145.085.049.642	114.222.518.463
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.722.961.732.017	309.139.592.919
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.2.6	0	8.956.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.7	290.672.529.437	310.496.689.612
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.8	(6.730.737.761)	2.155.421.056
Jumlah Beban Operasional		8.377.393.519.450	3.796.250.511.102
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(8.356.027.213.143)	(3.761.460.620.181)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	5.281.817.748	4.082.532.774
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	15.147.990.559	72.745.003.235
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(9.866.172.811)	(68.662.470.461)
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	100.705.233.635	9.564.208.696
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	79.666.069.054	183.651.725
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		21.039.164.581	9.380.556.971
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		11.172.991.770	(59.281.913.490)
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(8.344.854.221.373)	(3.820.742.533.671)



Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,

Margo Yuwono
Margo Yuwono

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PUSAT STATISTIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2022	2021
EKUITAS AWAL	E.1	5.348.258.131.794	5.474.527.712.606
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.2	(8.344.854.221.373)	(3.820.742.533.671)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	782.455.926	16.871.700
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	643.917.275	1.046.479.864
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	60.168.227.681	10.612.699.511
Lain - Lain	E.3.4	(6.568.183.083)	5.234.194.490
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		55.026.417.799	16.910.245.565
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	8.272.730.400.191	3.677.562.707.294
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(17.097.403.383)	(126.269.580.812)
EKUITAS AKHIR	E.5	5.331.160.728.411	5.348.258.131.794

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono
Margo Yuwono

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

Entitas dan
Rencana Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, berupaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif, dan membangun dan menyiapkan SDM yang berkualitas unggul dan adaptif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2020-2024 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”**,

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan; (b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan; (c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta (d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun daerah.

*Struktur
Organisasi*

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Susunan organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik terdiri dari:

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

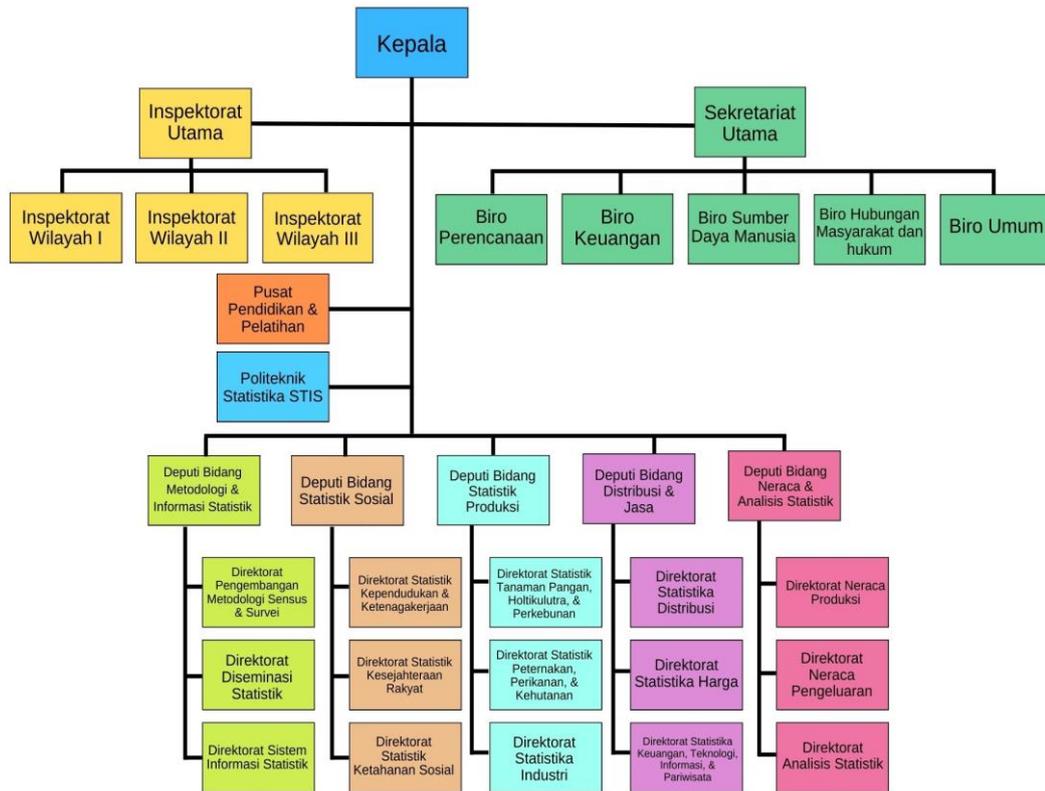
2. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

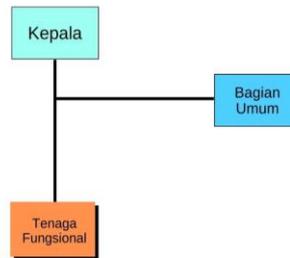
3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

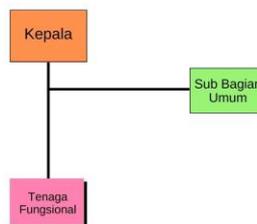
4. **Deputi Bidang Statistik Sosial**
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.
5. **Deputi Bidang Statistik Produksi**
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.
6. **Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa**
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.
7. **Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik**
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.
8. **Inspektorat Utama**
Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.
9. **Pusat Pendidikan dan Pelatihan**
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
10. **Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik**
Mempunyai tugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.
11. **Instansi Vertikal**
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Pusat



Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Provinsi



Gambar 3. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BPS yaitu wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 517 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 517 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker	
			KP		KD		DK		TP			
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	514	-	-	-	-	-	-	517
Jumlah			3	-	514	-	-	-	-	-	-	517

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Keuangan

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini, satuan kerja yang dicakup dalam laporan keuangan BPS meliputi 517 satuan kerja yang berada dalam satu eselon I yang terdiri dari 3 satker pusat, 34 satker provinsi, dan 480 satker kabupaten/kota dengan rincian yang tersebut dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Rincian Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Sekretariat Utama BPS	1
2	0199	Pusdiklat BPS	1
3	0199	Politeknik Statistika STIS	1
4	0100	DKI Jakarta	7
5	0200	Jawa Barat	27
6	0300	Jawa Tengah	36
7	0400	DI Yogyakarta	6
8	0500	Jawa Timur	39
9	0600	Aceh	24
10	0700	Sumatera Utara	32
11	0800	Sumatera Barat	20

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
12	0900	Riau	13
13	1000	Jambi	12
14	1100	Sumatera Selatan	16
15	1200	Lampung	15
16	1300	Kalimantan Barat	15
17	1400	Kalimantan Tengah	15
18	1500	Kalimantan Selatan	14
19	1600	Kalimantan Timur	10
20	1700	Sulawesi Utara	13
21	1800	Sulawesi Tengah	12
22	1900	Sulawesi Selatan	25
23	2000	Sulawesi Tenggara	14
24	2100	Maluku	11
25	2200	Bali	10
26	2300	Nusa Tenggara Barat	11
27	2400	Nusa Tenggara Timur	20
28	2500	Papua	22
29	2600	Bengkulu	11
30	2800	Maluku Utara	10
31	2900	Banten	9
32	3000	Bangka Belitung	8
33	3100	Gorontalo	7
34	3200	Kepulauan Riau	8
35	3300	Papua Barat	10
36	3400	Sulawesi Barat	6
37	3500	Kalimantan Utara	6
Total Satuan Kerja			517

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2022 disusun melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan untuk berbagai jenjang pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan dihasilkan oleh modul-modul yang terdapat pada SAKTI. Laporan keuangan yang menginformasikan tentang pengelolaan keuangan dihasilkan oleh modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, piutang, dan pelaporan (GLP). Laporan keuangan yang menginformasikan pengelolaan Barang Milik Negara dihasilkan oleh modul persediaan dan aset tetap.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 517 satker yang menyampaikan Laporan Barang Milik Negara tingkat satker dan dikonsolidasikan menjadi

Laporan Barang Milik Negara tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	514	-	-	-	-	-	517
Jumlah			3	-	514	-	-	-	-	-	517

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Barang

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Badan Pusat Statistik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari penjualan publikasi BPS diakui setelah munculnya permintaan data publikasi dari *customer*.
 - b. Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan penjualan aset.
 - d. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - e. Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan, dan akhir pendidikan.
 - f. Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas Piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*first in first out*) yang mulai diimplementasikan pada tahun 2021.

- Nilai Persediaan disajikan di Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal Neraca dikalikan dengan:
 - biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4

Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,

Margo Yuwono

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Estimasi pendapatan Badan Pusat Tahun Anggaran 2022 semula adalah Rp36.610.052.000,00 menjadi Rp38.574.858.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.964.806.000,00.

Pagu belanja Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 semula Rp5.691.816.660.000,00 menjadi Rp8.560.888.091.000,00, terdapat kenaikan sebesar Rp2.869.071.431.000,00. Kenaikan pagu belanja terjadi pada kelompok belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Pagu kelompok belanja pegawai terdapat kenaikan sebesar Rp23.160.608.000,00. Kenaikan ini diperoleh dari pagu semula yang sebesar Rp2.306.443.978.000,00 berubah menjadi Rp2.329.604.586.000,00. Sedangkan pagu kelompok belanja barang naik sebesar Rp2.820.192.073.000,00 dari pagu semula sebesar Rp3.238.251.676.000,00 menjadi Rp6.058.443.749.000,00. Kelompok pagu belanja modal selama Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp25.718.750.000,00. Kenaikan ini diperoleh dari nilai pagu semula yang sebesar Rp147.121.006.000,00 berubah menjadi Rp172.839.756.000,00. Kenaikan pagu belanja secara ringkas disajikan dalam tabel 9. Kenaikan pagu belanja disebabkan oleh adanya Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penambahan pagu PNBPN atas kontrak kerjasama/nota kesepahaman Satker BPS Kabupaten Jembrana, BPS Kabupaten Badung, Politeknik Statistika (Polstat) STIS, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS, serta Hibah Langsung Luar Negeri yang berasal dari UNFPA dan UNICEF.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 9
Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja

Uraian	Estimasi dan Pagu (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.139.990.000	5.146.295.000	(6.305.000)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	29.407.374.000	31.368.939.000	(1.961.565.000)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	4.310.000	4.310.000	0
Pendapatan Denda	283.038.000	283.038.000	0
Pendapatan Lain-lain	1.775.340.000	1.772.276.000	3.064.000
Jumlah Pendapatan	36.610.052.000	38.574.858.000	(1.964.806.000)
Belanja			
Belanja Pegawai	2.306.443.978.000	2.329.604.586.000	(23.160.608.000)
Belanja Barang	3.238.251.676.000	6.058.443.749.000	(2.820.192.073.000)
Belanja Modal	147.121.006.000	172.839.756.000	(25.718.750.000)
Jumlah Belanja	5.691.816.660.000	8.560.888.091.000	(2.869.071.431.000)

Estimasi penerimaan pendapatan pada Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan sebesar Rp38.574.858.000,00. Nilai estimasi penerimaan pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan

nilai estimasi sebesar Rp5.146.295.000,00 atau 13,34 persen dari total keseluruhan nilai estimasi pendapatan, kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dengan nilai estimasi sebesar Rp31.368.939.000,00 atau 81,32 persen dari total keseluruhan nilai estimasi pendapatan, kelompok akun Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan dengan nilai estimasi sebesar Rp4.310.000,00 atau 0,01 persen dari total keseluruhan nilai estimasi pendapatan, kelompok akun Pendapatan Denda dengan nilai estimasi sebesar Rp283.038.000,00 atau 0,73 persen dari total keseluruhan nilai estimasi pendapatan, dan kelompok akun Pendapatan Lain-lain dengan nilai estimasi sebesar Rp1.772.276.000,00 atau 4,60 persen dari total keseluruhan nilai estimasi pendapatan. Estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mendapatkan persentase estimasi penerimaan pendapatan yang lebih besar. Hal ini menggambarkan kelompok akun pendapatan ini terdapat potensi penerimaan pendapatan yang besar dikarenakan memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang menyediakan layanan data statistik.

Pagu belanja selama Tahun Anggaran 2022 dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Pagu belanja menurut kelompok program mengalami perubahan selama Tahun Anggaran 2022. Perubahan ini terdapat pada pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Uraian Program	Pagu (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2.631.934.730.000	5.511.316.719.000	(2.879.381.989.000)
Program Dukungan Manajemen	3.059.881.930.000	3.049.571.372.000	10.310.558.000
Jumlah	5.691.816.660.000	8.560.888.091.000	(2.869.071.431.000)

Pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.879.381.989.000,00 dari pagu semula sebesar Rp2.631.934.730.000,00 menjadi sebesar Rp5.511.316.719.000,00. Sedangkan pagu belanja kelompok program Dukungan Manajemen mengalami penurunan sebesar Rp10.310.558.000,00 dari pagu semula sebesar Rp3.059.881.930.000,00 menjadi sebesar Rp3.049.571.372.000,00. Atas perubahan pagu belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen, secara keseluruhan selama Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.869.071.431.000,00.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, pagu belanja selama Tahun Anggaran 2022 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana yang diterima terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), PNPB, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Perubahan pagu belanja berdasarkan kelompok sumber dana selama Tahun Anggaran 2022 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 11
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni	5.665.607.945.000	8.530.022.898.000	(2.864.414.953.000)
PNBP	26.208.715.000	27.976.706.000	(1.767.991.000)
Hibah Langsung Luar Negeri	0	2.888.487.000	(2.888.487.000)
Jumlah	5.691.816.660.000	8.560.888.091.000	(2.869.071.431.000)

Pagu belanja kelompok sumber dana selama Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan sebesar Rp2.869.071.431.000,00 dari pagu semula sebesar Rp5.691.816.660.000,00 menjadi sebesar Rp8.560.888.091.000,00. Perubahan pagu belanja terdapat pada kelompok sumber dana Rupiah Murni, PNBP, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Perubahan pada pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni yaitu berupa kenaikan nilai pagu dari pagu semula Rp5.665.607.945.000,00 menjadi sebesar Rp8.530.022.898.000,00 atau naik sebesar Rp2.864.414.953.000,00. Pagu belanja kelompok sumber dana PNBP mengalami perubahan, yaitu berupa kenaikan nilai pagu dari pagu semula sebesar Rp26.208.715.000,00 menjadi sebesar Rp27.976.706.000,00 atau naik sebesar Rp1.767.991.000,00. Sedangkan pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri mengalami perubahan, yaitu berupa kenaikan nilai pagu dari pagu semula sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.888.487.000,00

Pagu belanja kelompok sumber dana PNBP selama Tahun Anggaran 2022 terdapat pada satker Sekretariat Utama (Settama) BPS, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS, Politeknik Statistika (Polstat) STIS, BPS Kabupaten Jembrana, dan BPS Kabupaten Badung. Perubahan pagu belanja pada kelompok sumber dana PNBP salah satunya berkaitan dengan diadakannya kerja sama PNBP antara BPS dengan Pemerintah Daerah.

Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri selama Tahun Anggaran 2022 terdapat pada satker Sekretariat Utama (Settama) BPS yang berasal dari UNFPA sebesar Rp1.099.743.000,00 dan UNICEF sebesar Rp1.788.744.000,00.

Berkenaan dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, selama Tahun Anggaran 2022, BPS mengalokasikan pagu belanja yang dikhususkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp45.511.553.000,00. Rincian pagu semula dan revisi terkait alokasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 selama Tahun Anggaran 2022 dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Rincian Pagu Belanja Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	
		Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	9.242.668.000	3.712.726.000
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	20.619.230.000	34.781.304.000
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	2.000.000.000	964.684.000
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	10.047.495.000	6.041.889.000
524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	18.000.000	10.950.000
	Jumlah	41.927.393.000	45.511.553.000

Realisasi
Pendapatan
Rp51.171.714.629,00

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi penerimaan pendapatan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp51.171.714.629,00 atau mencapai 132,66 persen dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp38.574.858.000,00. Realisasi penerimaan pendapatan selama Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi penerimaan pendapatan selama Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Penerimaan PNBP

Uraian	TA 2022		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	5.146.295.000	7.748.341.184	150,56
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	31.368.939.000	16.451.800.916	52,45
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	4.310.000	5.521.292.054	128.104,22
Pendapatan Denda	283.038.000	1.313.032.692	463,91
Pendapatan Lain-Lain	1.772.276.000	20.137.247.783	1.136,24
Jumlah	38.574.858.000	51.171.714.629	132,66

Realisasi penerimaan pendapatan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp51.171.714.629,00 yang tersaji dalam tabel 13 merupakan nilai bersih penerimaan yang diperoleh dari realisasi penerimaan bruto sebesar Rp51.180.778.195,00 dikurangi dengan penerimaan pengembalian pendapatan sebesar Rp9.063.566,00.

Penjelasan realisasi penerimaan PNBP secara rinci sebagai berikut:

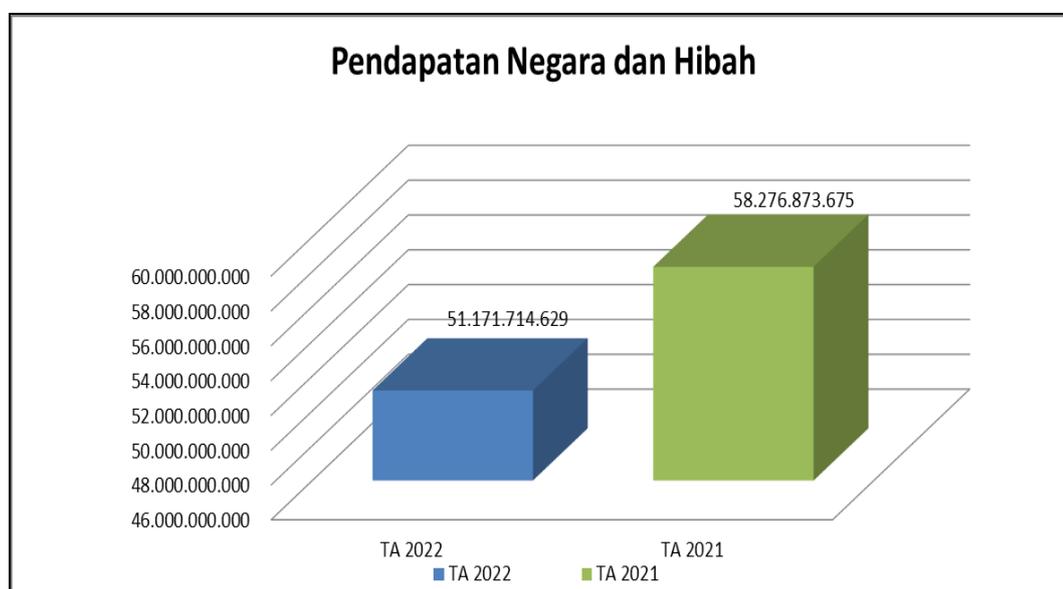
1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, serta pendapatan sewa atas tanah, gedung, dan bangunan.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan penerimaan pendapatan yang perolehannya berasal dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, pendapatan dari layanan survey dan pemetaan, serta pendapatan hasil survey dan pemetaan.
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan rekening perbankan dan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pendapatan Bunga,

Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) dan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

4. Pendapatan Denda merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan denda lainnya. Pendapatan Denda yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini terdiri dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.
5. Pendapatan Lain-lain adalah penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi BPS. Pendapatan Lain-lain yang tercatat pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, dan pendapatan anggaran lain-lain.

Realisasi penerimaan pendapatan yang tidak terestimasi atau tidak diperkirakan diterima dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 adalah penerimaan pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan, pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, dan pendapatan denda lainnya.

Perbandingan realisasi penerimaan Pendapatan Negara dan Hibah selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 seperti dilihat pada grafik 1.



Grafik 1: Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Realisasi penerimaan pendapatan selama Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.105.159.046,00 atau sebesar 12,19 persen dibandingkan realisasi penerimaan pendapatan pada periode yang sama tahun 2021. Perbandingan realisasi

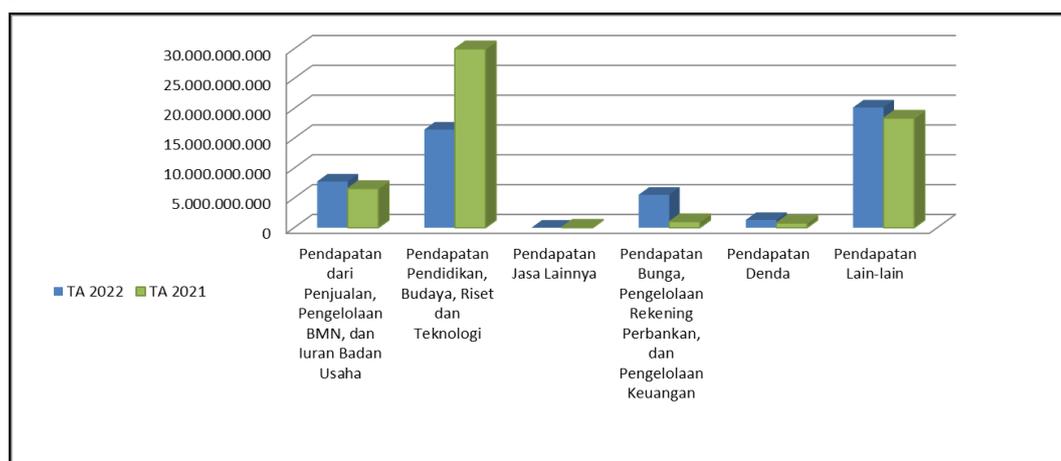
penerimaan pendapatan berupa PNBP Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Penerimaan TA 2022 dan 2021

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	7.748.341.184	6.568.494.459	1.179.846.725	17,96
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	16.451.800.916	31.468.625.998	(15.016.825.082)	(47,72)
Pendapatan Jasa Lainnya	0	73.640.000	(73.640.000)	(100,00)
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	5.521.292.054	1.007.389.815	4.513.902.239	448,08
Pendapatan Denda	1.313.032.692	789.068.935	523.963.757	66,40
Pendapatan Lain-lain	20.137.247.783	18.369.654.468	1.767.593.315	9,62
Jumlah	51.171.714.629	58.276.873.675	(7.105.159.046)	(12,19)

Penurunan realisasi penerimaan pendapatan terdapat pada pendapatan jasa lainnya sebesar 100,00 persen dan pendapatan pendidikan, budaya, riset dan teknologi sebesar 47,72 persen.

Selain penurunan realisasi, terdapat penerimaan negara bukan pajak yang mengalami kenaikan selama Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021 yaitu pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan sebesar 448,08 persen, pendapatan denda sebesar 66,40 persen, pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar 17,96 persen, dan pendapatan lain-lain sebesar 9,62 persen.



Grafik 2: Perbandingan Realisasi PNBP
Tahun Anggaran 2022 dan 2021

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN
Rp7.748.341.184,00

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2022, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBP yang akan diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp5.146.295.000,00. Realisasi penerimaan PNBP dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN selama Tahun Anggaran 2022 tercatat sebesar Rp7.748.341.184,00 atau 150,56 persen.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan ini terinci diperoleh dari transaksi penjualan tanah, gedung dan bangunan berupa penjualan pembongkaran hasil renovasi gedung kantor, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan berupa penjualan kendaraan bermotor dan benda inventaris kantor, pendapatan sewa berupa sewa rumah dinas, dan sewa gedung dan bangunan (sewa kantin).

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	100.000	0	0,00
425121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	7.600.029	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	2.618.633.000	452.612.400	17,28
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	117.832.000	4.821.605.319	4.091,93
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.409.730.000	2.466.523.436	102,36
Jumlah		5.146.295.000	7.748.341.184	150,56

Realisasi penerimaan pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp)	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Rp)	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)
1	Settama	0	0	783.430.000	166.398.615
2	Pusdiklat	0	0	0	8.635.817
3	Polstat STIS	0	0	456.389.387	97.316.389
4	DKI Jakarta	0	0	299.869.206	12.685.097
5	Jawa Barat	0	0	645.760.646	67.341.093
6	Jawa Tengah	0	0	541.653.101	51.801.131
7	DI Yogyakarta	0	0	26.579.999	17.035.000
8	Jawa Timur	0	0	327.671.720	98.796.847
9	Aceh	0	0	70.110.668	53.009.760
10	Sumatera Utara	0	91.014.875	156.783.006	60.055.574
11	Sumatera Barat	0	20.035.500	23.303.453	51.518.564
12	Riau	0	28.992.600	22.828.777	35.635.648

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp)	Pendapatan dari Pemindahan BMN Lainnya (Rp)	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)
13	Jambi	0	0	53.933.652	47.892.348
14	Sumatera Selatan	0	0	49.843.332	42.082.304
15	Lampung	0	0	229.092.419	450.544.923
16	Kalimantan Barat	0	0	22.044.329	50.413.190
17	Kalimantan Tengah	0	0	17.387.899	50.774.690
18	Kalimantan Selatan	0	13.500.000	0	34.916.200
19	Kalimantan Timur	0	0	58.419.444	36.142.466
20	Sulawesi Utara	0	51.250.000	155.397.408	17.855.757
21	Sulawesi Tengah	0	10.254.000	19.081.000	50.782.530
22	Sulawesi Selatan	7.600.029	0	13.849.888	75.271.635
23	Sulawesi Tenggara	0	0	124.562.321	38.721.738
24	Maluku	0	0	88.600.000	74.047.008
25	Bali	0	0	117.835.162	41.458.217
26	Nusa Tenggara Barat	0	88.413.885	43.724.677	31.609.124
27	Nusa Tenggara Timur	0	0	225.588.053	49.120.794
28	Papua	0	72.627.000	34.250.720	198.492.708
29	Bengkulu	0	58.055.540	0	46.693.562
30	Maluku Utara	0	10.525.000	4.513.895	96.004.814
31	Banten	0	0	94.317.170	34.026.593
32	Kep. Bangka Belitung	0	0	25.236.399	28.756.798
33	Gorontalo	0	7.944.000	0	9.157.600
34	Kepulauan Riau	0	0	0	51.925.205
35	Papua Barat	0	0	59.637.999	135.098.692
36	Sulawesi Barat	0	0	29.909.589	25.919.865
37	Kalimantan Utara	0	0	0	28.585.140
	Jumlah	7.600.029	452.612.400	4.821.605.319	2.466.523.436

Pendapatan
Pendidikan, Budaya,
Riset, dan Teknologi
Rp16.451.800.916,00

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2022, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBP yang akan diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi sebesar Rp31.368.939.000,00. Realisasi penerimaan PNBP tersebut selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.451.800.916,00 atau 52,45 persen.

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ujian/seleksi masuk pendidikan yaitu biaya pendaftaran ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS, layanan pendidikan dan/atau pelatihan pada satker Pusdiklat BPS, layanan survei dan pemetaan yaitu kerja sama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dan Kabupaten Jembrana, serta kegiatan hasil survei dan pemetaan berupa penjualan buku-buku publikasi baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, penjualan data mikro (dalam bentuk *Dbase file*), tabulasi (data mikro dengan proses), penjualan publikasi elektronik/*softcopy* (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk pdf), dan penjualan peta digital wilayah (dalam bentuk *softfile*).

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.478.300.000	5.481.000.000	100,05
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.577.560.000	1.577.560.000	100,00
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	16.263.059.000	2.724.476.151	16,75
425435	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	8.050.020.000	6.668.764.765	82,84
Jumlah		31.368.939.000	16.451.800.916	52,45

Realisasi penerimaan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (Rp)	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (Rp)	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan (Rp)	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan (Rp)
1	Settama	0	0	1.851.971.151	6.624.524.203
2	Pusdiklat	0	1.577.560.000	0	0
3	Politeknik Statistika STIS	5.481.000.000	0	0	0
4	DKI Jakarta	0	0	0	367.272
5	Jawa Barat	0	0	0	11.375.137
6	Jawa Tengah	0	0	0	8.009.480
7	DI Yogyakarta	0	0	0	2.167.524
8	Jawa Timur	0	0	0	4.771.585
9	Aceh	0	0	0	458.222
10	Sumatera Utara	0	0	0	454.800
11	Sumatera Barat	0	0	0	2.806.831
12	Lampung	0	0	0	2.593.000
13	Kalimantan Barat	0	0	0	2.222.967
14	Kalimantan Timur	0	0	0	3.070.704
15	Sulawesi Tengah	0	0	0	70.000
16	Sulawesi Selatan	0	0	0	169.900
17	Sulawesi Tenggara	0	0	0	209.589
18	Bali	0	0	872.505.000	0
19	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	143.403
20	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	1.800.882
21	Bengkulu	0	0	0	80.000
22	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	17.800
23	Gorontalo	0	0	0	105.220
24	Kepulauan Riau	0	0	0	1.057.200
25	Papua Barat	0	0	0	368.393
26	Sulawesi Barat	0	0	0	1.920.653
Jumlah		5.481.000.000	1.577.560.000	2.724.476.151	6.668.764.765

Pendapatan Bunga,
Pengelolaan
Rekening
Perbankan, dan
Pengelolaan
Keuangan
Rp5.521.292.054,00

B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2022, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBPN yang akan diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan sebesar Rp4.310.000,00. Realisasi atas penerimaan PNBPN yang berasal dari pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.521.292.054,00 atau 128.104,22 persen.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan penerimaan pendapatan yang berupa pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro) dari rekening Bendahara Pengeluaran, serta pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	4.310.000	58.887	1,37
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0	5.521.233.167	0,00
Jumlah		4.310.000	5.521.292.054	128.104,22

Realisasi penerimaan Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (Rp)	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Rp)
1	Settama	714	5.503.145.292
2	Jawa Barat	2.500	10.500.000
3	Sumatera Utara	0	4.530.500
4	Jambi	0	3.000.000
5	Sulawesi Selatan	0	57.375
6	Bali	55.488	0
7	Kepulauan Riau	185	0
Jumlah		58.887	5.521.233.167

Pendapatan Denda
Rp1.313.032.692,00

B.1.4 Pendapatan Denda

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2022, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBPN yang akan diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan denda sebesar Rp283.038.000,00. Realisasi atas penerimaan PNBPN yang berasal dari pendapatan denda selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.313.032.692,00 atau 463,91 persen. Pendapatan Denda merupakan penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.

Adapun perolehan realisasi pendapatan denda adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	283.038.000	1.310.149.492	462,89
425839	Pendapatan Denda Lainnya		0	0,00
	Jumlah	283.038.000	1.313.032.692	463,91

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Rp)	Pendapatan Denda Lainnya (Rp)
1	Settama	1.061.416.936	0
2	Jawa Barat	62.621.055	0
3	Jawa Tengah	72.945.679	0
4	DI Yogyakarta	5.921.850	0
5	Jawa Timur	6.285.463	0
6	Sumatera Utara	18.286.819	0
7	Sumatera Barat	1.128.489	2.883.200
8	Sumatera Selatan	23.147.841	0
9	Lampung	4.289.901	0
10	Kalimantan Tengah	147.665	0
11	Kalimantan Selatan	1.352.107	0
12	Sulawesi Tengah	16.424.568	0
13	Nusa Tenggara Barat	5.291.951	0
14	Nusa Tenggara Timur	5.637.053	0
15	Papua	7.955.598	0
16	Maluku Utara	2.336.877	0
17	Banten	931.768	0
18	Kepulauan Riau	12.500.505	0
19	Sulawesi Barat	1.527.367	0
	Jumlah	1.310.149.492	2.883.200

Pendapatan Lain-lain
Rp20.137.247.783,00

B.1.5 Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2022, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBPN yang akan diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan lain-lain sebesar Rp1.772.276.000,00. Realisasi atas penerimaan PNBPN yang berasal dari pendapatan lain-lain selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp20.137.247.783,00 atau 1.136,24 persen.

Pendapatan Lain-lain adalah penerimaan pendapatan yang berupa penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, dan pendapatan anggaran lain-lain. Penerimaan pendapatan berupa setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS merupakan penerimaan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa dana pensiun PNS yang dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT TASPEN (Persero) dengan menggunakan kode satker Sekretariat Utama BPS. Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	213.410.000	19.240.008.653	9.015,51
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.431.458.000	532.747.973	37,22
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	42.080.000	45.353.640	107,78

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	84.146.000	112.368.437	133,54
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	50.000	0	0,00
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1.132.000	206.769.080	18.265,82
Jumlah		1.772.276.000	20.137.247.783	1.136,24

Realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS (Rp)	Pendapatan Anggaran Lain-lain (Rp)
1	Settama	1.169.661.902	256.522.143	0	112.368.437	1.592.554
2	Pusdiklat	49.330.600	42.000.000	0	0	0
3	Polstat STIS	42.906.442	0	0	0	0
4	DKI Jakarta	301.557.132	0	0	0	0
5	Jawa Barat	968.017.152	161.000	0	0	390.000
6	Jawa Tengah	1.528.617.745	2.686.310	0	0	0
7	DI Yogyakarta	302.595.468	3.521.900	0	0	0
8	Jawa Timur	1.349.400.959	7.479.075	0	0	670
9	Aceh	679.993.101	172.300	0	0	0
10	Sumatera Utara	1.148.281.782	559.680	0	0	3.360
11	Sumatera Barat	716.777.485	10.439.924	0	0	0
12	Riau	538.670.412	5.190.000	0	0	0
13	Jambi	457.969.756	0	0	0	0
14	Sumatera Selatan	664.956.502	0	0	0	0
15	Lampung	553.292.963	6.859.500	0	0	0
16	Kalimantan Barat	416.868.734	381.300	0	0	40.000
17	Kalimantan Tengah	319.398.014	1.567.500	0	0	133.600
18	Kalimantan Selatan	523.049.806	0	0	0	0
19	Kalimantan Timur	265.680.819	5.651.288	0	0	555.000
20	Sulawesi Utara	504.181.042	0	0	0	0
21	Sulawesi Tengah	404.907.789	5.568.000	0	0	0
22	Sulawesi Selatan	919.633.473	3.716.912	37.000.000	0	0
23	Sulawesi Tenggara	522.144.106	28.050	0	0	0
24	Maluku	359.642.496	7.549.200	0	0	886
25	Bali	410.598.543	3.169.764	0	0	0
26	Nusa Tenggara Barat	309.115.100	47.442.686	300	0	0
27	Nusa Tenggara Timur	709.211.667	116.514.868	6.978.340	0	0
28	Papua	387.027.079	0	0	0	370.981
29	Bengkulu	417.622.480	13.505	1.375.000	0	2
30	Maluku Utara	143.536.915	3.049.868	0	0	0
31	Banten	397.640.660	0	0	0	65.900.000

No.	Wilayah/Satker	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS (Rp)	Pendapatan Anggaran Lain-lain (Rp)
32	Kep. Bangka Belitung	386.998.635	0	0	0	0
33	Gorontalo	260.038.002	698.000	0	0	0
34	Kep. Riau	261.731.856	203.000	0	0	0
35	Papua Barat	412.604.868	1.254.000	0	0	87.632.027
36	Sulawesi Barat	263.006.248	0	0	0	0
37	Kalimantan Utara	173.340.920	348.200	0	0	50.150.000
	Jumlah	19.240.008.653	532.747.973	45.353.640	112.368.437	206.769.080



Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,

Margo Yuwono



Realisasi Belanja
Rp8.311.231.645.255,00

B.2 BELANJA

Realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.311.231.645.255,00 atau 97,08 persen dari pagu yang sebesar Rp8.560.888.091.000,00. Rincian pagu dan realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2022 menurut kelompok program tersaji sebagai berikut:

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program

Kode	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.049.571.372.000	2.976.478.734.534	97,60
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	5.511.316.719.000	5.334.752.910.721	96,80
Jumlah		8.560.888.091.000	8.311.231.645.255	97,08

Pada Tahun 2020, BPS merestrukturisasi program dari semula 4 (empat) program, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMPTTL BPS), Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA BPS), Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA BPS), dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), menjadi hanya 2 (dua) program yaitu Dukungan Manajemen dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Tujuan perubahan struktur program dan kegiatan tersebut antara lain untuk meningkatkan efektifitas, fleksibilitas, dan optimalisasi kinerja dalam pelaksanaan anggaran dan menyusun indikator BPS yang lebih menggambarkan indikator program (*outcome*) dan lebih bersifat *outward looking*.

Pagu menurut kelompok program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.049.571.372.000,00 atau 35,62 persen dari total pagu belanja, digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai dan sudah di alokasi ke seluruh satker, operasional perkantoran sebanyak 517 satker, penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan di Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPS, dan kegiatan non operasional lainnya.

Pagu menurut kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp5.511.316.719.000,00 atau 64,38 persen dari total pagu. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut: program Dukungan Manajemen sebesar Rp2.976.478.734.534,00 atau 97,60 persen dari pagu belanja dan realisasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp5.334.752.910.721,00 atau 96,80 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama Tahun Anggaran 2022 secara keseluruhan adalah Rp8.311.231.645.255,00. Dari seluruh nilai realisasi belanja menurut kelompok program, persentase realisasi belanja kelompok program Dukungan Manajemen adalah 35,81 persen dan realisasi belanja kelompok program PPIS adalah 64,19 persen.

Pagu dan realisasi belanja selama Tahun Anggaran 2022 selain dikelompokkan berdasarkan program kegiatan, juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Pagu dan realisasi belanja berdasarkan kelompok sumber dana terdiri dari pagu dan realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni (RM) dan sumber dana PNPB. Pagu dan realisasi belanja masing-masing sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni	8.530.022.898.000	8.294.796.622.648	97,24
04	PNBP	27.976.706.000	13.628.472.552	48,71
11	Hibah Langsung Luar Negeri	2.888.487.000	2.806.550.055	97,16
Jumlah		8.560.888.091.000	8.311.231.645.255	97,08

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja dengan sumber dana Rupiah Murni memiliki pagu sebesar Rp8.530.022.898.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.294.796.622.648,00 atau 97,24 persen dari pagu. Pagu dalam kelompok sumber dana Rupiah Murni merupakan pagu yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Penyusunan Pengembangan dan Evaluasi Program dan Anggaran (2881) sebesar Rp10.324.508.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp9.847.281.897,00.
2. Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum (2882) sebesar Rp7.114.578.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp6.099.898.526,00.
3. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian (2883) sebesar Rp8.525.685.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp8.440.784.557,00.
4. Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan (2884) sebesar Rp254.188.345.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp252.437.234.919,00.
5. Dukungan Manajemen BPS Lainnya (2885) sebesar Rp125.565.154.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp119.217.314.872,00.
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (2886) sebesar Rp2.529.051.581.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.468.911.817.711,00.
7. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS) (2887) sebesar Rp67.746.644.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp66.318.985.453,00.
8. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) (2888) sebesar Rp37.871.661.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp36.475.429.227,00.
9. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I (4203) sebesar Rp869.329.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp861.700.782,00.
10. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II (4204) sebesar Rp927.002.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp918.470.279,00.
11. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III (4205) sebesar Rp983.558.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp970.686.022,00.

12. Pengembangan dan Analisis Statistik (2896) sebesar Rp2.787.016.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.366.710.850,00.
13. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp18.408.742.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp17.005.542.446,00.
14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898) sebesar Rp17.365.280.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp16.488.990.749,00.
15. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899) sebesar Rp10.055.398.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp9.216.113.793,00.
16. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900) sebesar Rp1.577.282.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.339.797.626,00.
17. Pengembangan Sistem Informasi Statistik (2901) sebesar Rp10.312.915.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp9.497.368.431,00.
18. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (2902) sebesar Rp10.237.554.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp9.433.777.554,00.
19. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (2903) sebesar Rp265.661.491.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp253.448.807.647,00.
20. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi dan Konstruksi (2904) sebesar Rp35.966.561.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp33.331.588.801,00.
21. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp946.836.615.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp922.061.173.293,00.
22. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp182.738.123.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp177.128.453.934,00.
23. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp3.315.898.645.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp3.228.996.815.108,00.
24. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (2908) sebesar Rp45.153.168.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp42.328.677.036,00.
25. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (2909) sebesar Rp9.101.690.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp7.644.649.863,00.
26. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910) sebesar Rp614.754.373.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp594.008.551.272,00.

Pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN yang tercatat dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.976.706.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.628.472.552,00 atau 48,71 dari pagu. Pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN merupakan pagu untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (2887) sebesar Rp1.198.942.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp918.864.555,00.

2. Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) (2888) sebesar Rp5.204.385.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp5.060.265.734,00.
3. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp20.761.950.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp6.868.840.295,00.
4. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp811.429.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp780.501.968,00.

Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri yang tercatat dalam DIPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.888.487.000,00 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dengan realisasi sebesar Rp2.806.550.055,00 atau 97,16 dari pagu. Pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri merupakan pagu untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp1.099.743.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.090.539.895,00 merupakan hibah dari UNFPA.
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp1.788.744.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.716.010.160,00 merupakan hibah dari UNICEF.

Pagu belanja kelompok sumber dana selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.560.888.091.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni dari keseluruhan nilai pagu adalah 99,64 persen atau sebesar Rp8.530.022.898.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN adalah 0,33 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp27.976.706.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri adalah 0,03 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp2.888.487.000,00.

Realisasi belanja kelompok sumber dana selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp8.311.231.645.255,00. Pada realisasi belanja kelompok sumber dana, persentase realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni adalah 99,80 persen atau sebesar Rp8.294.796.622.648,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni mendominasi realisasi belanja kelompok sumber dana. Persentase realisasi belanja sumber dana PNBPN memiliki porsi 0,16 persen atau sebesar Rp13.628.472.552,00 keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Sedangkan persentase realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri memiliki porsi 0,03 persen atau sebesar Rp2.806.550.055,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana.

Perbandingan realisasi belanja kelompok sumber dana sampai dengan periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 17
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
Periode TA 2022 dan 2021

Kode	Sumber Dana	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rupiah Murni (RM)	8.294.796.622.648	3.701.251.579.842	4.593.545.042.806	124,11
04	PNBP	13.628.472.552	24.583.472.118	(10.954.999.566)	(44,56)
11	Hibah Langsung Luar Negeri	2.806.550.055	3.918.979.413	(1.112.429.358)	(28,39)
Jumlah		8.311.231.645.255	3.729.754.031.373	4.581.477.613.882	122,84

Secara keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana mengalami kenaikan sebesar 122,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun Anggaran 2021. Kenaikan terjadi pada realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp4.593.545.042.806,00 atau sebesar 124,11 persen, sedangkan realisasi belanja sumber dana PNBP mengalami penurunan sebesar Rp10.954.999.566,00 atau sebesar 44,56 persen dan realisasi belanja hibah langsung luar negeri mengalami penurunan sebesar Rp1.112.429.358,00 atau sebesar 28,39 persen.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama Tahun Anggaran 2022 selain dikelompokkan menurut sumber dana, juga dikelompokkan menurut jenis belanja. Pengelompokan pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan kode jenis belanja 51, Belanja Barang dengan kode jenis belanja 52, dan Belanja Modal dengan kode jenis belanja 53.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik menurut kelompok jenis belanja periode Tahun Anggaran 2022 disajikan berikut ini.

Tabel 18
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Belanja Pegawai	2.329.604.586.000	2.282.380.174.486	97,97
52	Belanja Barang	6.058.443.749.000	5.860.512.565.577	96,73
53	Belanja Modal	172.839.756.000	168.338.905.192	97,40
Jumlah		8.560.888.091.000	8.311.231.645.255	97,08

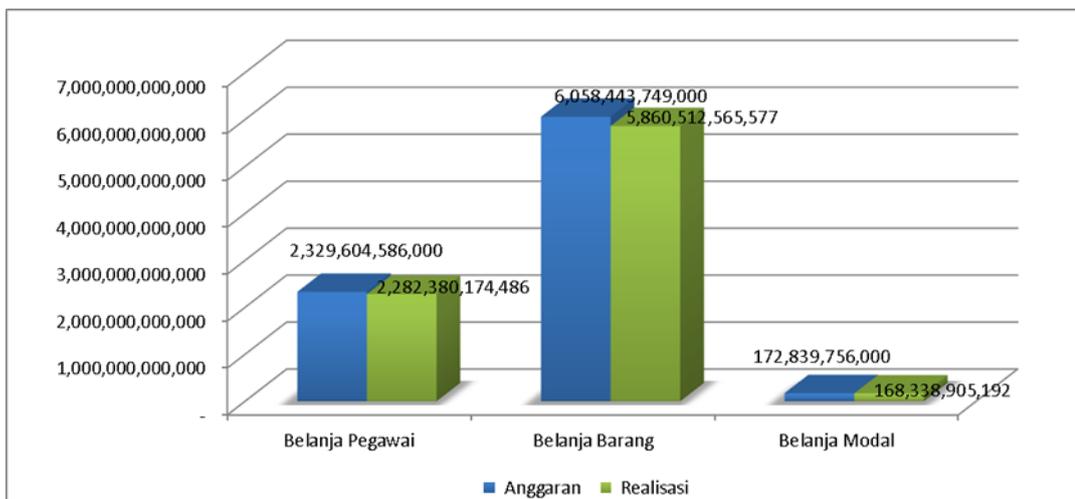
Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama Tahun Anggaran 2022 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp8.560.888.091.000,00 dan Rp8.311.231.645.255,00. Komposisi pagu dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi pagu Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 27,21 persen atau senilai Rp2.329.604.586.000,00. Komposisi realisasi Belanja Pegawai netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 27,46 persen atau senilai Rp2.282.380.174.486,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan pagu Belanja Pegawai adalah 97,97 persen.

2. Komposisi pagu Belanja Barang dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 70,77 persen atau senilai Rp6.058.443.749.000,00. Komposisi realisasi Belanja Barang netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 70,51 persen atau senilai Rp5.860.512.565.577,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan pagu Belanja Barang adalah 96,73 persen.
3. Komposisi pagu Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 2,02 persen atau senilai Rp172.839.756.000,00. Komposisi realisasi Belanja Modal netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 2,03 persen atau senilai Rp168.338.905.192,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan pagu Belanja Modal adalah 97,40 persen.

Persentase pagu belanja barang merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai pagu menurut jenis belanja dibandingkan dengan pagu belanja pegawai dan belanja modal selama Tahun Anggaran 2022.

Komposisi pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja selama Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Periode Tahun Anggaran 2022

Realisasi belanja menurut jenis belanja selama Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun Anggaran 2021 seperti tersaji sebagai berikut.

**Tabel 19
Perbandingan Realisasi Belanja
Periode TA 2022 dan 2021**

Kode	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Belanja Pegawai	2.282.380.174.486	2.082.334.903.082	200.045.271.404	9,61
52	Belanja Barang	5.860.512.565.577	1.419.190.329.975	4.441.322.235.602	312,95
53	Belanja Modal	168.338.905.192	228.228.798.316	(59.889.893.124)	(26,24)
Jumlah		8.311.231.645.255	3.729.754.031.373	4.581.477.613.882	122,84

Secara keseluruhan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.581.477.613.882,00 atau sebesar 122,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp200.045.271.404,00 atau sebesar 9,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2021. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai pada periode Tahun Anggaran 2022 terjadi pada Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang terdiri dari: Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Profesi Dosen mengalami kenaikan pada periode Tahun Anggaran 2022 dibandingkan periode yang sama di Tahun Anggaran 2021. Realisasi Belanja Lembur dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito juga mengalami kenaikan pada periode Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Belanja Barang selama periode Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp4.441.322.235.602,00 sebesar 312,95 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Kenaikan tersebut terdapat pada realisasi belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dalam negeri, dan belanja perjalanan luar negeri. Kenaikan tersebut disebabkan adanya pelaksanaan Kegiatan Pendataan Awal Regsosek Tahun 2022, Pelaksanaan Sensus Sampel Long Form SP2020 Tahun 2022, Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023.

Realisasi Belanja Modal selama periode Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp59.889.893.124,00 atau sebesar 26,24 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2021. Penurunan tersebut terdapat pada realisasi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal lainnya.

Belanja Pegawai
Rp2.282.380.174.486,00

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), pensiunan, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS/ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.282.380.174.486,00 atau 97,97 persen dari pagunya sebesar Rp2.329.604.586.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja netto yaitu nilai bruto Belanja Pegawai yang nilainya sebesar Rp2.299.747.246.301,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp17.367.071.815,00.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik selama periode Tahun Anggaran 2022 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Realisasi Belanja Pegawai selama periode Tahun Anggaran 2022 seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM).

Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp1.181.488.344.609,00

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) untuk periode Tahun 2022 adalah Rp1.181.488.344.609,00 atau sebesar 97,30 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS senilai Rp1.214.318.727.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS selama periode Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 20
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Kode Akun	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	787.713.981.000	781.510.693.853	154.178.360	781.356.515.493	99,19
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.584.000	12.826.146	691.602	12.134.544	41,02
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50.635.055.000	49.842.132.488	45.537.515	49.796.594.973	98,34
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15.687.217.000	15.338.555.300	3.935.382	15.334.619.918	97,75
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	34.214.143.000	33.560.788.195	15.536.343.262	18.024.444.933	52,68
511124	Belanja Tun. Fungsional PNS	132.959.900.000	131.065.858.790	1.111.414.848	129.954.443.942	97,74
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5.269.162.000	4.959.829.213	1.008.380	4.958.820.833	94,11
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43.702.024.000	43.170.746.914	11.353.900	43.159.393.014	98,76
511129	Belanja Uang Makan PNS	122.027.422.000	117.663.664.550	54.394.700	117.609.269.850	96,38
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	425.800.000	409.900.000	125.000	409.775.000	96,24
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	3.959.941.000	3.878.100.000	9.300.000	3.868.800.000	97,70
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	15.740.340.000	15.352.676.632	293.485.495	15.059.191.137	95,67
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	1.954.158.000	1.944.340.972	0	1.944.340.972	99,50
Jumlah		1.214.318.727.000	1.198.710.113.053	17.221.768.444	1.181.488.344.609	97,30

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.181.488.344.609,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yaitu Rp1.198.710.113.053,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp17.221.768.444,00. Realisasi belanja pegawai periode Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PNS, pembayaran pembulatan gaji PNS, pembayaran tunjangan suami/istri PNS, pembayaran tunjangan anak PNS, pembayaran tunjangan struktural PNS, pembayaran tunjangan fungsional PNS, pembayaran tunjangan PPh PNS, pembayaran tunjangan beras PNS, pembayaran uang makan PNS, pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS, pembayaran tunjangan khusus Papua

PNS, pembayaran tunjangan umum PNS, dan pembayaran tunjangan profesi dosen. Nilai pengembalian belanja ini terdiri dari pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Umum PNS.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 21
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	781.356.515.493	760.414.243.349	20.942.272.144	2,75
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.134.544	11.939.701	194.843	1,63
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	49.796.594.973	49.772.041.267	24.553.706	0,05
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15.334.619.918	15.387.389.828	(52.769.910)	(0,34)
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	18.024.444.933	39.201.168.372	(21.176.723.439)	(54,02)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	129.954.443.942	53.063.707.176	76.890.736.766	144,90
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4.958.820.833	2.326.296.353	2.632.524.480	113,16
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43.159.393.014	42.584.877.466	574.515.548	1,35
511129	Belanja Uang Makan PNS	117.609.269.850	130.338.445.257	(12.729.175.407)	(9,77)
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	409.775.000	411.000.000	(1.225.000)	(0,30)
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	3.868.800.000	3.811.665.000	57.135.000	1,50
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	15.059.191.137	15.888.514.759	(829.323.622)	(5,22)
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	1.944.340.972	1.938.003.415	6.337.557	0,33
	Jumlah	1.181.488.344.609	1.115.149.291.943	66.339.052.666	5,95

Realisasi belanja pegawai (*netto*) periode Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp66.339.052.666,00 atau sebesar 5,95 persen dibandingkan realisasi belanja pegawai (*netto*) pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2021. Kenaikan dan penurunan realisasi belanja pegawai terbesar pada periode Tahun Anggaran 2022 dibandingkan dengan periode yang sama Tahun Anggaran 2021 dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS mengalami kenaikan sebesar Rp20.942.272.144,00 atau sebesar 2,75 persen. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS sampai dengan periode Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pembayaran gaji induk pegawai, gaji susulan, gaji ke-13 dan ke-14 Tahun Anggaran 2022, kekurangan gaji pokok, kenaikan pangkat PNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun Anggaran 2022, dan gaji terusan.
2. Realisasi Belanja Tunjangan Struktural PNS selama periode Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp21.176.723.439,00 atau sebesar 54,02 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu periode Tahun Anggaran 2021. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyerderhanaan

birokrasi struktur jabatan PNS. Dalam hal ini, BPS telah melakukan penyetaraan jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

3. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional mengalami kenaikan sebesar Rp76.890.736.766,00 atau sebesar 144,90 persen. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional sampai dengan periode Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk pembayaran tunjangan fungsional dan kekurangan tunjangan fungsional. Kenaikan ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyederhanaan birokrasi struktur jabatan PNS. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyederhanaan Birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan Pejabat Administrasi menjadi Pejabat Fungsional, namun juga dilakukan melalui perubahan sistem kerja.

Belanja Uang Lembur
Rp23.679.597.400,00

B.2.1.2 Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur (5122) untuk periode Tahun Anggaran 2022 adalah Rp23.679.597.400,00 atau 84,62 persen dari pagu anggaran belanja uang lembur senilai Rp27.981.935.000,00. Belanja Uang Lembur merupakan komponen belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran uang lembur. Uang lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah. Uang lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Uang Lembur selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 22
Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512211	Belanja UangLembur	27.981.935.000	23.681.571.250	1.973.850	23.679.597.400	84,62
Jumlah		27.981.935.000	23.681.571.250	1.973.850	23.679.597.400	84,62

Realisasi belanja uang lembur netto sebesar Rp23.679.597.400,00 berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Uang Lembur sebesar 23.681.571.250,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.973.850,00. Perbandingan Realisasi Belanja Uang Lembur periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 23
Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	Belanja Uang Lembur	23.679.597.400	18.431.748.584	5.247.848.816	28,47
Jumlah		23.679.597.400	18.431.748.584	5.247.848.816	28,47

Realisasi Belanja Uang Lembur selama periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp23.679.597.400,00 sedangkan realisasi Belanja Uang Lembur untuk periode yang sama pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp18.431.748.584,00. Realisasi Belanja Uang Lembur selama periode Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp5.247.848.816,00 atau sebesar 28,47 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu periode Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan sistem kerja yang sudah kembali normal atau penerapan *Work From Office* (WFO) secara 100 persen dan kerja lembur diberlakukan secara normal kembali.

Belanja Tunjangan
Khusus & Belanja
Pegawai Transito
Rp1.077.212.232.477,00

B.2.1.3 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (5124) selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.077.212.232.477,00 atau sebesar 99,07 persen dari pagu yang senilai Rp1.087.303.924.000,00. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito terdiri dari Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) yang berupa belanja tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Pengertian ini termuat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 24
Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.087.303.924.000	1.077.355.561.998	143.329.521	1.077.212.232.477	99,07
Jumlah		1.087.303.924.000	1.077.355.561.998	143.329.521	1.077.212.232.477	99,07

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito secara netto selama periode Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.077.212.232.477,00 atau sebesar 99,07 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp1.077.355.561.998,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp143.329.521,00.

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 25
Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.077.212.232.477	948.753.862.555	128.458.369.922	13,54
Jumlah		1.077.212.232.477	948.753.862.555	128.458.369.922	13,54

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.077.212.232.477,00 sedangkan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama periode Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp948.753.862.555,00. Realisasi Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama periode Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp128.458.369.922,00 atau sebesar 13,54 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2022 yaitu dengan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2021 tidak diberikan tambahan berupa Tunjangan Kinerja.

Belanja Barang
Rp5.860.512.565.577,00

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp5.860.512.565.577,00 atau 96,79 persen dari pagu yang sebesar Rp6.058.443.749.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja *netto* yaitu nilai bruto Belanja Barang yang nilainya sebesar Rp5.863.832.514.913,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp3.319.949.336,00.

Realisasi Belanja Barang Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2022 meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Perjalanan Luar Negeri. Realisasi Belanja Barang selama Tahun Anggaran 2022 bersumber dari sumber dana Rupiah Murni, PNBP, dan Hibah Langsung Luar Negeri.

Realisasi Belanja Barang dalam kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 (Regsosek 2022) adalah berupa Rapat Koordinasi Persiapan Regsosek, *fullboard*, dan perlengkapan Persiapan Regsosek, Finalisasi Persiapan Regsosek, Finalisasi Regsosek, Evaluasi Hasil Pendataan Regsosek, Pelatihan Intama dan Innas Pendataan dan Pengolahan Data Regsosek 2022, perlengkapan pelatihan Petugas Pendataan dan

Monitoring Kualitas, pelaksanaan dan perjalanan *Rule Validasi* dan Pembangunan Aplikasi, pelatihan dan perjalanan dinas *Pemodelan PMT*, perjalanan dinas *Regsosek*, transport lokal, pengadaan perangkat lunak untuk visualisasi dan analisis data, honor mengajar *Innas*, honor narasumber/pakar/praktisi, honor *output* kegiatan *Regsosek 2022*, konsumsi rapat, perlengkapan dan pengadaan *Rapat Teknis BPS*, pengadaan video publisitas *Regsosek 2022* (TV, radio, media *online*, dan media sosial), pencetakan buku pedoman, dan *Call Center Regsosek 2022* .

Realisasi Belanja Barang dalam kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) berupa Pelaksanaan Sensus Sampel *Long Form* SP2020 yang terdiri dari Pelatihan *Innas*, *Inda*, dan Petugas *Long Form* SP2020, pengadaan perlengkapan *Rapat Koordinasi Nasional Long Form* SP2020, Belanja Jasa Profesi, Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota, Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota dalam kegiatan Pelaksanaan Sensus Sampel *Long Form* SP2020, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota kegiatan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas *Long Form* SP2020, Belanja Jasa Lainnya untuk penayangan iklan layanan masyarakat di media cetak, media *online* *kompas.com*, radio, penayangan video publisitas, *top up quota WA for business*, *talkshow* di TV One untuk kegiatan Publisitas *Long Form* SP2020, dan kegiatan Profil Penduduk *Long Form* SP2020 berupa *Workshop Analisis Profil Penduduk Nasional dan Provinsi*, *Diseminasi Long Form* SP2020, serta *Pengolahan Long Form* SP2020.

Sedangkan realisasi Belanja Barang dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) berupa Belanja Perjalanan Dinas supervisi, honor narasumber, *fullboard*, dan perjalanan *Persiapan Gladi Bersih ST2023*, *fullboard*, dan perjalanan *Pembahasan Dalam Rangka Finalisasi Program Pengolahan ST2023*, alat pelindung diri, *Gladi Bersih ST2023*, perjalanan dinas petugas *Gladi Bersih MK 2023*, *Gladi Bersih Pengolahan ST2023*, *Gladi Bersih PES ST2023*, *Persiapan Diseminasi ST2023*, pembahasan persiapan metadata, pencetakan pedoman pencacah (*pengolahan pencacah dan kuesioner*), pengiriman pedoman dan kuesioner dari pusat ke provinsi, pelatihan *Intama* dan *Innas*, supervisi pelatihan petugas/pengiriman *Innas*, kegiatan *Updating DPP UTL* dan *Sistem DPP UTL* pelatihan petugas, perjalanan dinas dalam rangka *Probit Audit ST2023*, *Penyusunan Rancangan Hasil Analisis Hasil ST2023*, *Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023*, *Penyusunan Bahan Publisitas ST2023*, jasa konsultan komunikasi *ST2023*, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja jasa lainnya, penyelenggaraan *Kick Off ST2023*, video publisitas, iklan layanan masyarakat (*versi radio dan media sosial*), pengadaan media luar ruang *ST2023*, pencetakan dan pemasangan *giant sticker*, iklan media cetak, jasa *endorment* publik figur, dan dekorasi *ST2023*.

Belanja Barang
Operasional
Rp243.985.846.900,00

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Realisasi Belanja Barang Operasional (5211) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp243.985.846.900,00 atau 97,40 persen dari pagu yang senilai Rp250.502.049.000,00.



Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Operasional selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 26
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	187.545.659.000	183.029.653.906	11.717.051	183.017.936.855	97,59
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	520.000	504.000	0	504.000	96,92
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	23.818.000	22.136.702	0	22.136.702	92,94
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.505.521.000	3.173.184.929	2.126.850	3.171.058.079	90,46
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	54.950.607.000	53.884.479.402	107.466.950	53.777.012.452	97,86
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	763.198.000	691.274.068	0	691.274.068	90,58
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	3.712.726.000	3.305.924.744	0	3.305.924.744	89,04
Jumlah		250.502.049.000	244.107.157.751	121.310.851	243.985.846.900	97,40

Realisasi Belanja Barang Operasional secara *netto* selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp243.985.846.900,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp244.107.157.751,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp121.310.851,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja keperluan perkantoran, pengembalian belanja pengiriman surat dinas pos pusat dan pengembalian belanja honor operasional satuan kerja. Realisasi Belanja Barang Operasional (5211) yaitu digunakan untuk pembayaran koneksi internet VSAT BPS Kabupaten/Kota, koneksi internet untuk pengguna dan *server* BPS Pusat, pengadaan koneksi SDWAN, pembaharuan lisensi *software* komunikasi layar jarak jauh pendukung koordinasi kegiatan BPS Pusat, pengadaan koneksi *metro ethernet* antar pusat data, biaya langganan Telkom Solution, pengadaan jasa *outsourcing* satuan pengamanan, pengadaan *standing banner* dan papan nama ruangan, pengiriman surat dinas melalui kantor pos, honor dan lembur PPNPN, honor pengurus/penyimpan BMN tingkat UAPB dan UAKPB, pengadaan alat pengaman diri K3, belanja keperluan Klinik Pratama BPS, belanja alat kebersihan, pengadaan pakan ikan kolam, aquarium, taman, dan lain lain.

Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 27
Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	183.017.936.855	182.668.481.956	349.454.899	0,19
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	504.000	0	504.000	100,00
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22.136.702	127.906.642	(105.769.940)	(82,69)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.171.058.079	2.416.013.919	755.044.160	31,25
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53.777.012.452	50.541.498.810	3.235.513.642	6,40
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	691.274.068	930.203.224	(238.929.156)	(25,69)
521121	Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian	0	55.000	(55.000)	(100,00)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	3.305.924.744	7.372.042.712	(4.066.117.968)	(55,16)
Jumlah		243.985.846.900	244.056.202.263	(70.355.363)	(0,03)

Realisasi Belanja Barang Operasional selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp243.985.846.900,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Operasional selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp244.056.202.263,00. Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp70.355.363,00 atau sebesar 0,03 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada belanja penambah daya tahan tubuh, belanja barang operasional lainnya, dan penurunan pada belanja barang operasional-penanganan pandemi Covid-19

Realisasi Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP, yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 28
Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	183.007.936.855	10.000.000	0	183.017.936.855
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	504.000	0	0	504.000
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	22.136.702	0	0	22.136.702
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.171.058.079	0	0	3.171.058.079
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	53.777.012.452	0	0	53.777.012.452

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	691.274.068	0	0	691.274.068
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	3.305.924.744	0	0	3.305.924.744
Jumlah		243.975.846.900	10.000.000	0	243.985.846.900

Belanja Barang Non Operasional
Rp3.432.875.264.782,00

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.432.875.264.782,00 atau 97,81 persen dari pagu yang senilai Rp3.509.610.632.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 29
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521211	Belanja Bahan	358.205.224.000	335.215.964.692	74.038.387	335.141.926.305	93,56
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.037.914.038.000	3.002.348.359.047	1.249.918.117	3.001.098.440.930	98,79
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan/ Atase	8.560.000	0	0	0	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	75.031.415.000	60.184.644.309	13.358.247	60.171.286.062	80,19
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	34.781.304.000	32.967.237.533	270.000	32.966.967.533	94,78
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.261.994.000	3.091.057.971	0	3.091.057.971	94,76
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	406.177.000	405.585.981	0	405.585.981	99,85
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	1.920.000	0	0	0	0,00
Jumlah		3.509.610.632.000	3.434.212.849.533	1.337.584.751	3.432.875.264.782	97,81

Realisasi Belanja Barang Non Operasional secara netto selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp3.432.875.264.782,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp3.434.212.849.533,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.337.584.751,00. Pengembalian

terdiri atas pengembalian belanja bahan, pengembalian belanja honor *output* kegiatan, pengembalian belanja barang non operasional lainnya dan pengembalian belanja barang non operasional-penanganan pandemi Covid-19. Belanja Barang Non Operasional (5212) yaitu digunakan untuk pembayaran belanja Perlengkapan Peserta (*Seminar Kit*) *Workshop* Analisis Tematik Kependudukan Nasional dan Provinsi, Pelatihan Innas Pendataan Regsosek 2022, Standar Penilaian Kinerja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Rekonsiliasi IPM, *Workshop* Inkesra dan SDG's, Kegiatan P4GN, *Event* Nasional (MTQ), *Workshop Change Management*, Pendataan MK Regsosek 2022, Rapat Evaluasi Indikator Hasil LF SP2020, Rekon Hail PAW, FGD Peningkatan Kualitas Pengisian Dokumen PEB, FGD Hasil Survei PAW, *Workshop* Evaluasi Kegiatan Statistik KTIP, Konsinyering, Pelatihan Innas Pengolahan Regsosek 2022, *Leadership Training* (Reformasi Birokrasi), Pembinaan Statistik Sektor, dan Rapat Teknis BPS; Perlengkapan Pojok Statistik Universitas Pattimura Provinsi Maluku, Universitas Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Khairun Ternate Provinsi Maluku Utara, Universitas Gorontalo Provinsi Gorontalo, Universitas Papua Provinsi Papua Barat, Universitas Syiah Kuala Provinsi Aceh, Institut Teknologi Kesehatan Provinsi Bali, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Provinsi Jawa Barat; Pencetakan Publikasi Statistik Laporan Perekonomian Indonesia 2022, Indikator Industri Manufaktur, Brosur Industri Menengah Besar, Industri Manufaktur Indonesia, Perkembangan Indeks Produksi IBS, Direktori Perusahaan Konstruksi, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2022, Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan IMK 2022, Industri Manufaktur Bahan Baku, Industri Manufaktur Produksi, dan DPP UTL; dan Pengadaan Penghargaan untuk acara BPS Awards, alat Rapid Test Urine narkoba 7 parameter, drug abuse test, spanduk, dan alat kesehatan Klinik Pratama BPS, berupa honor Tim Fungsional Statistisi, Tim Pelaksana Kegiatan LF SP2020, penunjuk jalan, Panitia Pengadaan dan Pembantu PPK, mitra arsiparis NTB, Gladi Bersih dan Wilkerstat ST2023, serta Pokja Perolehan Data Inflasi, HPB, Kajian Transmisi Harga Produsen ke Pedagang Besar, e-Commerce, PES, FMS, Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan PNBPN, Kajian Peningkatan Kualitas Data HPB, dan Regsosek 2022, Dekorasi Pojok Statistik Universitas Pattimura Provinsi Maluku, Universitas Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur, Universitas Khairun Ternate Provinsi Maluku Utara, Universitas Gorontalo Provinsi Gorontalo, Universitas Papua Provinsi Papua Barat, Universitas Syiah Kuala Provinsi Aceh, Institut Teknologi Kesehatan Provinsi Bali, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran Provinsi Jawa Barat, ruangan Statistik Terpadu; Bimtek Pemilihan Jasa Konstruksi dan Penetapan TKDN, Penerapan dan Penghitungan TKDN Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi, Pelatihan FAA, Pengembangan SDM Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, klipng berita *online*, pengiriman Kuesioner Survei Perkebunan Tahun Cacah 2023, langganan aset visual; dan Jasa *Assessment Container Platform*, pengadaan alat perlindungan diri dan pengadaan sarana penunjang ruang rapat.



Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 30
Realisasi Belanja Barang Non Operasional
TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	335.141.926.305	87.435.368.229	247.706.558.076	283,30
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.001.098.440.930	384.913.239.745	2.616.185.201.185	679,68
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	60.171.286.062	38.757.277.334	21.414.008.728	55,25
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	32.966.967.533	28.422.155.108	4.544.812.425	15,99
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.091.057.971	0	3.091.057.971	100,00
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	405.585.981	0	405.585.981	100,00
Jumlah		3.432.875.264.782	539.528.040.416	2.893.347.224.366	536,27

Realisasi Belanja Barang Non Operasional selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.432.875.264.782,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp539.528.040.416,00. Realisasi Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.893.347.224.366,00 atau sebesar 536,27 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan antara lain adanya kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2022 dan Gladi Bersih ST 2023, serta kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional periode Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), PNBPN dan Hibah Langsung Luar Negeri yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 31
Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	333.898.726.304	1.243.200.001	0	335.141.926.305
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.998.861.460.930	2.236.980.000	0	3.001.098.440.930
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	54.896.447.165	2.468.288.842	2.806.550.055	60.171.286.062
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	32.919.641.323	47.326.210	0	32.966.967.533

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	3.091.057.971	0	0	3.091.057.971
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	405.585.981	0	0	405.585.981
Jumlah		3.424.072.919.674	5.995.795.053	2.806.550.055	3.432.875.264.782

Belanja Barang
Persediaan
Rp158.472.357.498,00

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan merupakan pengeluaran pemerintah untuk perolehan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang Persediaan (5218) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp158.472.357.498,00 atau 93,70 persen dari pagu yang senilai Rp169.125.999.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Persediaan selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 32
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	168.161.315.000	157.656.142.240	2.113.600	157.654.028.640	93,75
521841	Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi Covid-19	964.684.000	818.328.858	0	818.328.858	84,83
Jumlah		169.125.999.000	158.474.471.098	2.113.600	158.472.357.498	93,70

Realisasi Belanja Barang Persediaan secara *netto* selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp158.472.357.498,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp158.474.471.098,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp2.113.600,00. Pengembalian terdiri atas pengembalian belanja barang persediaan barang konsumsi. Belanja Barang Persediaan (5218) yaitu digunakan untuk pembayaran obat Poliklinik Umum dan Gigi, ATK dan *computer supplies*, plakat eksklusif dan standar, topi, perlengkapan pameran BPS dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk.I Deputy Bidang Neraca, *merchandise* Sosialisasi, dan *goodie bag* biasa; dan pencetakan Daftar SUB-S Survei Ubinan, Daftar SP Palawija, Daftar SP Lahan SP-Alsintan dan SP Benih, publisitas promosi statistik, kalender dinding, kalender meja dan buku kerja, Surat Pengantar Survei Konstruksi, Kuesioner Survei Perusahaan Perkebunan, Kuesioner Survei Konstruksi Tahunan, dan Konstruksi Triwulanan.

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 33
Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	157.654.028.640	58.834.956.960	98.819.071.680	167,96
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	7.700.000	(7.700.000)	(100,00)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi Covid-19	818.328.858	7.441.517.123	(6.623.188.265)	(89,00)
Jumlah		158.472.357.498	66.284.174.083	92.188.183.415	139,08

Realisasi Belanja Barang Persediaan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp158.472.357.498,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Persediaan selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp66.284.174.083,00. Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp92.188.183.415,00 atau sebesar 139,08 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan antara lain adanya kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2022 dan Gladi Bersih ST2023, serta kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Realisasi Belanja Barang Persediaan Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 34
Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	157.530.271.525	123.757.115	0	157.654.028.640
521841	Belanja Barang Persediaan - Penangan Pandemi Covid-19	818.328.858	0	0	818.328.858
Jumlah		158.348.600.383	123.757.115	0	158.472.357.498

Belanja Jasa
Rp163.977.188.778,00

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (5221) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp163.977.188.778,00 atau 93,21 persen dari pagu yang senilai Rp175.920.249.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Jasa selama Tahun 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 35
Pagu dan Realisasi Belanja Jasa

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
522111	Belanja Langganan Listrik	41.452.634.000	40.887.940.321	3.324.388	40.884.615.933	98,63
522112	Belanja Langganan Telepon	1.510.510.000	1.399.526.319	1.044.180	1.398.482.139	92,58
522113	Belanja Langganan Air	1.701.463.000	1.563.609.920	0	1.563.609.920	91,90
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.121.542.000	1.067.097.262	0	1.067.097.262	95,15
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	100,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	785.961.000	588.911.176	0	588.911.176	74,93
522141	Belanja Sewa	44.762.043.000	39.219.735.512	0	39.219.735.512	87,62
522151	Belanja Jasa Profesi	11.942.769.000	9.526.268.500	17.475.000	9.508.793.500	79,62
522191	Belanja Jasa Lainnya	66.594.438.000	64.135.689.474	24.300	64.135.665.174	96,31
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	6.041.889.000	5.603.634.662	356.500	5.603.278.162	92,74
Jumlah		175.920.249.000	163.999.413.146	22.224.368	163.977.188.778	93,21

Realisasi Belanja Jasa secara *netto* selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp163.977.188.778,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Jasa sebesar Rp163.999.413.146,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp22.224.368,00. Pengembalian terdiri atas pengembalian belanja langganan listrik, pengembalian belanja langganan telepon, pengembalian belanja jasa profesi, pengembalian belanja jasa lainnya, dan pengembalian belanja jasa penanganan pandemi Covid-19. Belanja Jasa (5221) yaitu digunakan untuk pembayaran langganan listrik, telepon, air, jasa konsultasi untuk *review* manajemen gedung, *Smart Office* BPS, renovasi ruang auditorium BPS, dan *review* anggaran BPS, sewa *Hygiene Service*, sewa mobil jabatan eselon I, dan sanitasi toilet, honor narasumber kegiatan *Workshop* Penyusunan LK Tahun 2022, Infrastruktur IT Regsosek 2022, Sosialisasi Regsosek 2022, Edukasi Pajak, Pelayanan PNBPNP), belanja jasa *Event Organizer* (Kajian Kualitatif LF SP2020, Diklat, Kompetisi HSN 2022, Penganugerahan HSN Tahun 2022, FGD DPD RI, Rapat Teknis BPS, FGD Komisi XI DPR RI dengan BPS, Sosialisasi Regsosek 2022, *Escorting Conference on Big Data*, *ICBD for Official Statistics (Big Data)*, *Change Management*, *Kick Off* ST2023, dan Pengembangan Pegawai-Pembekalan MPP), pengadaan video publisitas Regsosek 2022, penayangan publisitas Regsosek 2022 di media TV, radio, dan cetak, *Assessment Center* pejabat eselon I, kalibrasi alat kesehatan Klinik Pratama BPS, Medical Check Up (MCU), publisitas ST2023, *Call Center* Regsosek 2022, iklan layanan masyarakat, pencetakan dan pemasangan *giant sticker* ST2023, media luar ruang ST2023, jasa *endorment* figur publik, koneksi mediasi data wisatawan nusantara dan outbound/traveler nasional, pemuktahiran *frame* dan pengembangan kerangka sampel area jagung.

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 36
Realisasi Belanja Jasa TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik	40.884.615.933	34.038.909.800	6.845.706.133	20,11
522112	Belanja Langganan Telepon	1.398.482.139	1.504.191.785	(105.709.646)	(7,03)
522113	Belanja Langganan Air	1.563.609.920	1.338.269.244	225.340.676	16,84
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.067.097.262	157.985.093	909.112.169	575,44
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	7.000.000	0	7.000.000	100,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	588.911.176	183.865.000	405.046.176	220,30
522141	Belanja Sewa	39.219.735.512	5.183.520.801	34.036.214.711	656,62
522151	Belanja Jasa Profesi	9.508.793.500	6.880.118.379	2.628.675.121	38,21
522191	Belanja Jasa Lainnya	64.135.665.174	46.705.091.321	17.430.573.853	37,32
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	5.603.278.162	40.959.423.942	(35.356.145.780)	(86,32)
Jumlah		163.977.188.778	136.951.375.365	27.025.813.413	19,73

Realisasi Belanja Jasa selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp163.977.188.788,00, sedangkan realisasi Belanja Jasa selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp136.951.375.365,00. Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp27.025.813.413,00 atau sebesar 19,73 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan antara lain adanya kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2022 dan Gladi Bersih ST2023, serta kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNPB, yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 37
Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik	40.884.615.933	0	0	40.884.615.933
522112	Belanja Langganan Telepon	1.398.482.139	0	0	1.398.482.139
522113	Belanja Langganan Air	1.563.609.920	0	0	1.563.609.920
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.054.512.745	12.584.517	0	1.067.097.262
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	7.000.000	0	0	7.000.000
522131	Belanja Jasa Konsultan	526.762.276	62.148.900	0	588.911.176
522141	Belanja Sewa	38.932.307.083	287.428.429	0	39.219.735.512
522151	Belanja Jasa Profesi	9.423.943.500	84.850.000	0	9.508.793.500
522191	Belanja Jasa Lainnya	63.484.346.424	651.318.750	0	64.135.665.174
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	5.592.932.678	10.345.484	0	5.603.278.162
Jumlah		162.868.512.698	1.108.676.080	0	163.977.188.778

Belanja Pemeliharaan
Rp138.368.377.061,00

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya. Realisasi Belanja Pemeliharaan (5231) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp138.368.377.061,00 atau 94,86 persen dari pagu yang senilai Rp145.872.945.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Pemeliharaan selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 38
Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.767.115.000	34.601.708.284	171.012	34.601.537.272	96,74
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	356.995.000	332.869.629	0	332.869.629	93,24
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.246.498.000	2.211.577.288	0	2.211.577.288	98,45
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	744.530.000	737.633.696	0	737.633.696	99,07
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.953.952.000	99.752.065.711	7.713.532	99.744.352.179	94,13
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	798.280.000	738.824.497	0	738.824.497	92,55
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	575.000	575.000	0	575.000	100,00
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	5.000.000	1.007.500	0	1.007.500	20,15
Jumlah		145.872.945.000	138.376.261.605	7.884.544	138.368.377.061	94,86

Realisasi Belanja Pemeliharaan secara *netto* selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp138.368.377.061,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp138.376.261.605,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp7.884.544,00. Pengembalian belanja merupakan pengembalian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dan pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin. Belanja Pemeliharaan (5231) yaitu digunakan untuk pembayaran pekerjaan ruang transit dan kamar mandi ruang pimpinan Gedung 2 lantai 2,

pemeliharaan ruang perpustakaan, penggantian *wallpaper* dan *sticker* kaca gedung, pembersihan fasad gedung 2 dan 5, *layout* ruang kerja gedung 1 lantai 3, 4, 5, dan gedung 2 lantai 5, perbaikan jalan aspal kantor BPS, instalasi pipa *supply radiator Genset*, pipa PAM gedung 3, gedung 5 lantai 8, ruangan kolaborasi gedung 1 lantai 7, dan *Pest Control* dan Fumigasi Kantor BPS, pemeliharaan rumah dinas Pondok Bambu, pembelian *Consumable Toner Riso*, Ricoh, dan Comcolor, pemeliharaan AC Split gedung 1, 2, 3, 4, 5, AC Central gedung 1, perangkat *Network Campus*, perangkat TI DC, perangkat infrastruktur DC dan DRC, lift gedung 1, 2, 3, 4 dan 5, *access control*, mesin cetak *digital* Konika, kendaraan dinas eselon I, II, III, perangkat keamanan Jaringan Komunikasi Data, CCTV, *Sewage Treatment Plant (STP)*, Genset 500 KVA, Travo 1250 KVA, pemeliharaan dan penggantian *spare part* mesin *fotocopy* Fuji Xerox, Ricoh dan mesin jilid lem panas, lift gedung 2, 4 dan 5, AC Split gedung 1 dan 2, perpanjangan *Support Software Data Centre (DC)*, perawatan Komputer, *Laptop*, *Notebook*, *Printer*, dan alat penunjangnya, perbaikan meja rapat *hand palet* dan layar telepon, pengurusan Surat Keterangan Tentang Pemenuhan Syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator gedung 1 dan 3, Bahan Bakar Kendaraan (BBK) yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan Perpanjangan STNK kendaraan dinas eselon II.

Salah satu realisasi belanja pada kelompok Belanja Pemeliharaan adalah Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.211.577.288,00. Nilai realisasi ini merupakan belanja asuransi dengan nomor polis 201.235.110.22.00049/000/000 untk 564 gedung dan bangunan milik BPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Selama Tahun Anggaran 2022, BPS telah melakukan klaim kerugian atas gedung dan bangunan yang tertimpa musibah gempa bumi pada tiga satuan kerja dengan total estimasi kerugian sebesar Rp912.923.800,00. Potensi penerimaan klaim kerugian atas asuransi aset BMN yang akan diterima pada Tahun Anggaran 2023 terinci sebagai berikut.

Tabel 39
Estimasi Klaim Kerugian Asuransi BMN TA 2023

No.	Objek Asuransi	Kejadian	Surat Laporan Kejadian	Estimasi Kerugian (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bangunan Gedung Permanen berupa kantor BPS Kab. Karang Asem (4010101001 NUP2)	Gempa Bumi tanggal 13 Desember 2022	Surat Kepala Biro Umum (a.n Pengguna Barang BPS) nomor B-1311/02520/PL.900/12/2022 tanggal 23 Desember 2022	120.000.000
2	Bangunan Gedung Permanen berupa kantor BPS Kab. Cianjur (4010101001 NUP2)	Gempa Bumi tanggal 21 November 2022	Surat Koordinator Fungsi Inventarisasi, Penyimpanan, dan Penghapusan (a.n Pengguna Barang BPS) nomor B-1078/02520/PL.900/11/2022 tanggal 23 November 2022	720.423.800
3	Bangunan Gedung Permanen berupa kantor BPS Kab. Tapanuli Utara	Gempa Bumi tanggal 25 Oktober 2022	Surat Kepala Biro Umum (a.n Pengguna Barang BPS) nomor B-1054/02520/PL.900/11/2022 tanggal 15 November 2022	72.500.000
Jumlah				912.923.800

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 40
Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.601.537.272	30.974.338.670	3.627.198.602	11,71
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	332.869.629	358.979.604	(26.109.975)	(7,27)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.211.577.288	690.071.570	1.521.505.718	220,49
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	101.462.100	(101.462.100)	(100,00)
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	737.633.696	441.137.667	296.496.029	67,21
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.744.352.179	88.722.548.709	11.021.803.470	12,42
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	738.824.497	1.347.094.926	(608.270.429)	(45,15)
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	575.000	8.614.400	(8.039.400)	(93,33)
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	1.007.500	5.621.500	(4.614.000)	(82,08)
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	619.250.000	(619.250.000)	(100,00)
Jumlah		138.368.377.061	123.269.119.146	15.099.257.915	12,25

Realisasi Belanja Pemeliharaan selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp138.368.377.061,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp123.269.119.146,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.099.257.915,00 atau sebesar 12,25 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan antara lain adanya kegiatan *Long Form* SP2020 Tahun 2022 dan Gladi Bersih ST2023, serta kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 41
Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.601.537.272	0	0	34.601.537.272
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	332.869.629	0	0	332.869.629

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.211.577.288	0	0	2.211.577.288
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	737.633.696	0	0	737.633.696
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	99.744.352.179	0	0	99.744.352.179
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	738.824.497	0	0	738.824.497
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	575.000	0	0	575.000
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	1.007.500	0	0	1.007.500
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
Jumlah		138.368.377.061	0	0	138.368.377.061

Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp1.722.510.742.113,00

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.722.510.742.113,00 atau 95,33 persen dari pagu yang senilai Rp1.806.947.652.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 42
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	219.589.007.000	198.253.530.781	527.315.119	197.726.215.662	90,04
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	241.144.631.000	218.370.352.778	219.901.000	218.150.451.778	90,46
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	954.238.909.000	925.983.775.183	285.049.368	925.698.725.815	97,01
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	10.950.000	10.944.000	0	10.944.000	99,95
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	391.964.155.000	381.720.970.593	796.565.735	380.924.404.858	97,18
Jumlah		1.806.947.652.000	1.724.339.573.335	1.828.831.222	1.722.510.742.113	95,33

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri secara *netto* selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.722.510.742.113,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi

Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp1.724.339.573.335,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.828.831.222,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan biasa, pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota, pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota. Pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan pengembalian belanja paket *meeting* luar kota salah satunya adalah merupakan denda untuk petugas yang tidak melaksanakan pencacahan. Satuan kerja dan besaran nilainya tersaji sebagai berikut.

Tabel 43
Pengembalian Realisasi Belanja Paket *Meeting* Petugas yang Tidak Melaksanakan Pencacahan

No.	Satuan Kerja	Nilai Pengembalian (Rp)	Akun Pengembalian
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPS Kab. Kuningan	2.940.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
2	BPS Kab. Majalengka	1.472.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
3	BPS Kab. Semarang	1.150.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
4	BPS Kota Semarang	1.260.687	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
5	BPS Kota Tegal	1.110.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
6	BPS Kab. Pati	1.180.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
7	BPS Kab. Kudus	3.400.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
8	BPS Kab. Magelang	3.282.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
9	BPS Kab. Sukoharjo	4.570.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
10	BPS Kab. Banyuwangi	1.665.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
11	BPS Kota Medan	6.350.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
12	BPS Kab. Samosir	1.230.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
13	BPS Kota Padang	5.690.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
14	BPS Kota Payakumbuh	1.150.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
15	BPS Kota Jambi	1.345.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
16	BPS Kab. Lahat	1.255.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
17	BPS Kota Singkawang	3.080.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
18	BPS Kota Palangkaraya	11.399.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
19	BPS Kota Banjarmasin	1.408.300	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
20	BPS Kab. Kotabaru	1.290.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
21	BPS Kota Banjar Baru	2.773.762	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
22	BPS Kota Bitung	3.450.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota

No.	Satuan Kerja	Nilai Pengembalian (Rp)	Akun Pengembalian
(1)	(2)	(3)	(4)
23	BPS Kab. Luwu Utara	635.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
24	BPS Kab. Luwu Timur	430.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
25	BPS Kab. Maluku Tengah	1.580.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
26	BPS Kab. Buleleng	1.760.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
27	BPS Kota Kupang	1.430.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
28	BPS Kota Bengkulu	2.746.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Dalam Kota
29	BPS Kab. Pasaman	4.473.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
30	BPS Kab. Kampar	1.332.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
31	BPS Kota Metro	1.230.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
32	BPS Kab. Balangan	1.802.500	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
33	BPS Kab. Kendal	3.541.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
34	BPS Kota Magelang	1.178.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
35	BPS Kab. Temanggung	2.200.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
36	BPS Kab. Karanganyar	4.835.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
37	BPS Kab. Klaten	2.762.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
38	BPS Kab. Gorontalo Utara	1.820.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
39	BPS Kab. Lombok Barat	1.512.000	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket <i>Meeting</i> Luar Kota
Jumlah		97.717.249	

Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) digunakan untuk pembayaran perjalanan pemulangan pegawai yang pensiun dan pesangon ke tempat menetap, pindah pegawai, *Leadership Training* Reformasi Birokrasi, Penganugerahan IST 2022, Supervisi Pengolahan, Supervisi Pendataan Lapangan, LF SP2020, Pengolahan Pemuktahiran MFD dan MBS, Pengawasan Ukom Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi, Tim *Advance Big Data*, Penyusunan Proyeksi Penduduk, Statistik Sektoral, Pendampingan Kunker DPR RI, Penataan Arsip, Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, SLHI, Supervisi Perangkat TI, Pemulangan Jenazah, Supervisi Desa Cantik, Pembinaan Penulisan Publikasi Analisis Provinsi, Sakernas, IDI dan MSA, Supervisi *Capacity Building* Proyeksi Penduduk, Pemeriksaan Hibah Tanah di BPS Kab. Sekadau, dan kegiatan Regsosek 2022 yaitu Puspitek Litbang BRIN, Pendataan Awal dan Pengolahan, Pelaksanaan Pendataan, Supervisi Pendataan Lapangan, *Ground Check* PMT, Monitoring Kualitas, Tindak Lanjut MK, Pendampingan Administrasi, Menarasikan EMIK, Supervisi Inda, dan Rakorda, transport lokal, perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan konsinyasi SAE, Penyusunan Klasifikasi Urban Rural, Penyusunan Direktori, MSA, Hasil Survei e-Commerce,

Pembahasan Persiapan Pemuktahiran Wilkerstat dan Sinkronisasi *Master File* Desa dan Peta, Persiapan Pelatihan Innas Susenas MKP 2022, Podes, dan Penyusunan PDB Konsumsi Rumah Tangga; FGD Tahunan, Pemanfaatan Data ADM Survei Industri 2023, Harmonisasi Perban Penyusunan Neraca Ekonomi Lingkungan, Uji Publik Perban Penyusunan Neraca Ekonomi Lingkungan, Hasil Survei PAW, Finalisasi Penyusunan Tata Kelola Big Data, Peningkatan Kualitas Pengisian Dokumen PEB, Hasil Survei PAW, BPS dan Badan Legislasi (DPR) Dalam Rangka Penyusunan RUU Statistik, Penyusunan Big Data Analisis dan Pengembangan Statistik, dan Komisi XI DPRI dengan BPS; *Fullboard/Workshop/Sosialisasi* Rakor Proses Kenaikan Pangkat Periode April 2022, Pencatuman Gelar Akademik, Peninjauan Masa Kerja dan Pindah Antar Instansi, Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Data Inflasi Inti, Pembahasan Pengolahan Data Kajian Transmisi Harga Produsen ke Pedagang Besar, Evaluasi Hasil Survei e-Commerce, Pembahasan Tindak Lanjut Sensus BMN Tahun 2021 dan Harmonisasi Perka BPS di Lingkungan Biro Umum, Pembahasan Publikasi Statistik Tanaman Pangan, Pembahasan Fase Proses Kegiatan EWS, Evaluasi Pengolahan MPD Wisnus, Pembinaan Statistik Kementerian dan Lembaga, Pembahasan Evaluasi Kegiatan DSI 2022, Pembentukan BPS Kab/Kota Baru, Pengembangan IPTIK, Pembahasan Rancangan Peraturan BPS dan Informasi PMSE, Rule Validasi dan Pembangunan Aplikasi, *Assessment* IPS Untuk Supervisor dan Operator Kementerian dan Lembaga, Pembahasan Peraturan Keuangan BPS Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Optimalisasi Pelayanan Publik, Pembahasan Satu Data Kriminal, Integrasi Data Tenaga Kerja Pariwisata Dalam Penyempurnaan *Tourism Satellite Account*, Standar Penilaian Kinerja Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Pembahasan Distribusi Pendapatan dan Kekayaan Rumah Tangga Indonesia, Identifikasi Data APBN APBD dalam Penyempurnaan TSA, Koordinasi Pengumpulan Metadata Statistik, Implementasi Metode CVM dan Kontribusi *Subject Matter*, Pembahasan NTP Formula Baru, Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha Tahunan dan Triwulan, Persiapan Penilaian Sistem Merit oleh KSAN, Koordinasi Persiapan Uji Coba SDPI, Koordinasi Pengembangan Simpeg/SIMSDM, Finalisasi Materi, Aplikasi dan Peraturan BPS Tentang EPSS, Persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pembahasan Petunjuk Teknis Penilaian Jabatan Fungsional Statistisi dan Asisten Statistisi, Penyusunan TSA Dalam SUT, Pembahasan Pengembangan Infrastruktur Statistik Terintegrasi Pendukung Kegiatan Statistik, Pembahasan Statistik Kehutanan, Penyusunan Soal Seleksi Kompetensi Bidang P3K Statistisi dan Pranata Komputer, Perencanaan dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran BPS 2022, Pembahasan Metodologi dan Pengambilan Sampel Keuangan Pemerintah, Konsolidasi PDRB per Kapita Untuk Indikator DAU, Pembahasan Rule Validasi dan Konsistensi Program Pengolahan Kuesioner LF SP2020, *Initial Meeting* Tim Reformasi Birokrasi, Pembahasan Data Dasar Proyeksi, Penyusunan Standar Data Statistik dan Statistik Ekonomi Terintegrasi, Finalisasi Laporan Susenas Laporan Tahun 2021, Pembahasan Finalisasi Uku, Finalisasi Aplikasi Regsosek 2022, Persiapan Regsosek 2022, Pendataan Awal Regsosek 2022, Intama Pengolahan Regsosek 2022, Rakor Penyiapan Infrastruktur Pendukung Pendataan Awal Regsosek 2022, Evaluasi Hasil Pendataan Regsosek 2022, Hasil Analisis Geospasial Hasil SP2020, Evaluasi Pelaksanaan LF SP2020, Finalisasi Laporan Hasil Pelaksanaan SP2020, Pembahasan Persiapan Diseminasi LF SP2020, Finalisasi Laporan Hasil Pelaksanaan SP2020, Pembahasan Rule Validasi dan Konsistensi Program Pengolahan Kuesioner LF SP2020, Persiapan Metadata ST2023, Konsolidasi Kerangka Geospasial ST2023,



Evaluasi Hasil Pengolahan ST2023 Gladi Bersih dengan *Subject Matter, Kick Off* ST2023, Finalisasi Instrumen ST2023, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan Pelatihan Petugas Monitoring Kualitas Pendataan Awal Regsosek 2022, Pelatihan Innas Pengolahan Regsosek 2022, Rapat Teknis Regsosek 2022, *Workshop* Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022, Analisis Tematik Kependudukan dan Evaluasi Penjaminan Kualitas, *Change Management*, Evaluasi KTIP, *International Conference on Big Data for Official Statistics*, Rapat Teknis BPS, Rapat Evaluasi Indikator Hasil Long Form SP2020, Rekonsiliasi Survei PAW, Supervisi Kegiatan IHPB, Finalisasi Laporan Hasil Kajian Transmisi Harga dari Produsen ke Pedagang Besar Beberapa Komoditas Terpilih, Evaluasi Pelaksanaan SBH 2022, EWS, Rekonsiliasi IDI. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 44
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	197.726.215.662	103.888.183.163	93.838.032.499	90,33
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	218.150.451.778	75.543.389.269	142.607.062.509	188,78
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	925.698.725.815	94.891.240.094	830.807.485.721	875,54
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	10.944.000	0	10.944.000	100,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	380.924.404.858	34.710.383.898	346.214.020.960	997,44
Jumlah		1.722.510.742.113	309.033.196.424	1.413.477.545.689	457,39

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.722.510.742.113,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp309.033.196.424,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.413.477.545.689,00 atau sebesar 457,39 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021. Kenaikan ini disebabkan antara lain adanya kegiatan Long Form SP2020 Tahun 2022 dan Gladi Bersih ST2023, serta kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022.

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNPB yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 45
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	196.316.315.811	1.409.899.851	0	197.726.215.662
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	218.021.721.778	128.730.000	0	218.150.451.778
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	924.190.021.815	1.508.704.000	0	925.698.725.815
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	10.944.000	0	0	10.944.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	378.868.669.418	2.055.735.440	0	380.924.404.858
Jumlah		1.717.407.672.822	5.103.069.291	0	1.722.510.742.113

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp322.788.445,00

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Perjalanan Luar Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) untuk Tahun Anggaran 2022 adalah Rp322.788.445,00 atau 69,53 persen dari pagu yang senilai Rp464.223.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut.

Tabel 46
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	464.223.000	322.788.445	0	322.788.445	69,53
Jumlah		464.223.000	322.788.445	0	322.788.445	69,53

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri secara netto selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp322.788.445,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp322.788.445,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka mengikuti kegiatan Pertemuan *Task Team on International Trade Statistics of The UN Committee of Expert on Business and Trade Statistics* pada tanggal 31 Mei s/d 3 Juni 2022 di Lisbon, Portugal.022 pada tanggal 28 s/d 30 Juni 2022 di Estonia, menghadiri *Technical Meeting on Human Mobility and Mobile Big Data/Mobile Tartu* pada tanggal 26 Juni s/d 2 Juli 2022 di Tartu, Estonia, menghadiri *The United Nations Frame Work of International*

Migration Statistics pada tanggal 19 s/d 24 Juni 2022 di Rabat, Maroko, dan kegiatan Eighteenth Session of the Governing Council of the Statistical Institute for Asia and the Pacific (SIAPP) yang diadakan pada tanggal 12 s/d 15 Desember 2022 di Chiba Jepang.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama Tahun Anggaran 2022 adalah Rp322.788.445,00. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 47
Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2022 dan 2021

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	322.788.445	68.222.278	254.566.167	373,14
Jumlah		322.788.445	68.222.278	254.566.167	373,14

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp322.788.445,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp68.222.278,00. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp254.566.167,00 atau sebesar 373,14 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Tahun Anggaran 2021.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 48
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	322.788.445	0	0	322.788.445
Jumlah		322.788.445	0	0	322.788.445

Belanja Modal
Rp168.338.905.192,00

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi belanja modal selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp168.338.905.192,00 atau 97,40 persen dari pagunya sebesar Rp172.839.756.000,00. Secara rinci, pagu dan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 49
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5311	Belanja Modal Tanah	9.576.088.000	9.384.417.445	0	9.384.417.445	98,00
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.895.881.000	81.045.656.891	0	81.045.656.891	97,77
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.349.787.000	75.601.148.433	92.317.577	75.508.830.856	97,62
5361	Belanja Modal Lainnya	3.018.000.000	2.400.000.000	0	2.400.000.000	79,52
Jumlah		172.839.756.000	168.431.222.769	92.317.577	168.338.905.192	97,40

Dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, selama Tahun Anggaran 2022, BPS tidak mengalokasikan pagu belanja modal untuk kegiatan ini. Perbandingan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 50
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5311	Belanja Modal Tanah	9.384.417.445	17.065.134.110	(7.680.716.665)	(45,01)
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.045.656.891	156.012.933.866	(74.967.276.975)	(48,05)
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.601.148.433	46.466.177.621	29.134.970.812	62,70
5361	Belanja Modal Lainnya	2.400.000.000	8.693.122.195	(6.293.122.195)	(72,39)
Realisasi Belanja Bruto		168.431.222.769	228.237.367.792	(59.806.145.023)	(26,20)
Pengembalian Belanja		92.317.577	8.569.476	83.748.101	977,28
Realisasi Belanja Netto		168.338.905.192	228.228.798.316	(59.889.893.124)	(26,24)

Realisasi belanja modal selama Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar Rp59.889.893.124,00 atau 26,24 persen dibandingkan dengan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp228.228.798.316,00.

Belanja Modal Tanah **B.2.3.1 Belanja Modal Tanah**
Rp9.384.417.445,00

Realisasi belanja modal tanah selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp9.384.417.445,00 dan Rp17.065.134.110,00. Realisasi belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 45,01 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2021.

Secara rinci realisasi belanja modal tanah berdasarkan lokasi dan peruntukannya disajikan sebagai berikut.

Tabel 51
Realisasi Belanja Modal Tanah Berdasarkan Lokasi dan Peruntukannya

No.	Lokasi	Nilai Realisasi (Rp)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPS Kab. Majalengka	4.251.389.650	Belanja Modal Tanah

No.	Lokasi	Nilai Realisasi (Rp)	Peruntukan
(1)	(2)	(3)	(4)
		36.600.000	Pembayaran Honor Tim Tanah
2	BPS Kab. Blitar	3.927.189.650	Belanja Modal Tanah
		10.574.431	Perjalanan Pengadaan Tanah
3	BPS Kab. Sekadau	598.013.900	Belanja Modal Tanah
4	BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara	196.000.000	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	BPS Kota Banjar	183.325.000	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
6	BPS Kab. Seruyan	181.324.814	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
Jumlah		9.384.417.445	

Perbandingan realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
531111	Belanja Modal Tanah	8.776.593.200	16.034.191.810	(7.257.598.610)	(45,26)
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	40.700.000	(40.700.000)	0,00
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	36.600.000	47.300.000	(10.700.000)	(22,62)
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	494.000	(494.000)	0,00
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	560.649.814	919.182.300	(358.532.486)	(39,01)
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	10.574.431	23.266.000	(12.691.569)	(54,55)
Realisasi Belanja Bruto		9.384.417.445	17.065.134.110	(7.680.716.665)	(45,01)
Pengembalian Belanja		0	0	0	0
Realisasi Belanja Netto		9.384.417.445	17.065.134.110	(7.680.716.665)	(45,01)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp81.045.656.891,00

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp81.045.656.891,00 dan Rp156.010.769.643,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 48,05 persen dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2021. Belanja modal Peralatan dan Mesin diantaranya dipergunakan untuk pengadaan mesin kabut disinfektan dan revitalisasi kabel tata udara gedung 5.

Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 53
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.735.694.991	155.359.257.416	(74.623.562.425)	(48,03)
532112	Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	171.083.000	(171.083.000)	(100,00)
532119	BM PM- Penanganan Pandemi COVID-19	0	366.793.450	(366.793.450)	(100,00)
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	309.961.900	115.800.000	194.161.900	167,67
Realisasi Belanja Bruto		81.045.656.891	156.012.933.866	(74.967.276.975)	(48,05)
Pengembalian Belanja		0	2.164.223	(2.164.223)	(100,00)
Realisasi Belanja Netto		81.045.656.891	156.010.769.643	(74.965.112.752)	(48,05)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp75.508.830.856,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp75.508.830.856,00 dan Rp46.459.772.368,00. Realisasi belanja modal gedung dan bangunan selama Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 62,53 persen dibandingkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan di Tahun Anggaran 2021. Belanja Modal Gedung dan Bangunan diantaranya digunakan untuk pembayaran biaya perencana renovasi gedung 3 BPS dan biaya MK revitalisasi ME Tahap 2. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2022 dan 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.366.488.997	37.060.201.597	9.306.287.400	25,11
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	32.002.400	22.391.000	9.611.400	42,93
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	668.411.821	390.686.000	277.725.821	71,09
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	217.097.721	35.853.257	181.244.464	505,52
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	28.317.147.494	8.957.045.767	19.360.101.727	216,14
Realisasi Belanja Bruto		75.601.148.433	46.466.177.621	29.134.970.812	62,70
Pengembalian Belanja		92.317.577	6.405.253	85.912.324	1.341,28
Realisasi Belanja Netto		75.508.830.856	46.459.772.368	29.049.058.488	62,53

Belanja Modal Lainnya
Rp2.400.000.000,00

B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi belanja modal lainnya selama Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp2.400.000.000,00 dan Rp8.693.122.195,00. Realisasi belanja modal lainnya selama Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 72,39 persen dibandingkan realisasi belanja modal lainnya Tahun Anggaran 2021. Belanja Modal Lainnya Tahun Anggaran 2022 berupa pembayaran untuk pengadaan perangkat lunak untuk Visualisasi dan Analisis Data berdasarkan SP nomor PPIS/2907.RA.N.010/18.11.01/SP/2022 tanggal 18 November 2022 dengan BAST nomor PPIS/2907.RA.N.010/19.12.02/BAST/2022 tanggal 19 Desember 2022.

Realisasi belanja modal lainnya Tahun Anggaran 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 55
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
TA 2022 dan 2021

Kode	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya	2.400.000.000	8.693.122.195	(6.293.122.195)	(72,39)
	Realisasi Belanja Bruto	2.400.000.000	8.693.122.195	(6.293.122.195)	(72,39)
	Pengembalian Belanja	0	0	0	0
	Realisasi Belanja Netto	2.400.000.000	8.693.122.195	(6.293.122.195)	(72,39)

Belanja Dalam Rangka
COVID-19
Rp42.705.443.297,00

B.2.3.5 Belanja Dalam Rangka COVID-19

Realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 selama Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp42.705.443.297,00, atau 93,83 persen dari pagu yang nilainya sebesar Rp45.511.553.000,00. Rincian belanja dalam rangka Covid-19 Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 56
Pagu dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Covid-19

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Realisasi Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5211	Belanja Barang Operasional	3.712.726.000	3.305.924.744	0	3.305.924.744	89,04
5212	Belanja Barang Non Operasional	34.781.304.000	32.967.237.533	270.000	32.966.967.533	94,78
5218	Belanja Barang Persediaan	964.684.000	818.328.858	0	818.328.858	84,83
5221	Belanja Jasa	6.041.889.000	5.603.634.662	356.500	5.603.278.162	92,74
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.950.000	10.944.000	0	10.944.000	99,95
	Jumlah	45.511.553.000	42.706.069.797	626.500	42.705.443.297	93,83

Proporsi realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak Covid-19 Tahun Anggaran 2022 terdiri dari belanja operasional sebesar 89,04 persen, belanja non operasional sebesar 94,78 persen, belanja barang persediaan sebesar 84,83 persen,

belanja jasa sebesar 92,74 persen, dan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 99,95 persen.

Belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2022 menggunakan akun khusus belanja penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan pada surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan nomor S-369/PB/2022 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19. Realisasi Belanja Barang untuk Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk biaya *rapid antigen* dan *swab* PCR, pengadaan alat pelindung diri, konsumsi panitia vaksinator dan masker untuk pegawai gol. I dan II, CPNS, PPNPN, dan Satpam.

Rincian realisasi belanja akun khusus Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 57
Realisasi Belanja Akun Khusus Penanganan Pandemi Covid-19

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	3.712.726.000	3.305.924.744	0	3.305.924.744	89,04
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	34.781.304.000	32.967.237.533	270.000	32.966.967.533	94,78
521841	Belanja Barang Persediaan-Penanganan Pandemi COVID-19	964.684.000	818.328.858	0	818.328.858	84,83
522192	Belanja Barang Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	6.041.889.000	5.603.634.662	356.500	5.603.278.162	92,74
524115	Belanja Perjalanan Dinas-Penanganan Pandemi COVID-19	10.950.000	10.944.000	0	10.944.000	99,95
Jumlah		45.511.553.000	42.706.069.797	626.500	42.705.443.297	93,83

Terdapat pengembalian belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp626.500,00 selama Tahun Anggaran 2022 berupa pengembalian belanja barang non operasional-penanganan pandemi Covid-19 dan pengembalian belanja jasa-penanganan pandemi Covid-19.

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset Lancar

Rp171.876.193.389,00

C.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp171.876.193.389,00 dan Rp101.289.651.655,00 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Neraca BPS per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji pada tabel 58.

Tabel 58
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	89.371.020	210.032.717
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	57.062.405	13.468.139
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	58.277.265.214	29.156.790.398
4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	682.163.135	0
5	Piutang Bukan Pajak	1.632.771.160	1.966.650.019
6	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(8.163.699)	(54.254.687)
7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	19.199.873.303	25.091.395.301
8	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(17.578.304.708)	(20.256.262.658)
9	Persediaan	109.524.155.559	65.161.832.426
	Jumlah	171.876.193.389	101.289.651.655

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp89.371.020,00

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp89.371.020,00 dan Rp210.032.717,00, yang merupakan saldo kas/bank yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan). Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam nilai rupiah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2022 berupa dana sisa UP dan TUP yang belum disetorkan ke Kas Negara. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk masing-masing wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 59
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	0	36.000	(36.000)
2	Jawa Timur	32.179.070	0	32.179.070
3	Sumatera Barat	0	13.239.886	(13.239.886)
4	Papua	57.191.950	0	57.191.950
5	Papua Barat	0	196.756.831	(196.756.831)
Jumlah		89.371.020	210.032.717	(120.661.697)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 senilai Rp89.371.020,00 telah disetorkan ke Kas Negara pada tahun 2023. Rincian setoran Kas di Bendahara Pengeluaran adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 60
Rincian Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama Wilayah	Nama Satker	Tgl Setor	NTPN/Billing	Penyetoran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	9 Januari 2023	55B952CNR187F7C2	20.500
		Kota Madiun	6 Januari 2023	2A3555UDQBHLS6TA	8.721.338
		Kota Madiun	6 Januari 2023	4C02A0JSRC3CEL3K	23.437.232
2	Papua	Kab. Peg. Bintang	10 Januari 2023	EA39F520AGVDIGTV	32.540.000
		Kab. Supiori	13 Januari 2023	E7E6245IQMD3S7VQ	10.901.950
		Kab. Supiori	13 Januari 2023	AD4E08JM9R911QON	14.435.000
Jumlah					90.056.020

Terdapat kelebihan penyetoran sebesar Rp685.000,00 atas pengembalian UP/TUP pada BPS Kabupaten Supiori dengan nomor NTPN E7E6245IQMD3S7VQ yang disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp10.901.950,00 yang seharusnya disetor sebesar Rp10.216.950,00. Atas kelebihan penyetoran tersebut sedang dilakukan perbaikan ke KPPN Biak.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp57.062.405,00*

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp57.062.405,00 dan Rp13.468.139,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo yang merupakan saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai serta belanja hibah yang masih dalam bentuk SPJ yang belum disahkan oleh KPPN. Kas Lainnya dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam nilai rupiah.

Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 61
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	10.200	0	10.200
2	Settama	32.825.000	0	32.825.000
3	Jawa Tengah	0	1.785.422	(1.785.422)
4	Jawa Timur	170.000	0	170.000
5	Sumatera Utara	0	2.679.888	(2.679.888)
6	Riau	15.055.860	144.362	14.911.498
7	Jambi	0	592.150	(592.150)
8	Kalimantan Barat	1.494.100	2.256.150	(762.050)
9	Sulawesi Selatan	7.507.245	0	7.507.245
10	Maluku	0	5.414.186	(5.414.186)
11	Bali	0	2.500	(2.500)
12	Nusa Tenggara Timur	0	593.481	(593.481)
Jumlah		57.062.405	13.468.139	43.594.266

Mutasi transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah/satker disajikan sebagai berikut.

Tabel 62
Rincian Mutasi Transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Wilayah/Satker	31-Des-21 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	0	10.200	0	10.200
2	Settama	0	32.825.000	0	32.825.000
3	Jawa Tengah	1.785.422	0	1.785.422	0
4	Jawa Timur	0	170.000	0	170.000
5	Sumatera Utara	2.679.888	0	2.679.888	0
6	Riau	144.362	15.055.860	144.362	15.055.860
7	Jambi	592.150	0	592.150	0
8	Kalimantan Barat	2.256.150	1.494.100	2.256.150	1.494.100
9	Sulawesi Selatan	0	7.507.245	0	7.507.245
10	Maluku	5.414.186	0	5.414.186	0
11	Bali	2.500	0	2.500	0
12	Nusa Tenggara Timur	593.481	0	593.481	0
Jumlah		13.468.139	57.062.405	13.468.139	57.062.405

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2022 merupakan saldo kas yang berasal dari transaksi-transaksi sebagai berikut:

	Settama	Daerah	Total
1. Realisasi Belanja pegawai yang belum dibayarkan ke pihak ketiga	Rp 0	1.612.545	1.612.545

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2022

2. Realisasi Belanja barang yang belum dibayarkan ke pihak ketiga	Rp	0	582.000	582.000
3. Kelebihan realisasi belanja barang yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	0	6.976.800	6.976.800
4. Sisa dana kerjasama kegiatan yang belum disetorkan ke Kas negara	Rp.	32.825.000	0	32.825.000
5. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	0	15.066.060	15.066.060
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp	32.825.000	24.237.405	57.062.405

Penjelasan transaksi untuk saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Kas yang berupa belanja pegawai yang belum dibayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp1.612.545,00 yang terdapat pada wilayah BPS Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp912.100,00 dan wilayah BPS Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp700.445,00.
2. Kas yang berupa belanja barang yang belum dibayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp582.000,00 yang terdapat pada wilayah BPS Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kas yang berupa kelebihan realisasi belanja barang yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp6.976.800,00 yang terdapat pada wilayah BPS Provinsi Jawa Timur sebesar Rp170.000,00 dan wilayah BPS Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp6.806.800,00.
4. Kas yang berupa sisa dana kerjasama kegiatan antara BPS dan BRIN yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp32.825.000,00 terdapat pada satker Settama.
5. Saldo kas yang berupa pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.066.060,00 terdapat pada wilayah BPS Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.200,00 dan wilayah BPS Provinsi Riau sebesar Rp15.055.860,00.

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Rp58.277.265.214,00

C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp58.277.265.214,00 dan Rp29.156.790.398,00. Saldo ini merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh Pemerintah. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh BPS, namun BPS telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Daftar saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 63
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	11.126.694.994	9.376.911.972	1.749.783.022
2	Pusdiklat BPS	11.778.992.052	17.632.951.725	(5.853.959.673)
3	Polstat STIS	61.280.588	0	61.280.588
4	DKI Jakarta	933.488.117	0	933.488.117
5	Jawa Barat	9.801.766.510	109.090.477	9.692.676.033
6	Jawa Tengah	2.614.473.694	138.719.222	2.475.754.472
7	DI Yogyakarta	90.983.165	19.138.693	71.844.472
8	Jawa Timur	3.674.161.053	30.897.112	3.643.263.941
9	Aceh	151.725.510	1.013.122	150.712.388
10	Sumatera Utara	1.397.593.218	230.120.566	1.167.472.652
11	Sumatera Barat	235.570.410	658.233	234.912.177
12	Riau	276.316.664	45.784.720	230.531.944
13	Jambi	123.348.234	24.138.494	99.209.740
14	Sumatera Selatan	652.916.314	65.902.569	587.013.745
15	Lampung	416.404.812	70.447.786	345.957.026
16	Kalimantan Barat	318.178.481	87.040.507	231.137.974
17	Kalimantan Tengah	213.022.371	2.183.608	210.838.763
18	Kalimantan Selatan	131.266.470	195.564	131.070.906
19	Kalimantan Timur	177.728.804	65.734.875	111.993.929
20	Sulawesi Utara	11.122.031	84.882.364	(73.760.333)
21	Sulawesi Tengah	84.715.650	10.434.496	74.281.154
22	Sulawesi Selatan	272.899.129	0	272.899.129
23	Sulawesi Tenggara	0	10.393.325	(10.393.325)
24	Maluku	293.294.129	169.976.713	123.317.416
25	Bali	118.683.146	96.658.418	22.024.728
26	Nusa Tenggara Barat	307.095.873	67.976.404	239.119.469
27	Nusa Tenggara Timur	182.993.549	53.452	182.940.097
28	Papua	740.947.451	247.638.018	493.309.433
29	Bengkulu	122.075.696	0	122.075.696
30	Maluku Utara	184.000.760	55.566.721	128.434.039
31	Banten	647.636.490	61.888.941	585.747.549
32	Bangka Belitung	49.801.542	4.423.146	45.378.396
33	Gorontalo	1.895.860	0	1.895.860
34	Kepulauan Riau	380.087.755	4.196.250	375.891.505
35	Papua Barat	107.753.219	79.141.316	28.611.903
36	Sulawesi Barat	73.779.168	1.179.534	72.599.634
37	Kalimantan Utara	10.522.572.305	361.452.055	10.161.120.250
Jumlah		58.277.265.214	29.156.790.398	29.120.474.816

Rincian mutasi Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 64
Rincian Mutasi Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

No.	Uraian	31-Des-21 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Belanja Sewa	2.013.820.063	23.758.467.468	2.108.950.447	23.663.337.084
2	Belanja listrik Prabayar	77.663.510	163.894.364	77.055.275	164.502.599
3	Belanja langganan internet dan <i>software</i> (zoom, dll)	10.149.717	232.629.175	10.149.717	232.629.175
4	Belanja barang non operasional berupa beasiswa tugas belajar	17.632.951.725	11.778.992.052	17.632.951.725	11.778.992.052
5	Belanja Jasa Lainnya – Baliho ST2023, Iklan Kegiatan SBH	3.861.000	16.348.387	3.861.000	16.348.387
6	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi Covid-19	276.351.913	17.676.625	278.558.547	15.469.991
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.141.992.470	2.529.305.613	9.141.992.470	2.529.305.613
8	Penyesuaian atas Perpanjangan Pekerjaan Proyek Pemerintah Yang Melewati Akhir Tahun	0	19.876.680.313	0	19.876.680.313
Jumlah		29.156.790.398	58.373.993.997	29.253.519.181	58.277.265.214

Pendapatan Yang Masih harus Diterima Rp682.163.135,00

C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp682.163.135,00 dan Rp0,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan PNPB yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca.

Daftar saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 65
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Timur	804.331	0	804.331
2	Riau	1.710.957	0	1.710.957
3	Sulawesi Tenggara	230.547	0	230.547
4	Kalimantan Utara	679.417.300	0	679.417.300
Jumlah		682.163.135	0	682.163.135

Penjelasan rincian wilayah/daerah untuk saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang masih harus diterima berupa sewa ruangan/bangunan oleh pihak ketiga sebesar Rp2.688.651,00 yang belum disetor ke Kas Negara terdapat pada wilayah BPS

Provinsi Jawa Timur sebesar Rp804.331,00, wilayah BPS Provinsi Riau sebesar Rp1.710.957,00, dan wilayah BPS Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp230.547,00.

2. Pendapatan yang masih harus diterima berupa denda keterlambatan pekerjaan pemerintah yang dikenakan kepada pihak ketiga sebesar Rp679.417.300,00 yang belum disetor ke Kas Negara terdapat pada wilayah BPS Provinsi Kalimantan Utara.

***Piutang Bukan Pajak* C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak**

Rp1.632.771.160,00

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.632.771.160,00 dan Rp1.966.650.019,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Pada Tahun 2022, Pemerintah membuat kebijakan yang berkenaan dengan pengenaan keringanan utang bagi debitur atau disebut *crash program* (CP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 11/PMK.06/2022 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN dengan Mekanisme *Crash Program* (CP) Tahun 2022. Keringanan utang dimaksud dalam CP merupakan pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh Penanggung Utang dengan diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya. Ketentuan pemberian keringanan utang pokok adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.
2. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.
3. Tambahan keringanan utang pokok, jika dilakukan pelunasan dalam waktu:
 - a. sampai dengan Juni 2022, sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan;
 - b. pada Juli sampai dengan September 2022, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; atau
 - c. pada Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2022, sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Saldo Piutang Bukan Pajak yang dikelola oleh BPS yang diikutkan pada CP adalah piutang yang berasal dari PT Paku Bangun Jaya yang terdapat pada BPS Provinsi Kepulauan Riau. Penyelesaian piutang melalui CP ini didasari pada penawaran kepada debitur oleh Kanwil DJKN Provinsi Kep. Riau pada surat S-133/KNL.0304/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Pemberitahuan *Crash Program* Penyelesaian Utang. Penawaran tersebut ditanggapi oleh PT Paku Bangun Jaya sebagai debitur dengan menyampaikan permohonan mengikuti *Crash Program* penyelesaian piutang dengan mengajukan surat permohonan tanggal 20 Juli 2022. Kanwil DJKN Provinsi Kep. Riau kemudian menyetujui pengajuan keringanan

penyelesaian piutang tersebut dengan dasar surat nomor S-735/KNL.0304/2022 tanggal 25 Juli 2022. Atas persetujuan keringanan tersebut, PT Paku Bangun Jaya hanya melunasi piutang sebesar Rp12.500.505,00 yang disetor ke Kas Negara pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan NTPN 7E71761QUHJAF021. Pelunasan ini disetujui dengan didasari dikeluarkannya surat Pernyataan Piutang Negara Lunas dengan nomor SPPNL-002/PUPNC.31.00/2022 tanggal 27 Juli 2022.

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. Daftar saldo Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 66
Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	1.424.157.190	1.858.012.221	(433.855.031)
2	Jawa Barat	62.149.967	9.155.091	52.994.876
3	Jawa Tengah	18.660.432	5.053.760	13.606.672
4	DI Yogyakarta	0	724.000	(724.000)
5	Jawa Timur	2.821.406	6.639.330	(3.817.924)
6	Aceh	94.123.930	0	94.123.930
7	Sumatera Utara	4.248.000	559.680	3.688.320
8	Sumatera Barat	11.505.565	9.657.004	1.848.561
9	Sumatera Selatan	8.585.568	25.191.240	(16.605.672)
10	Kalimantan Barat	0	255.450	(255.450)
11	Sulawesi Utara	1.534.570	613.272	921.298
12	Sulawesi Tengah	0	1.388.150	(1.388.150)
13	Sulawesi Tenggara	185.000	0	185.000
14	Maluku	0	73.805	(73.805)
15	Bali	93.768	41.000	52.768
16	Nusa Tenggara Barat	1.638.684	0	1.638.684
17	Nusa Tenggara Timur	750.000	2.877.853	(2.127.853)
18	Bengkulu	0	13.505	(13.505)
19	Maluku Utara	2.317.080	0	2.317.080
20	Kepulauan Bangka Belitung	0	1.750.000	(1.750.000)
21	Kepulauan Riau	0	44.644.658	(44.644.658)
	Jumlah	1.632.771.160	1.966.650.019	(333.878.859)

Sedangkan mutasi Piutang Bukan Pajak pada 31 Desember 2022 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 67
Mutasi Piutang Bukan Pajak

No.	Wilayah/Satker	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo 31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	1.858.012.221	1.417.649.112	1.851.504.143	1.424.157.190
2	Jawa Barat	9.155.091	62.149.967	9.155.091	62.149.967
3	Jawa Tengah	5.053.760	18.660.432	5.053.760	18.660.432
4	DI Yogyakarta	724.000	0	724.000	0
5	Jawa Timur	6.639.330	2.991.406	6.809.330	2.821.406
6	Aceh	0	94.123.930	0	94.123.930
7	Sumatera Utara	559.680	4.248.000	559.680	4.248.000

No.	Wilayah/Satker	Saldo 31-Des-21 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo 31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Sumatera Barat	9.657.004	11.505.565	9.657.004	11.505.565
9	Sumatera Selatan	25.191.240	8.585.568	25.191.240	8.585.568
10	Kalimantan Barat	255.450	0	255.450	0
11	Sulawesi Utara	613.272	1.534.570	613.272	1.534.570
12	Sulawesi Tengah	1.388.150	0	1.388.150	0
13	Sulawesi Tenggara	0	185.000	0	185.000
14	Maluku	73.805	0	73.805	0
15	Bali	41.000	93.768	41.000	93.768
16	Nusa Tenggara Barat	0	1.638.684	0	1.638.684
17	Nusa Tenggara Timur	2.877.853	750.000	2.877.853	750.000
18	Bengkulu	13.505	0	13.505	0
19	Maluku Utara	0	2.317.080	0	2.317.080
20	Kepulauan Bangka Belitung	1.750.000	0	1.750.000	0
21	Kepulauan Riau	44.644.658	0	44.644.658	0
Jumlah		1.966.650.019	1.626.433.082	1.960.311.941	1.632.771.160

Rincian mutasi transaksi Piutang Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

No.	Uraian	31-Des-21 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Piutang sewa Gedung dan bangunan	7.808.361	8.692.119	7.808.361	8.692.119
2	Piutang atas denda	272.094.125	416.154.768	272.094.125	416.154.768
3	Piutang Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	6.000.000	2.950.450	3.049.550
4	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja pegawai	99.201.578	148.476.338	90.711.050	156.966.866
5	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja barang	220.412.348	1.047.109.857	219.614.348	1.047.907.857
6	Piutang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	1.367.133.607	0	1.367.133.607	0
Jumlah		1.966.650.019	1.626.433.082	1.960.311.941	1.632.771.160

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Rp8.163.699,00

C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.163.699,00 dan Rp54.254.687,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 69
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker

Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Settama	Lancar	1.424.157.190	7.120.637
Jawa Barat	Lancar	62.149.967	310.751
Jawa Tengah	Lancar	18.660.432	93.303
Jawa Timur	Lancar	2.821.406	14.107
Aceh	Lancar	94.123.930	470.619
Sumatera Utara	Lancar	4.248.000	21.240
Sumatera Barat	Lancar	11.505.565	57.528
Sumatera Selatan	Lancar	8.585.568	42.928
Sulawesi Utara	Lancar	1.534.570	7.673
Sulawesi Tenggara	Lancar	185.000	925
Bali	Lancar	93.768	469
Nusa Tenggara Barat	Lancar	1.638.684	8.184
Nusa Tenggara Timur	Lancar	750.000	3.750
Maluku Utara	Lancar	2.317.080	11.585
Jumlah		1.632.771.160	8.163.699

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp19.199.873.303,00*

C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.199.873.303,00 dan Rp25.091.395.301,00. Saldo ini merupakan nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2022 dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang dibukukan ke dalam Neraca merupakan bagian dari Aset Lancar, sedangkan sisanya dibukukan ke dalam Tagihan TP/TGR pada Piutang Jangka Panjang. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 merupakan saldo dari debitor yang dikenakan TP/TGR melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan (SKP) serta reklasifikasi saldo akun Aset Lain-Lain yang menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yaitu debitor TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL.

Berdasarkan proses penetapan Piutang TP/TGR, debitor dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Debitor yang telah ditetapkan nilai kerugian negaranya berdasarkan SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan.
2. Debitor yang sedang dalam proses pembebanan kerugian negaranya yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR).
3. Debitor yang nilai piutangnya telah dilimpahkan ke KPKNL.

Saldo piutang atas kerugian negara yang masuk sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang sebesar Rp19.199.873.303,00 merupakan nilai yang status debiturnya telah ditetapkan sebagai TGR.

Daftar saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 70
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Settama	19.199.873.303	25.091.395.301	(5.891.521.998)
Jumlah		19.199.873.303	25.091.395.301	(5.891.521.998)

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dijelaskan secara terinci dalam kategori jenis kasus dalam tabel berikut ini.

Tabel 71
Rincian Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar	19.086.070.800
2	Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2	15.360.000
3	Kehilangan/Kecurian Barang Inventaris Kantor	7.200.000
4	TGR - Laporan Hasil Pemeriksaan	66.242.503
5	Pengunduran Diri CPNS	25.000.000
Jumlah		19.199.873.303

Rincian debitur Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp17.578.304.708,00*

C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp17.578.304.708,00 dan Rp20.256.262.658,00 atas ketidakterttagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 72
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Kualitas Piutang	Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	Lancar	100.973.125	0,5	504.866
		Kurang Lancar	1.690.111.484	10	169.011.148
		Diragukan	0	50	0
		Macet	17.408.788.694	100	17.408.788.694
Jumlah			19.199.873.303		17.578.304.708

Persediaan

Rp109.524.155.559,00

C.1.1.9 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp109.524.155.559,00 dan Rp65.161.832.426,00. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp108.851.108.691,00 diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan yang dilengkapi dengan Berita Acara *Stock Opname*, terdiri dari:

Tabel 73
Rincian Persediaan

Kode	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117111	Barang Konsumsi	108.545.344.361	64.321.171.730	44.224.172.631
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	978.811.198	840.660.696	138.150.502
Jumlah		109.524.155.559	65.161.832.426	44.362.323.133

Perhitungan mutasi nilai Persediaan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Persediaan (akhir), 31 Desember 2022	Rp	109.524.155.559
Persediaan (awal), 31 Desember 2021	Rp	65.161.832.426
Kenaikan/(Penurunan) Mutasi	Rp	44.362.323.133

Rincian Mutasi**Mutasi Tambah**

Pembelian	Rp	159.528.700.241
Saldo Awal	Rp	53.527.420
Transfer Masuk	Rp	91.901.264.131
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.660.226.074
Reklasifikasi Dari Aset	Rp	182.191.350
Perolehan Lainnya	Rp	94.579.914
Hasil Opname Fisik	Rp	3.723.774.835
Koreksi Nilai Tambah	Rp	918.600.173
Koreksi Kuantitas Tambah	Rp	16.700.815.781
Koreksi Transfer Keluar Online	Rp	1.207.765.901
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	277.971.445.820

Mutasi (Kurang)

Habis Pakai	(Rp)	118.336.053.917)
-------------	------	------------------

Transfer Keluar	(Rp	93.136.738.136)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp	3.542.760.074)	
Reklasifikasi ke Aset	(Rp	38.162.750)	
Keluar Lainnya	(Rp	32.270.131)	
Koreksi Nilai Kurang	(Rp	16.467.363.731)	
Koreksi Kuantitas Kurang	(Rp	1.287.068.846)	
Rusak	(Rp	327.023.236)	
Usang	(Rp	441.681.866)	
Jumlah Mutasi (Kurang)	(Rp	233.609.122.687)	
Jumlah Rincian Mutasi			Rp 44.362.323.133

Rincian saldo Persediaan per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 74
Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Settama	6.368.880.016
2	0199	Pusdiklat	561.477.444
3	0199	Polstat STIS	175.904.906
4	0100	DKI Jakarta	2.153.765.718
5	0200	Jawa Barat	9.862.906.948
6	0300	Jawa Tengah	11.456.278.686
7	0400	DI Yogyakarta	1.774.180.117
8	0500	Jawa Timur	12.632.978.056
9	0600	Aceh	3.626.750.868
10	0700	Sumatera Utara	4.758.160.689
11	0800	Sumatera Barat	3.188.539.734
12	0900	Riau	2.107.525.615
13	1000	Jambi	1.350.610.779
14	1100	Sumatera Selatan	3.400.357.543
15	1200	Lampung	4.329.023.679
16	1300	Kalimantan Barat	2.722.831.768
17	1400	Kalimantan Tengah	2.090.608.878
18	1500	Kalimantan Selatan	2.672.467.749
19	1600	Kalimantan Timur	1.541.825.339
20	1700	Sulawesi Utara	1.595.553.753
21	1800	Sulawesi Tengah	1.694.492.033
22	1900	Sulawesi Selatan	4.247.704.105
23	2000	Sulawesi Tenggara	1.555.663.802
24	2100	Maluku	1.921.129.246
25	2200	Bali	1.123.437.177
26	2300	Nusa Tenggara Barat	1.512.067.292
27	2400	Nusa Tenggara Timur	2.390.528.463
28	2500	Papua	3.872.118.495
29	2600	Bengkulu	1.235.261.482
30	2800	Maluku Utara	1.046.200.771
31	2900	Banten	3.893.793.202
32	3000	Bangka Belitung	929.356.495
33	3100	Gorontalo	1.041.773.243
34	3200	Kepulauan Riau	823.691.860
35	3300	Papua Barat	2.266.202.192
36	3400	Sulawesi Barat	712.840.067

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)
37	3500	Kalimantan Utara	887.267.349
Jumlah			109.524.155.559

Terdapat jenis barang yang merupakan persediaan dengan kondisi rusak dan usang. Rincian atas barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang dalam kondisi rusak sebesar Rp328.213.358,00.
2. Barang dalam kondisi usang sebesar Rp299.820.079,00.

Jumlah dan Jenis barang persediaan secara terinci dilampirkan pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Rp5.182.226.391.992,00

C.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.182.226.391.992,00 dan Rp5.215.196.751.679,00. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 75
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.157.600.032.227	3.073.624.926.935	83.975.105.292
Peralatan & Mesin	2.150.345.084.810	2.213.461.424.348	(63.116.339.538)
Gedung & Bangunan	1.977.048.451.023	1.965.638.353.882	11.410.097.141
Aset Tetap Lainnya	42.782.106.086	51.799.058.979	(9.016.952.893)
KDP	28.019.577.278	1.201.034.560	26.818.542.718
Jumlah	7.355.795.251.424	7.305.724.798.704	50.070.452.720
Akumulasi Penyusutan	(2.173.568.859.432)	(2.090.528.047.025)	(83.040.812.407)
Nilai Buku Aset Tetap	5.182.226.391.992	5.215.196.751.679	(32.970.359.687)

Posisi Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 76
Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2022

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.157.600.032.227	3.157.600.032.227	0
Peralatan & Mesin	2.150.345.084.810	2.150.345.084.810	0

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
Gedung & Bangunan	1.977.048.451.023	1.977.048.451.023	0
Aset Tetap Lainnya	42.782.106.086	42.782.106.086	0
KDP	28.019.577.278	28.019.577.278	0
Jumlah	7.355.795.251.424	7.355.795.251.424	0
Akumulasi Penyusutan	(2.173.568.859.432)	(2.173.568.859.432)	0
Nilai Buku Aset Tetap	5.182.226.391.992	5.182.226.391.992	0

Tidak terdapat perbedaan nilai Aset Tetap yang tercatat per 31 Desember 2022 antara Neraca pada Laporan Keuangan dengan Neraca pada Laporan Barang Milik Negara (BMN).

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan nilai masing-masing jenis Aset Tetap dikarenakan adanya mutasi serta hubungannya dengan belanja modal, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian selanjutnya.

Tanah

Rp3.157.600.032.227,00

C.1.2.1 Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2022 adalah Rp3.157.600.032.227,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp3.073.624.926.935,00. Secara ringkas perubahan saldo Tanah disajikan sebagai berikut.

Tabel 77
Perubahan Saldo Tanah Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.157.600.032.227	3.073.624.926.935	83.975.105.292
Jumlah	3.157.600.032.227	3.073.624.926.935	83.975.105.292

Perhitungan mutasi nilai Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	3.073.624.926.935
Penambahan		
Saldo Awal	Rp	66.398.766.000
Pembelian	Rp	717.098.120
Hibah Masuk	Rp	14.265.635.847
Transfer Masuk	Rp	5.802.137.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	2.732.926.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	183.325.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP		8.823.767.631
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	829.604.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	181.324.814
Perolehan lainnya	Rp	146.500.000
Jumlah Penambah	Rp	100.081.084.412
Pengurangan		
Transfer Keluar	(Rp)	7.347.037.000
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	2.730.424.120
Hibah Keluar	(Rp)	4.424.531.000
Koreksi Pencatatan	(Rp)	475.278.720

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	299.104.280)		
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(Rp	829.604.000)		
Jumlah Pengurangan	(Rp	16.105.979.120		
Kenaikan/(Pengurangan)			Rp	83.975.105.292
Saldo per 31 Desember 2022			Rp	3.157.600.032.227

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2022 secara netto sebesar Rp9.384.417.445,00. Realisasi belanja modal tanah yang mempengaruhi mutasi nilai Tanah, alokasi penggunaan belanja modal tanah, dan perolehan tanah yang menggunakan selain belanja modal tanah dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp	717.098.120
Penyelesaian Pengembangan Dengan KDP		Rp	8.823.767.631
Pengembangan Melalui KDP		Rp	181.324.814
Pengembangan Nilai Aset (langsung)		Rp	183.325.000
Jumlah realisasi belanja modal tanah pada mutasi nilai Tanah		Rp	9.905.515.565
Penambahan:			
Realisasi Belanja Modal Tanah yang menghasilkan aset KDP	Rp	192.000.000	
Jumlah Penambahan	Rp	192.000.000	
Pengurangan:			
Realisasi belanja sewa yang dicatat sebagai penambah nilai tanah	(Rp	137.000.000)	
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menambah nilai tanah	(Rp	576.098.120)	
Jumlah Pengurangan	(Rp	713.098.120)	
Lebih/(Kurang)			(Rp 521.098.120)
Realisasi belanja modal tanah (neto)			Rp 9.384.417.445

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya realisasi belanja modal tanah yang membentuk KDP sebelum menjadi aset definitif sebesar Rp192.000.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya penambahan nilai pada aset tanah yang menggunakan belanja sewa sebesar Rp137.000.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya penambahan nilai pada aset tanah yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp576.098.120,00.

Selain berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan mutasi tanah juga berasal dari transaksi antar entitas seperti tranfer dan hibah. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa transaksi mutasi tanah baik dari pembelian, penambahan melalui KDP, penambahan langsung, maupun transaksi antar entitas yang dirinci per wilayah.

- Penambahan mutasi tanah berupa pembelian yang menggunakan akun selain Belanja Modal Tanah anggaran tahun 2022 terdapat pada lima wilayah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 78
Rincian Transaksi Pembelian Tanah per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sumatera Utara	BPS Kab. Nias Selatan	46.902.400
2	Sulawesi Utara	BPS Kab. Bolaang Mongondow Utara	4.000.000
3	Maluku	BPS Kab. Maluku Barat Daya	137.000.000
4	Papua	BPS Kab. Asmat	79.200.000
5	Bengkulu	BPS Kab. Bengkulu Tengah	449.995.720
Jumlah			717.098.120

Dari kelima satuan kerja diatas, tidak semua transaksi pembelian menambah aset tanah, hanya Rp200.295.720,00 yang menambah aset tanah. Nilai ini terdapat pada satker BPS Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu berupa pengadaan rumah dinas dengan nilai pembelian Rp449.995.720,00 yang terdiri dari aset tanah yang bernilai Rp200.295.720,00 dan Gedung bangunan Rp249.700.000,00.

- Beberapa satuan kerja pada Badan Pusat Statistik mendapatkan hibah tanah dari organisasi/pemerintah daerah yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 79
Rincian Hibah Masuk Tanah per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	Pemberi Hibah	31-Des-22 (Rp)	31-Des-22 (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Tengah	BPS Kab. Rembang	Pemkab. Rembang	103.790.720	1.012
		BPS Kab. Karanganyar	Pemkab. Karanganyar	16.250.000	332
		BPS Kab. Demak	Pemkab. Demak	6.059.652	1.214
2	Jawa Timur	BPS Prov. Jawa Timur	Pemprov. Jawa Timur	13.830.000.000	912
		BPS Kab. Trenggalek	Pemkab. Trenggalek	255.078.720	1.704
3	Sumatera Utara	BPS Kab. Samosir	Pemkab. Samosir	15.792.000	1.000
4	Sumatera Barat	BPS Kab. Pasaman Barat	Pemkab. Pasaman Barat	38.664.755	1.535
Jumlah				14.265.635.847	7.709

Selain itu, terdapat satker pada Badan Pusat Statistik yang memberikan hibah berupa tanah kepada organisasi/pemerintah daerah dengan rincian:

Tabel 80
Rincian Hibah Keluar Tanah per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	Penerima Hibah	31-Des-22 (Rp)	31-Des-22 (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Tengah	BPS Kab. Karanganyar	Pemkab. Karanganyar	829.604.000	252
2	Sumatera Barat	BPS Kab. Pasaman Barat	Pemkab. Pasaman Barat	918.500.000	16.029
3	Sumatera Selatan	BPS Kota Lubuk Linggau	Pemkot. Lubuk Linggau	829.947.000	600
4	Kalimantan Barat	BPS Kab. Kapuas	Pemkab. Kapuas	1.195.428.000	520
5	Gorontalo	BPS Kab. Gorontalo	Pemkab. Gorontalo	651.052.000	750
Jumlah				4.424.531.000	18.151

- Rincian satker yang melakukan transaksi transfer aset tanah ke satker atau Kementerian Negara/Lembaga tersaji sebagai berikut:

Tabel 81
Rincian Transfer Tanah

No.	Satker Pengirim	Aset		Satker Penerima
		31-Des-22 (Rp)	31-Des-22 (m ²)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPS Prov. DI Yogyakarta	1.544.900.000	700	Badan Pengawas Pemilihan Umum
2	BPS Kota Pontianak	948.235.000	452	BPS Prov. Kalimantan Barat
3	BPS Kota Makasar	4.853.902.000	2.630	BPS Prov. Sulawesi Selatan
Jumlah		7.347.037.000	3.782	

Berdasarkan daftar mutasi aset tanah terdapat selisih antara transfer masuk dan transfer keluar sebesar Rp1.544.900.000,00. Hal ini disebabkan BPS Provinsi DI Yogyakarta melakukan transfer aset tetap tanah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- Penambahan nilai aset tanah melalui KDP menggunakan belanja modal tanah dirinci sebagai berikut:

Tabel 82
Rincian Penambahan Tanah melalui KDP

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-22 (Rp)	31-Des-22 (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Barat	BPS Kab. Majalengka	4.287.989.650	1.410
2	Jawa Timur	BPS Kab. Blitar	3.937.764.081	1.600
3	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Seruyan	181.324.814	0
4	Kalimantan Barat	BPS Kab. Sekadau	598.013.900	1.500
Jumlah			9.005.092.441	4.510

- Penambahan nilai aset tanah melalui pengembangan langsung dilakukan oleh BPS Kota Banjar sebesar Rp183.325.000,00 namun tidak menambah luas tanah karena pengembangan ini dilakukan dengan pengurukan dan pematangan tanah.
- Penambahan nilai aset tanah melalui perolehan lainnya berasal dari BPS Kabupaten Trenggalek sebesar Rp146.500.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab. Trenggalek.

Terdapat permasalahan pada Aset Tetap Tanah seperti tanah dalam sengketa, tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan, tanah yang dikuasai pihak lain, tanah yang dihentikan penggunaannya, pencatatan ganda, dan status Aset Tetap Tanah pinjam pakai. Rincian penjelasan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut disajikan secara terinci dalam Lampiran Pendukung Laporan Keuangan I berupa Catatan Atas Laporan BMN BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 pada laporan keuangan ini.

Peralatan dan Mesin **C.1.2.2 Peralatan dan Mesin**

Rp2.150.345.084.810,00

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah Rp2.150.345.084.810,00 dan per 31 Desember 2021 adalah Rp2.213.461.424.348,00. Secara ringkas perubahan saldo Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut.

Tabel 83
Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	2.150.345.084.810	2.213.461.424.348	(63.116.339.538)
Jumlah	2.150.345.084.810	2.213.461.424.348	(63.116.339.538)

Nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah Rp301.576.166.264,00. Nilai Buku Peralatan dan Mesin diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.848.768.918.546,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	2.213.461.424.348
Penambahan			
Saldo Awal	Rp	7.151.305.815	
Pembelian	Rp	80.157.347.104	
Transfer Masuk	Rp	48.738.380.515	
Reklasifikasi Masuk	Rp	8.660.328.506	
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	8.550.000	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	295.427.525	
Koreksi Susulan	Rp	30	
Pembatalan Penghapusan	Rp	530.277.572	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	1.551.399.329	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	2.671.203.695	
Perolehan Lainnya	Rp	318.974.372	
Jumlah Penambahan	Rp	150.083.194.463	
Pengurangan			
Transfer Keluar	(Rp)	48.738.380.515	
Penghapusan	(Rp)	192.334.728	
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	8.650.528.506	
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp)	9.000.000	
Koreksi Pencatatan	(Rp)	1.036.821.247	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	6.517.403.064	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	142.152.718.697	
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Tetap Lainnya (Manual)	(Rp)	72.000	
Koreksi atas Hasil Sensus BMN (Manual)	(Rp)	5.902.275.244	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	213.199.534.001	
Kenaikan/(Pengurangan)		(Rp)	63.116.339.538
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	2.150.345.084.810	
Akumulasi Penyusutan	(Rp)	1.848.768.918.546	
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	301.576.166.264	

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2022 secara netto sebesar Rp81.045.656.891,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin, alokasi penggunaan belanja modal peralatan dan mesin, dan perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang menggunakan selain belanja modal peralatan dan mesin dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp	80.157.347.104
Pengembangan Nilai Aset	Rp	1.551.399.329
Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada mutasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	81.708.746.433
Penambahan:		
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan Gedung dan Bangunan	Rp	56.875.000
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.338.000
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan irigasi	Rp	41.250.000
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan barang persediaan	Rp	4.200.000
Realisasi belanja peralatan mesin hasil reklasifikasi	Rp	11.048.446
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset	Rp	185.268.680
Jumlah Penambahan	Rp	299.980.126
Pengurangan:		
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	882.416.268
Realisasi belanja keperluan perkantoran untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	3.000.000
Realisasi belanja ekstrakomptabel peralatan mesin untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	17.603.400
Realisasi belanja persediaan konsumsi untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	9.000.000
Realisasi belanja modal peralatan mesin yang direklasifikasi keluar	(Rp)	15.050.000
Kelebihan pembelian peralatan dan mesin	(Rp)	36.000.000
Jumlah Pengurangan	(Rp)	963.069.668
Lebih/(Kurang)	(Rp)	663.089.542
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin (neto)	Rp	81.045.656.891

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan disebabkan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp56.875.000,00;
- Penambahan disebabkan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.338.000,00;
- Penambahan disebabkan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi perolehan aset irigasi sebesar Rp41.250.000,00;
- Penambahan disebabkan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi barang persediaan sebesar Rp4.200.000,00;
- Penambahan disebabkan adanya reklasifikasi belanja pemeliharaan peralatan dan mesin menjadi belanja modal peralatan mesin yang menghasilkan aset peralatan mesin sebesar

Rp11.048.446,00;

- Penambahan disebabkan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang tidak dapat dikapitalisasi menjadi aset sebesar Rp185.268.680,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menjadi perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp882.416.268,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja keperluan perkantoran yang menjadi perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.000.000,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja peralatan dan mesin-Ekstrakomptabel yang menjadi perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.603.400,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja persediaan barang konsumsi yang menjadi perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.000.0000,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya reklasifikasi belanja modal peralatan dan mesin menjadi belanja peralatan mesin ekstrakomptabel yang tidak membentuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp15.050.000,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya kelebihan pencatatan pembelian peralatan mesin sebesar Rp36.000.000,00.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp19.626.862.132,00. Rincian Peralatan dan Mesin yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

*Gedung dan Bangunan
Rp1.977.048.451.023,00*

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah Rp1.977.048.451.023,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp1.965.638.353.882,00. Secara ringkas perubahan saldo Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 84
Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gedung dan Bangunan	1.977.048.451.023	1.965.638.353.882	11.410.097.141
Jumlah	1.977.048.451.023	1.965.638.353.882	11.410.097.141

Nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah Rp1.652.492.111.847,00. Nilai Buku Gedung dan Bangunan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp324.556.339.176,00.

Perhitungan mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp 1.965.638.353.882
Penambahan		
Saldo Awal	Rp	60.915.341
Pembelian	Rp	4.733.120.822
Transfer Masuk	Rp	727.648.000
Hibah Masuk	Rp	590.120.457
Reklasifikasi Masuk	Rp	35.665.161.692
Pengembangan Melalui KDP	Rp	10.664.538.402
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	1.709.941.197
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	735.520.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	13.609.439.493
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	443.889.740
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	8.266.427.682
Koreksi Susulan	Rp	970.125.140
Perolehan Lainnya	Rp	358.278.720
Jumlah Penambahan	Rp	78.535.126.686
Pengurangan		
Transfer Keluar	(Rp)	1.761.509.000
Hibah Keluar	(Rp)	9.654.522.000
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	35.667.663.572
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	3.777.056.000
Koreksi Pencatatan	(Rp)	13.391.175.363
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	2.355.933.136
Koreksi Susulan	(Rp)	517.170.474
Jumlah Pengurangan	(Rp)	67.125.029.545
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp 11.410.097.141
Saldo per 31 Desember 2022		Rp 1.977.048.451.023
Akumulasi Penyusutan		(Rp 324.556.339.176)
Nilai Buku per 31 Desember 2022		Rp 1.652.492.111.847

Transaksi penambahan dan pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan yang berasal dari pembelian dan transaksi antar entitas seperti transfer dan hibah dan kategori aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut:

- Transaksi pembelian Gedung dan Bangunan yang menambah mutasi terdiri dari:

Tabel 85
Rincian Pembelian Gedung dan Bangunan per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pusat	Pusdiklat	120.623.700
2	Jawa Barat	BPS Kab. Garut	182.000.000
3	Sumatera Utara	BPS Kab. Labuhan Batu	274.976.160

		BPS Kota Binjai	28.464.000
		BPS Kota Gunung Sitoli	178.062.800
4	Sumatera Barat	BPS Kab. Kepulauan Mentawai	35.520.000
5	Riau	BPS Kab. Siak	56.875.000
6	Sumatera Selatan	BPS Kota Prabumulih	170.071.678
7	Kalimantan Selatan	BPS Kab. Tapin	72.800.000
8	Sulawesi Tenggara	BPS Kab. Kolaka Utara	2.552.725.552
		BPS Kab. Muna	283.684.200
		BPS Kab. Kolaka Timur	130.421.000
9	Papua	BPS Kab. Asmat	379.651.000
10	Banten	BPS Kota Serang	127.695.732
11	Papua Barat	BPS Kab. Sorong	60.130.000
12	Sulawesi Barat	BPS Kab. Mamuju	79.420.000
Jumlah			4.733.120.822

- Beberapa satuan kerja pada Badan Pusat Statistik mendapatkan hibah Gedung dan Bangunan dari organisasi/pemerintah daerah/perorangan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 86
Rincian Hibah Masuk Gedung dan Bangunan per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	Pemberi Hibah	31-Des-22 (Rp)	Jenis Aset Gedung dan Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Tengah	BPS Kab. Temanggung	Pemkab. Temanggung	185.827.750	Pagar permanen
		BPS Kab. Karanganyar	Pemkab. Karanganyar	181.378.237	- Bangunan Gedung kantor - Rumah Negara Golongan III Tipe A
2	Sumatera Barat	BPS Kab. Pasaman Barat	Pemkab. Pasaman Barat	50.000.000	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen
3	Kalimantan Selatan	BPS Prov. Kalimantan Selatan	Fachri Ubadiyah	97.558.300	Bangunan Gedung Tempat Ibadah permanen
4	Kepulauan Riau	BPS Kota Batam	Suparyani	75.356.170	Bangunan Gedung Tempat Ibadah permanen
Jumlah				590.120.457	

- Selain itu, terdapat satker pada Badan Pusat Statistik yang memberikan hibah berupa Gedung dan Bangunan kepada organisasi/pemerintah daerah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 87
Rincian Hibah Keluar Gedung dan Bangunan per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	Penerima Hibah	31-Des-22 (Rp)	Jenis Aset Gedung dan Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jawa Barat	BPS Kab. Sukabumi	Pemkab. Sukabumi	261.166.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen
		BPS Kota Banjar	Pemkot. Banjar	219.770.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
2	Jawa Tengah	BPS Kab. Karanganyar	Pemkab. Karanganyar	109.257.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen
3	Jawa Timur	BPS Kab. Magetan	Pemkab. Magetan	335.927.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen

4	Aceh	BPS Kota Sabang	Pemkot. Sabang	43.310.000	Pagar Permanen
5	Sumatera Barat	BPS Kab. Pasaman Barat	Pemkab. Pasaman Barat	891.826.000	-Bangunan Gedung Kantor Permanen -Pagar Permanen
6	Sumatera Selatan	BPS Kab. Lubuk Linggau	Pemkab. Lubuklinggau	1.835.467.000	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
7	Kalimantan Tengah	BPS Kab. Kapuas	Pemkab. Kapuas	21.591.000	Bangunan Gudang Tertutup Permanen
8	Kalimantan Selatan	BPS Kota Banjar Baru	Pemkot. Banjar Baru	746.083.000	-Bangunan Gedung Kantor Permanen -Pagar Permanen
9	Nusa Tenggara Barat	BPS Prov. Nusa Tenggara Barat	Pemprov. NTB	4.978.925.000	-Bangunan Gedung Kantor Permanen -Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
10	Gorontalo	BPS Kab. Gorontalo	Pemkab. Gorontalo	211.200.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen
Jumlah				9.654.522.000	

- Rincian satker yang melakukan transfer Aset Gedung dan Bangunan ke satker atau Kementerian Negara/Lembaga tersaji dalam tabel dibawah:

Tabel 88
Rincian Transfer Gedung dan Bangunan

No.	Satker Pengirim	Jumlah (Rp)	Jenis Aset	Satker Penerima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPS Prov. DI Yogyakarta	1.033.861.000	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	Badan Pengawas Pemilihan Umum
2	BPS Prov. Lampung	15.920.000	Pagar Permanen	BPS Kota Bandar Lampung
3	BPS Prov. Kalimantan Barat	192.271.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	BPS Kota Pontianak
4	BPS Kota Pontianak	62.760.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	BPS Prov. Kalimantan Barat
5	BPS Kota Makasar	456.697.000	Pagar Permanen	BPS Prov. Sulawesi Selatan
Jumlah		1.761.509.000		

- Secara keseluruhan nilai transfer masuk dan transfer keluar untuk aset Gedung dan Bangunan pada Badan Pusat Statistik terdapat selisih sebesar Rp1.033.861.000,00. Hal ini disebabkan BPS Provinsi DI Yogyakarta mentransfer gedung kantor kepada satker di luar Badan Pusat Statistik yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Selain nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, terdapat Gedung dan Bangunan yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp723.401.555,00. Rincian Gedung dan Bangunan yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Rp42.782.106.086,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.782.106.086,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp51.799.058.979,00. Adapun aset pada BPS yang masuk pada kelompok Aset Tetap Lainnya adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 89
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	837.000.000	837.000.000	0
2	Aset Tetap Lainnya:			
	a. Bahan perpustakaan	41.701.004.376	50.717.957.269	(9.016.952.893)
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	244.101.710	244.101.710	0
	Jumlah	42.782.106.086	51.799.058.979	(9.016.952.893)

Aset Tetap Dalam Renovasi menurut Buletin Teknis Nomor 09 mengenai Akuntansi Aset Tetap merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki oleh BPS berupa Aset Tetap Tanah Dalam Renovasi pada BPS Kabupaten Sarmi sebesar Rp837.000.000.

Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah Rp42.538.504.376,00. Nilai Buku Aset Tetap Lainnya diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp243.601.710,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini. Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	51.799.058.979
Penambahan			
Saldo Awal	Rp	12.823.753	
Pembelian	Rp	222.974.000	
Reklasifikasi Masuk	Rp	27.911.536	
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	10.581.900	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	43.020.802	
Pembatalan Penghapusan	Rp	5.579.902	
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	3.081.600	
Perolehan Lainnya	Rp	1.351.993.526	
Reklasifikasi dari Peralatan Mesin ke Aset Tetap Lainnya	Rp	72.000	
Jumlah Penambahan	Rp	1.678.039.019	
Pengurangan			
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	9.988.189.098	
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	27.911.536	
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp)	145.672.160	
Koreksi Manual	(Rp)	21.080	
Koreksi Pencatatan	(Rp)	141.877.435	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	12.279.300	
Koreksi atas Hasil Sensus BMN (Manual)	(Rp)	379.041.303	

Jumlah Pengurangan Kenaikan/(Pengurangan)	<u>(Rp 10.694.991.912)</u>	<u>(Rp 9.016.952.893)</u>
Saldo per 31 Desember 2022		Rp 42.782.106.086
Akumulasi Penyusutan		<u>(Rp 243.601.710)</u>
Nilai Buku per 31 Desember 2022		<u>Rp 42.538.504.376</u>

Realisasi belanja modal lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 untuk belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00. Realisasi belanja modal lainnya yang mempengaruhi mutasi nilai Aset Tetap Lainnya, dan perolehan Aset Tetap Lainnya yang menggunakan selain belanja modal lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp 222.974.000
Jumlah realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada perubahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan		Rp 222.974.000
Penambahan:		
Jumlah Penambahan	<u>Rp 0</u>	
Pengurangan:		
Realisasi belanja modal gedung Bangunan untuk perolehan ATL	(Rp 93.663.000)	
Realisasi belanja modal peralatan mesin untuk perolehan ATL	(Rp 1.338.000)	
Realisasi belanja barang untuk perolehan ATL	(Rp 5.708.000)	
Realisasi belanja persediaan untuk perolehan ATL	(Rp 122.265.000)	
Jumlah Pengurangan	<u>(Rp 222.974.000)</u>	
Lebih/(Kurang)		<u>(Rp 222.974.000)</u>
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya		<u>Rp 0</u>

Penjelasan perhitungan penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Tidak terdapat penambahan belanja modal lainnya yang menghasilkan Aset Tetap Lainnya;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menjadi perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp93.663.000,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang menjadi perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.338.000,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja barang yang menjadi perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.708.000,00;
- Pengurangan dikarenakan adanya realisasi belanja persediaan yang menjadi perolehan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp122.265.000,00;

Selain nilai Aset Tetap Lainnya tersebut di atas, terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp17.231.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp28.019.577.278,00

C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah Rp28.019.577.278,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp1.201.034.560,00. Nilai KDP per 31 Desember 2022 per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 90
Rincian KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	13.931.816.778	0	13.931.816.778
2	Jawa Tengah	2.631.812.525	94.476.000	2.537.336.525
3	Sumatera Utara	2.032.226.511	0	2.032.226.511
4	Sumatera Selatan	1.815.261.416	0	1.815.261.416
5	Sulawesi Utara	227.500.000	31.500.000	196.000.000
6	Nusa Tenggara Barat	0	64.560.000	(64.560.000)
7	Bengkulu	65.900.000	0	65.900.000
8	Papua Barat	222.657.962	0	222.657.962
9	Sulawesi Barat	0	122.260.000	(122.260.000)
10	Kalimantan Utara	7.092.402.086	888.238.560	6.204.163.526
	Jumlah	28.019.577.278	1.201.034.560	26.818.542.718

Mutasi perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	1.201.034.560
Penambahan			
Pengembangan KDP	Rp	52.402.221.018	
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp	5.526.541.088	
Perolehan Lainnya KDP	Rp	3.047.521.406	
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	3.685.936.237	
Jumlah Penambahan	Rp	64.662.219.749	
Pengurangan			
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(Rp)	399.286.977	
Koreksi Pencatatan KDP	(Rp)	4.107.840.713	
Pengembangan Melalui KDP	(Rp)	10.845.863.216	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(Rp)	22.490.686.125	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	37.843.677.031	
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp	26.818.542.718
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	28.019.577.278

Penjelasan terinci terkait dengan KDP lebih lanjut tersaji dalam Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Rp2.173.568.859.432,00

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah Rp2.173.568.859.432,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah

Rp2.090.528.047.025,00. Secara ringkas perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 91
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.848.768.918.546	1.822.476.496.532	26.292.422.014
Gedung dan Bangunan	324.556.339.176	267.837.216.496	56.719.122.680
Aset Tetap Lainnya	243.601.710	214.333.997	29.267.713
Jumlah	2.173.568.859.432	2.090.528.047.025	83.040.812.407

Rincian Nilai Buku Aset Tetap yang berasal dari nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 92
Rincian Nilai Buku Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	2.150.345.084.810	1.848.768.918.546	301.576.166.264
2	Gedung dan Bangunan	1.977.048.451.023	324.556.339.176	1.652.492.111.847
3	Aset Tetap Lainnya	42.782.106.086	243.601.710	42.538.504.376
	Jumlah	4.170.175.641.919	2.173.568.859.432	1.996.606.782.487

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	2.090.528.047.025
Penambahan		
Saldo Awal	Rp	813.374.376
Pembelian	Rp	105.982.118
Transfer Masuk	Rp	4.542.898.454
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.695.089.987
Hibah Masuk	Rp	500.000
Penyusutan Aset Tetap	Rp	228.948.517.626
Perolehan Lainnya	Rp	2.675.567
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	2.807.797.121
Pengembangan Melalui KDP	Rp	470.338
Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Rp	31.284.221
Pembatalan Penghapusan	Rp	530.277.572
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	445.444.364
Koreksi Susulan	Rp	14.198
Koreksi Manual	Rp	29.120.700
Jumlah Penambahan	Rp	241.953.446.642
Pengurangan		
Penghapusan	(Rp)	192.334.728)
Transfer Keluar	(Rp)	4.660.382.655)

Hibah Keluar	(Rp	1.911.981.603)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp	3.678.775.721)	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	640.901.070)	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	141.454.082.271)	
Take in Sensus BMN	(Rp	5.872.087.584)	
Koreksi Pencatatan	(Rp	502.088.603)	
Jumlah Pengurangan	(Rp	158.912.634.235)	
Kenaikan/(Pengurangan)			Rp 83.040.812.407
Saldo per 31 Desember 2022			Rp 2.173.568.859.432

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 93
Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN
Per 31 Desember 2022

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.848.768.918.546	1.848.768.918.546	0
Gedung dan Bangunan	324.556.339.176	324.556.339.176	0
Aset Tetap Lainnya	243.601.710	243.601.710	0
Jumlah	2.173.568.859.432	2.173.568.859.432	0

Tidak terdapat perbedaan nilai Akumulasi Penyusutan antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.

Piutang Jangka Panjang

Rp171.040.919,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp189.728.799,00

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2022 adalah Rp189.728.799,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp46.240.799,00. Piutang Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo ini merupakan Piutang Tagihan TP/TGR yang belum dilimpahkan ke KPKNL dan pelunasannya di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah tanggal pelaporan.

Sebagaimana pada akun Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR maka penerapan penyisihan piutang tidak tertagih juga terjadi pada akun Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan Piutang Tagihan TP/TGR merupakan akun Piutang yang bersifat jangka panjang.

Penetapan kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPS dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp189.728.799,00 merupakan nilai Piutang Tagihan TP/TGR dari debitur yang sudah melalui proses telah ditetapkan oleh tim TPKN BPS. Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 tidak ada yang dilimpahkan ke KPKNL. Daftar saldo Piutang Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 94
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama	189.728.799	46.240.799
Jumlah		189.728.799	46.240.799

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR dijelaskan secara terinci dalam kategori jenis kasus dalam tabel berikut ini.

Tabel 95
Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR

No.	Uraian	31-Des-21 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar	186.728.799
2	Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2	3.000.000
Jumlah		189.728.799

Rincian debitur Piutang Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi Rp18.687.880,00

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp18.687.880,00 dan Rp231.204,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 96
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

Wilayah /Satker	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Settama	Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2	Lancar	3.000.000	0,5%	15.000
Settama	Pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar	Lancar	186.728.799	10%	18.672.880
Jumlah			189.728.799		18.687.880

Aset Lainnya
Rp68.425.088.905,00

C.1.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp68.425.088.905,00 dan Rp116.997.593.682,00. Rincian nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 97
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tak berwujud	390.531.435.503	393.320.447.281	(2.789.011.778)
2	Aset Lain-lain	286.977.715.708	180.442.628.983	106.535.086.725
Jumlah		677.509.151.211	573.763.076.264	103.746.074.947
1	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(609.084.062.306)	(456.765.482.582)	(152.318.579.724)
Nilai Buku Aset Lainnya		68.425.088.905	116.997.593.682	(48.572.504.777)

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain akan dijelaskan dalam penjelasan per akun.

Aset Tak Berwujud
Rp390.531.435.503,00

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah Rp390.531.435.503,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp393.320.447.281,00. Rincian perubahan saldo Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut.

Tabel 98
Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Software	293.345.529.460	296.072.853.238	(2.727.323.778)
Lisensi	97.185.906.043	97.247.594.043	(61.688.000)
Jumlah	390.531.435.503	393.320.447.281	(2.789.011.778)

Nilai buku Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah Rp32.529.592.191,00. Nilai Buku Aset Tak Berwujud diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi amortisasinya yang sebesar Rp358.001.843.312,00.

Mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	393.320.447.281
Penambahan			
Pembelian	Rp	2.400.000.000	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	1.568.925.000	
Transfer Masuk	Rp	612.070.000	
Jumlah Penambahan	Rp	4.580.995.000	
Pengurangan			
Transfer Keluar	(Rp)	612.070.000	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	6.757.936.778	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	7.370.006.778	
Kenaikan/(Pengurangan)			(Rp) 2.789.011.778
Saldo per 31 Desember 2022			Rp 390.531.435.503
Amortisasi Aset Tak Berwujud			(Rp) 360.001.843.312
Nilai Buku per 31 Desember 2022			Rp 30.529.592.191

Penambahan mutasi Aset Tak Berwujud melalui transaksi pembelian sebesar Rp2.400.000.000,00 merupakan hasil realisasi belanja modal lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 secara netto.

Aset Lain-Lain

Rp286.977.715.708,00

C.1.4.2 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 adalah Rp286.977.715.708,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2021 adalah Rp180.442.628.983,00. Pos Aset Lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Nilai Aset Lain-lain tersebut diperoleh dari Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset. Rincian perubahan saldo Aset Lain-Lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 99
Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	280.785.777.826	177.354.712.154	103.431.065.672
ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.191.937.882	3.087.916.829	3.104.021.053
Jumlah	286.977.715.708	180.442.628.983	106.535.086.725

Nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah Rp37.895.496.714,00. Nilai Buku Aset Lain-lain diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan

akumulasi penyusutannya yang sebesar Rp249.082.218.994,00. Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	180.442.628.983
Penambahan			
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	148.230.578	
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	163.505.504.573	
Koreksi atas Hasil Sensus BMN	Rp	5.081.048.807	
Jumlah Penambahan	Rp	168.734.783.958	
Pengurangan			
Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan)	(Rp)	145.487.000	
Penghapusan	(Rp)	9.224.321.778	
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp)	46.981.614.958	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp)	5.848.273.497	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	62.199.697.233	
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp	106.535.086.725
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	286.977.715.708
Akumulasi Penyusutan		(Rp)	249.082.218.994
Nilai Buku per 31 Desember 2022		Rp	37.895.496.714

Selain nilai Aset Lain-lain tersebut di atas, terdapat Aset Lain-lain yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakompabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.060.154.020,00. Rincian Aset Lain-lain yang masuk pada aset ekstrakompabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan /
Amortisasi Aset Lainnya
Rp609.084.062.306,00

C.1.4.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp609.084.062.306,00 dan Rp456.765.482.582,00. Rincian perubahan saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 100
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Tahun 2022 dan 2021

Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Akumulasi Amortisasi Software	264.137.950.125	218.984.405.085	45.153.545.040
Akumulasi Amortisasi Lisensi	95.863.893.187	85.653.443.669	10.210.449.518
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	243.020.846.862	149.092.413.874	93.928.432.988
Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.061.372.132	3.035.219.954	3.026.152.178
Jumlah	609.084.062.306	456.765.482.582	152.318.579.724

Nilai Buku Aset Lainnya yang berasal dari nilai perolehan Aset Lainnya setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 101
Rincian Nilai Buku Aset Lainnya

No.	Nama Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	293.345.529.460	264.137.950.125	29.207.579.335
2.	Lisensi	97.185.906.043	95.863.893.187	1.322.012.856
	Jumlah	390.531.435.503	360.001.843.312	30.529.592.191
B.	Aset Lain-Lain			
1.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	280.785.777.826	243.020.846.862	37.764.930.964
2.	ATB Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	6.191.937.882	6.061.372.132	130.565.750
	Jumlah	286.977.715.708	249.082.218.994	37.895.496.714
	Total	677.509.151.211	609.084.062.306	68.425.088.905

Amortisasi Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan ini menggunakan metode amortisasi garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/sisa. Hal ini untuk menyajikan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Dasar perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud adalah menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.06/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021		Rp	456.765.482.582
Penambahan			
Transfer Masuk	Rp	129.112.500	
Penyusutan Aset Tetap	Rp	61.532.769.555	
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	141.454.082.271	
Take in Sensus BMN	Rp	4.765.907.252	
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	145.141.988	
Jumlah Penambahan	Rp	208.027.013.566	
Pengurangan			
Penghapusan	(Rp)	9.020.027.597	
Transfer Keluar	(Rp)	129.112.500	
Hibah Keluar (BMN yang Dihentikan)	(Rp)	43.646.100	
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp)	43.707.850.524	
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp)	2.807.797.121	
Jumlah Pengurangan	(Rp)	55.708.433.842	
Kenaikan/(Pengurangan)		Rp	152.318.579.724
Saldo per 31 Desember 2022		Rp	609.084.062.306

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Rp91.537.986.794,00

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp91.537.986.794,00 dan Rp85.271.874.817,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun Kewajiban yang tersaji pada Laporan Keuangan BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 hanya terklasifikasi sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang pada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 102
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	90.985.070.100	84.632.175.591	6.352.894.509
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	573.343	5.679.586	(5.106.243)
3	Pendapatan Diterima Dimuka	447.546.691	412.777.434	34.769.257
4	Uang Muka dari KPPN	89.371.020	210.032.717	(120.661.697)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.425.640	11.209.489	4.216.151
	Jumlah	91.537.986.794	85.271.874.817	6.266.111.977

Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp90.985.070.100,00

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp90.985.070.100,00 dan Rp84.632.175.591,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga ini mengungkapkan kewajiban pemerintah yang masih harus diakui karena telah diterimanya hak dari pihak ketiga yang terjadi pada saat tanggal neraca. Rincian saldo utang pihak ketiga tersaji pada tabel berikut:

Tabel 103
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	86.276.216.106	81.729.636.772
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	4.518.576.329	2.900.282.669

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	181.276.320	2.256.150
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	9.001.345	0
	Jumlah	90.985.070.100	84.632.175.591

Saldo Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 pada Neraca berasal dari Belanja yang Masih Harus Dibayar dan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2022 berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban entitas yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima entitas, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hal tersebut kepada pegawai (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja Desember 2022 yang dibayarkan pada Januari 2023) dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa (belanja barang dan belanja modal). Daftar Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 104
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)			
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Belanja Modal YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	9.465.109.697	721.529.069	181.276.320	0
2	Pusdiklat BPS	453.310.199	35.832.097	0	0
3	Polstat STIS	825.502.108	118.107.790	0	0
4	DKI Jakarta	1.213.467.845	101.655.044	0	0
5	Jawa Barat	4.991.671.991	196.320.533	0	0
6	Jawa Tengah	6.904.618.449	300.351.148	0	0
7	DI Yogyakarta	1.557.702.574	61.835.707	0	0
8	Jawa Timur	5.632.809.036	354.030.477	0	0
9	Aceh	2.695.460.292	61.195.787	0	0
10	Sumatera Utara	4.276.090.261	210.632.079	0	0
11	Sumatera Barat	2.485.348.277	159.971.062	0	0
12	Riau	1.983.184.786	102.856.827	0	0
13	Jambi	1.566.945.690	92.960.365	0	0
14	Sumatera Selatan	2.700.285.951	156.179.375	0	0
15	Lampung	2.325.478.752	105.366.596	0	0
16	Kalimantan Barat	2.100.148.768	132.445.370	0	1.494.100
17	Kalimantan Tengah	1.780.926.038	118.684.207	0	0
18	Kalimantan Selatan	2.009.539.549	171.337.690	0	0
19	Kalimantan Timur	1.545.842.426	80.374.243	0	0
20	Sulawesi Utara	1.752.924.862	86.708.195	0	0
21	Sulawesi Tengah	1.769.943.839	86.845.588	0	0
22	Sulawesi Selatan	3.496.470.240	198.693.265	0	7.507.245
23	Sulawesi Tenggara	2.260.061.550	102.931.221	0	0
24	Maluku	1.621.105.258	6.436.947	0	0
25	Bali	1.406.777.915	57.826.208	0	0
26	NTB	959.593.545	13.635.776	0	0
27	NTT	2.904.054.469	158.003.939	0	0
28	Papua	2.386.615.217	80.698.134	0	0

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)			
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Belanja Modal YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	Bengkulu	1.543.145.079	36.908.302	0	0
30	Maluku Utara	1.531.678.315	46.433.486	0	0
31	Banten	1.603.613.156	78.901.810	0	0
32	Kep. Babel	1.205.921.164	63.842.121	0	0
33	Gorontalo	945.777.559	9.174.275	0	0
34	Kep. Riau	1.169.877.717	73.348.951	0	0
35	Papua Barat	1.370.077.802	46.720.984	0	0
36	Sulawesi Barat	1.137.279.121	50.111.291	0	0
37	Kalimantan Utara	697.856.609	39.690.370	0	0
Jumlah		86.276.216.106	4.518.576.329	181.276.320	9.001.345

*Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Non
Pajak
Rp573.343,00*

C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp573.343,00 dan Rp5.679.586,00. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak ini merupakan hasil pencatatan utang atas kelebihan pendapatan non pajak lainnya. Saldo pada akun ini berasal dari kelebihan penyetoran pendapatan sewa atas rumah dinas, sehingga kelebihan setoran tersebut akan dikembalikan kepada pihak ketiga. Saldo akun ini yang sebesar Rp573.343,00 terdapat pada wilayah BPS Provinsi Jawa Timur.

*Pendapatan Yang
Diterima Dimuka
Rp447.546.691,00*

C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp447.546.691,00 dan Rp412.777.434,00. Pendapatan yang Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah.

Rincian saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 105
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	141.025.599	321.209.056	(180.183.457)
2	Polstat STIS	33.991.746	7.750.076	26.241.670
3	Jawa Tengah	7.363.139	11.859.033	(4.495.894)
4	DI Yogyakarta	1.199.343	2.398.686	(1.199.343)
5	Jawa Timur	334.950	807.912	(472.962)
6	Aceh	4.549.946	7.586.016	(3.036.070)
7	Sumatera Barat	0	1.670.603	(1.670.603)
8	Sumatera Selatan	2.793.771	5.587.542	(2.793.771)

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Lampung	255.844.689	50.915.068	204.929.621
10	Kalimantan Selatan	367.883	1.570.073	(1.202.190)
11	Sulawesi Tenggara	75.625	302.657	(227.032)
12	Nusa Tenggara Timur	0	1.120.712	(1.120.712)
Jumlah		447.546.691	412.777.434	34.769.257

Saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2022 terdapat pada:

1. Settama. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp141.025.599,00. Saldo tersebut terdiri dari penerimaan sewa ruangan untuk kantor kas BRI dan ATM sebesar Rp29.530.222,00, sewa ruangan untuk kantin sebesar Rp5.502.275,00, sewa ruangan untuk kantor koperasi sebesar Rp74.985.195,00, dan sewa tempat untuk ATM Bank Mandiri sebesar Rp31.007.907,00.
2. Polstat STIS. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp33.991.746,00. Saldo tersebut terdiri dari penerimaan sewa tempat untuk ATM Bank BRI dengan periode sewa 1 Januari 2023 sampai dengan 4 September 2025.
3. Jawa Tengah. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp7.363.139,00 pada BPS Provinsi Jawa Tengah. Saldo ini terdiri dari penerimaan sewa ruangan untuk kantin sebesar Rp4.023.723,00 dengan periode sewa 11 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2024 dan penerimaan sewa ruangan untuk kantor koperasi sebesar Rp3.339.416,00 dengan periode sewa 2 September 2021 sampai dengan 1 September 2024.
4. DI Yogyakarta. Saldo merupakan nilai sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp1.199.343,00 pada BPS Provinsi DI Yogyakarta. Saldo ini merupakan penerimaan sewa ruangan untuk koperasi dengan masa sewa 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023.
5. Jawa Timur. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp334.950,00 pada BPS Provinsi Jawa Timur. Saldo ini terdiri dari penerimaan sewa ruangan untuk koperasi.
6. Aceh. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp4.549.946,00 pada BPS Provinsi Aceh. Saldo ini terdiri dari penerimaan sewa ruangan untuk kantor koperasi dengan periode sewa 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2024.
7. Sumatera Selatan. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp2.793.771,00 pada BPS Provinsi Sumatera Selatan. Saldo ini terdiri dari penerimaan sewa ruangan untuk kantor koperasi dengan periode sewa 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023.

8. Lampung. Saldo merupakan nilai sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp255.844.689,00. Saldo ini merupakan penerimaan sewa bangunan berupa gedung kantor BPS Kota Metro yang lama sebagai toko yang masa berlaku sewa sampai dengan bulan April 2024.
9. Kalimantan Selatan. Saldo merupakan nilai sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp367.883,00 pada BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo ini merupakan penerimaan sewa ruangan untuk kantor koperasi dengan masa sewa berlaku dari tanggal 23 April 2020 sampai dengan 22 April 2023.
10. Sulawesi Tenggara. Saldo merupakan nilai sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp75.625,00 pada BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Saldo ini merupakan penerimaan sewa ruangan untuk kantor koperasi dengan masa sewa berlaku dari tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.

Uang Muka Dari
KPPN

Rp89.371.020,00

C.2.1.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp89.371.020,00 dan Rp210.032.717,00. Uang Muka dari KUN merupakan UP/TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Utang Jangka Pendek
lainnya

Rp15.425.640,00

C.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.425.640,00 dan Rp11.209.489,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan.

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 106
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	31-Des-21 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	10.200	0	10.200
2	Jawa Tengah	359.580	1.785.422	(1.425.842)
3	Sumatera Utara	0	2.679.888	(2.679.888)
4	Riau	15.055.860	144.362	14.911.498
5	Jambi	0	592.150	(592.150)
6	Maluku	0	5.414.186	(5.414.186)
7	Nusa Tenggara Timur	0	593.481	(593.481)
	Jumlah	15.425.640	11.209.489	4.216.151

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya yang merupakan potongan pajak oleh Bendahara yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp15.425.640,00 sebagai berikut.

1. Pada wilayah BPS Provinsi DKI Jakarta, jumlah potongan pajak yang dilakukan oleh Bendahara dan belum disetor ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.200,00. Pajak ini adalah PPh Pasal 23.
2. Pada wilayah BPS Provinsi Jawa Tengah, jumlah potongan pajak yang dilakukan oleh Bendahara dan belum disetor ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp359.580,00. Pajak ini adalah PPh Pasal 23.
3. Pada wilayah BPS Provinsi Riau, jumlah potongan pajak yang dilakukan oleh Bendahara dan belum disetor ke Kas Negara pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp15.055.860,00. Rincian jenis pajaknya sebagai berikut:
 - a. PPh Pasal 21 sebesar Rp6.172.050,00.
 - b. PPh Pasal 22 sebesar Rp102.555,00.
 - c. PPh Pasal 23 sebesar Rp1.022.735,00.
 - d. PPN Dalam Negeri sebesar Rp7.468.120,00.
 - e. PPnBM Dalam Negeri sebesar Rp290.400,00.

C.3 EKUITAS

Ekuitas

Rp5.331.160.728.411,00

C.3.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp5.331.160.728.411,00 dan Rp5.348.258.131.794,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL

D.1.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp21.366.306.307,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp21.366.306.307,00

D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp21.366.306.307,00 dan Rp34.789.890.921,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 107
Rincian PNPB Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.436.872.287	2.420.257.200
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.481.000.000	7.200.600.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.577.560.000	0
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	2.724.476.151	16.608.841.862
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	6.668.764.765	7.654.707.716
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	73.640.000
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	56.387	2.291.878
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.159.680.588	817.594.292
425839	Pendapatan Denda Lainnya	111.127.049	0
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	349.670
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	206.769.080	11.608.303
	Jumlah	21.366.306.307	34.789.890.921

Perbandingan saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 108
Perbandingan PNPB Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2022

Kode Akun	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.436.872.287	2.466.523.436	(29.651.149)
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.481.000.000	5.481.000.000	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	1.577.560.000	1.577.560.000	0

Kode Akun	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	2.724.476.151	2.724.476.151	0
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	6.668.764.765	6.668.764.765	0
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	56.387	58.887	(2.500)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	2.159.680.588	1.310.149.492	849.531.096
425839	Pendapatan Denda Lainnya	111.127.049	2.883.200	108.243.849
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	206.769.080	206.769.080	0
Jumlah		21.366.306.307	20.438.185.011	928.121.296

Rincian penjelasan perbedaan nilai PNPB Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Nilai LRA		Rp	20.438.185.011
Penambah			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Rp	2.745.835
	Piutang PNPB	Rp	3.568.530
	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak	Rp	1.060.243
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Rp	679.417.300
	Piutang PNPB	Rp	186.152.301
Pendapatan Denda Lainnya	Piutang Lainnya	Rp	2.553.000
	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp	3.538.000
	Beban Honor Output Kegiatan	Rp	4.365.600
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	70.000
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp	71.031.749
	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp	26.685.500
	Total Penambah	Rp	981.188.058
Pengurang			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Piutang Lainnya	(Rp)	2.256.500)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	(Rp)	34.769.257)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	(Rp)	2.500)
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang	(Rp)	12.500.505)
	Pendapatan Denda Lainnya	(Rp)	3.538.000)
	Total Pengurang	(Rp)	53.066.762)
Tambah/kurang Nilai LO		Rp	928.121.296
		Rp	21.366.306.307

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 berasal dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa,

Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Beban Pegawai
Rp2.287.085.450.501,00

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.287.085.450.501,00 dan Rp2.083.556.785.665,00. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 109
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	781.246.016.363	760.246.558.662
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.020.883	12.023.989
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	49.765.245.952	49.768.328.001
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	15.332.413.460	15.387.287.630
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	17.956.831.985	39.158.770.161
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	130.401.837.264	53.191.689.485
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	4.965.159.528	2.324.635.680
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.158.886.074	42.583.863.586
511129	Beban Uang Makan PNS	117.670.688.700	130.049.369.192
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	409.775.000	411.000.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.868.150.000	3.811.605.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15.057.175.437	15.899.260.042
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	1.954.153.391	1.950.191.819
512211	Beban Uang Lembur	23.732.810.300	18.392.608.684
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.081.554.286.164	950.369.593.734
	Jumlah	2.287.085.450.501	2.083.556.785.665

Perbandingan saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 110
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2022

Kode Akun	URAIAN	LO	LRA	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	781.246.016.363	781.356.515.493	(110.499.130)
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	12.020.883	12.134.544	(113.661)
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	49.765.245.952	49.796.594.973	(31.349.021)

Kode Akun	URAIAN	LO	LRA	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	15.332.413.460	15.334.619.918	(2.206.458)
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	17.956.831.985	18.024.444.933	(67.612.948)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	130.401.837.264	129.954.443.942	447.393.322
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	4.965.159.528	4.958.820.833	6.338.695
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.158.886.074	43.159.393.014	(506.940)
511129	Beban Uang Makan PNS	117.670.688.700	117.609.269.850	61.418.850
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	409.775.000	409.775.000	0
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	3.868.150.000	3.868.800.000	(650.000)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	15.057.175.437	15.059.191.137	(2.015.700)
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	1.954.153.391	1.944.340.972	9.812.419
512211	Beban Uang Lembur	23.732.810.300	23.679.597.400	53.212.900
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.081.554.286.164	1.077.212.232.477	4.342.053.687
Jumlah		2.287.085.450.501	2.282.380.174.486	4.705.276.015

Beban Persediaan
Rp115.075.308.785,00

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang persediaan yang habis pakai. Saldo Beban Persediaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp115.075.308.785,00 dan Rp66.017.573.201,00. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 111
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)
Beban Persediaan Konsumsi	115.075.308.785	66.017.573.201
Jumlah	115.075.308.785	66.017.573.201

Beban Barang dan Jasa
Rp3.823.244.186.829,00

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa termasuk aset ekstrakomptabel yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional entitas pelaporan. Saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.823.244.186.829,00 dan Rp910.652.974.186,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 112
Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	183.171.211.491	182.603.827.597
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	504.000	0

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	22.136.702	127.906.642
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.145.413.423	2.429.999.630
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53.790.102.452	50.518.946.210
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	691.274.068	930.203.224
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	3.547.446.956	7.095.944.202
521211	Beban Bahan	331.955.519.195	85.307.188.335
521213	Beban Honor Output Kegiatan	3.001.173.701.259	384.915.768.096
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	66.139.399.763	26.248.536.602
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	32.902.241.945	28.420.902.308
521252	Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	2.910.042.111	0
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	381.088.981	0
522111	Beban Langganan Listrik	42.250.551.661	34.248.069.021
522112	Beban Langganan Telepon	1.400.341.111	1.493.857.295
522113	Beban Langganan Air	1.588.141.601	1.327.700.326
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	679.725.373	157.985.093
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	7.000.000	0
522131	Beban Jasa Konsultan	588.911.176	183.865.000
522141	Beban Sewa	17.429.122.290	5.973.121.172
522151	Beban Jasa Profesi	9.507.393.500	6.842.718.379
522191	Beban Jasa Lainnya	64.183.304.069	50.721.137.472
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.603.306.022	40.913.464.082
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	176.307.680	191.833.500
Jumlah		3.823.244.186.829	910.652.974.186

Beban Pemeliharaan
Rp145.085.049.642,00

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki oleh entitas pelaporan agar tetap berada dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp145.085.049.642,00 dan Rp114.222.518.463,00.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 113
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.607.105.252	31.018.848.670
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.211.577.288	690.071.570
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	101.462.100
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	737.633.696	441.137.667
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	105.481.263.674	79.401.621.181
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	575.000	0
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	0	619.250.000

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.866.023.053	1.950.127.275
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	180.871.679	0
Jumlah		145.085.049.642	114.222.518.463

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.722.961.732.017,00

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban untuk mencatat penyelenggaraan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.722.961.732.017,00 dan Rp309.139.592.919,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 114
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
524111	Beban Perjalanan Biasa	197.684.344.635	103.913.702.178
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	218.172.034.778	75.593.484.269
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	925.759.258.064	94.853.800.296
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	10.944.000	0
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	381.012.362.095	34.710.383.898
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	322.788.445	68.222.278
Jumlah		1.722.961.732.017	309.139.592.919

Beban Barang untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat Rp0,00

D.2.6 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Saldo Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp8.956.000,00.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp290.672.529.437,00

D.2.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp290.672.529.437,00 dan Rp310.496.689.612,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 115
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	170.006.278.836	178.889.789.103
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.109.023.325	59.052.704.865
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	29.267.713	58.535.427
592115	Beban Amortisasi Software	50.069.856.318	56.445.173.442
592116	Beban Amortisasi Lisensi	10.253.631.118	10.259.799.896
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	151.650.025	5.049.404.733
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1.052.822.102	741.282.146
Jumlah		290.672.529.437	310.496.689.612

Beban Penyisihan
 Piutang Tak Tertagih
 minus
 Rp6.730.737.761,00

D.2.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang dalam suatu periode pelaporan. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar minus Rp6.730.737.761,00 dan Rp2.155.421.056,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 116
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNPB	(11.561.787)	6.519
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(2.308.878)	(66.183.915)
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(1.145.787.892)	2.221.909.710
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(5.571.079.204)	(311.258)
Jumlah		(6.730.737.761)	2.155.421.056

D.3 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Pelepasan
 Aset Non Lancar
 Rp5.281.817.748,00

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing Rp5.281.817.748,00 dan Rp4.082.532.774,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari hasil pelepasan aset non lancar berupa Barang Milik Negara (BMN) melalui proses pemindahtanganan aset. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 117
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.600.029	5.678.999
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	452.612.400	616.272.382
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.821.605.319	3.460.581.393
Jumlah		5.281.817.748	4.082.532.774

Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp15.147.990.559,00

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp15.147.990.559,00 dan Rp72.745.003.235,00. Beban tersebut berasal dari nilai Beban Kerugian Pelepasan Aset yang memperhitungkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku ketika terjadi proses pelepasan aset.

Tabel 118
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	15.147.990.559	72.745.003.235
Jumlah		15.147.990.559	72.745.003.235

D.4 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp100.705.233.635,00

D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp100.705.233.635 dan Rp9.564.208.696,00. Pendapatan ini berasal dari transaksi pendapatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi utama dari BPS. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 119
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1.038.018.622	1.022.177.320
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	19.165.306.194	256.984.095
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	324.838.389	550.780.899
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	8.353.640	2.065.304.513

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	115.417.987	77.318.869
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	1.943.610.664	5.591.643.000
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	78.109.688.139	0
Jumlah		100.705.233.635	9.564.208.696

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp79.666.069.054,00

D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp79.666.069.054,00 dan Rp183.651.725,00. Beban ini merupakan beban yang muncul karena adanya penyesuaian atas nilai dan kondisi barang persediaan. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 120
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021

Kode Akun	URAIAN	TA 2022 (Rp)	TA 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	78.896.832.377	0
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	769.236.677	183.651.725
Jumlah		79.666.069.054	183.651.725

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.348.258.131.794,00

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2021 adalah masing-masing sebesar Rp5.348.258.131.794,00 dan Rp5.474.527.712.606,00.

Defisit LO
Rp8.344.854.221.373,00

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.344.854.221.373,00 dan Rp3.820.742.533.671,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa pada Laporan Operasional. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disajikan pada Laporan Operasional.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang menambah /mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.026.417.799,00 dan Rp16.910.245.565,00. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 121
Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koreksi Nilai Persediaan	782.455.926	16.871.700
2	Koreksi atas Reklasifikasi	643.917.275	1.046.479.864
3	Selisih Revaluasi Aset	0	0
4	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	60.168.227.681	10.612.699.511
5	Lain-lain	(6.568.183.083)	5.234.194.490
	Jumlah	55.026.417.799	16.910.245.565

Koreksi Nilai
Persediaan
Rp782.455.926,00

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp782.455.926,00 dan Rp16.871.700,00. Saldo Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan nilai koreksi atas persediaan berupa persediaan yang perolehannya pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran yang berjalan. Perolehan persediaan ini melalui pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya, maupun reklasifikasi masuk. Saldo Koreksi Nilai Persediaan yang tercatat di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai koreksi persediaan barang konsumsi yang perolehannya tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran berjalan. Saldo Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 122
Rincian Saldo Koreksi Nilai Persediaan

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Nama Satker	Nilai Koreksi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0199	Settama	Settama	63.343.923
2	0100	DKI Jakarta	Kota Jakarta Pusat	12.595.790
3	0200	Jawa Barat	Kota Bekasi	29.984
4	0300	Jawa Tengah	Propinsi Jawa Tengah	1.319.710
5	0300	Jawa Tengah	Kab. Kudus	(3.740.990)
6	0500	Jawa Timur	Kota Surabaya	(5.003.000)
7	0500	Jawa Timur	Kota Mojokerto	(105.000)
8	0900	Riau	Propinsi Riau	1.408.154
9	0900	Riau	Kab. Siak	(1.950)
10	1200	Lampung	Kab. Mesuji	783.888.004
11	1300	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	7.600
12	1400	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	(73.684.800)
13	1600	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	(215.000)
14	1900	Sulawesi Selatan	Propinsi Sulawesi Selatan	1.125.650
15	1900	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	(5.000)
16	2400	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	42.000
17	2500	Papua	Propinsi Papua	580.360
18	2500	Papua	Kab. Yahukimo	(2.578.829)
19	2600	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	3.593.600
20	3400	Sulawesi Barat	Kab. Majene	(144.280)
Jumlah				782.455.926

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp643.917.275,00

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp643.917.275,00 dan Rp1.046.479.864,00. Saldo Koreksi atas Reklasifikasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi yang terjadi pada Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya SIMAK-BMN periode tahun berjalan. Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu transaksi yang mungkin terjadi atas suatu BMN adalah reklasifikasi. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi pencatatan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain. Sedangkan reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus suatu BMN, sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru. Saldo Koreksi atas Reklasifikasi per 31 Desember 2022 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 123
Rincian Saldo Koreksi atas Reklasifikasi

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Nama Satker	Nilai Koreksi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0200	Jawa Barat	Kab. Bekasi	(7.087.800)

2	0500	Jawa Timur	Kab.Sidoarjo	(1.200.300)
3	0500	Jawa Timur	Kab.Tuban	673.241.750
4	0700	Sumatera Utara	Kab.Gunung Sitoli	(4.022.000)
5	1500	Kalimantan Selatan	Kab.KotaBaru	(990.000)
6	1700	Sulawesi Utara	Kab.Minahasa	190.625
7	1900	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	(900.000)
8	1900	Sulawesi Selatan	Kab.Soppeng	(11.940.000)
9	1900	Sulawesi Selatan	Kab.Luwu	(675.000)
10	3500	Kalimantan Utara	Kab.Bulungan	(2.700.000)
Jumlah				643.917.275

Penjelasan dengan menggunakan perhitungan mutasi transaksi saldo Koreksi atas Reklasifikasi diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

- Reklasifikasi Keluar	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	2.851.214.604
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	661.429.923
- Reklasifikasi dari Aset	: Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Rp	1.965.810
	: Barang Konsumsi	Rp	182.191.350
- Reklas Masuk dari Persediaan	: Aset Tetap Lainnya	Rp	10.581.900
	: Peralatan dan Mesin	Rp	8.550.000
- Reklasifikasi Masuk	: Aset Tetap Lainnya	Rp	27.911.536
	: Bahan Baku	Rp	255.500
	: Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	114.891.718
	: Barang Konsumsi	Rp	3.545.078.856
	: Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp	201.025
	: Gedung dan Bangunan	Rp	35.665.161.692
	: Peralatan dan Mesin	Rp	8.660.328.506
	: Tanah	Rp	2.732.926.000
- Tidak ada Uraian	: Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/ Aset Tetap/Aset Lainnya	Rp	2.730.000
Jumlah Mutasi Tambah:			Rp 54.465.418.420

Mutasi Kurang

- Reklasifikasi ke Aset	: Aset Tetap Lainnya untuk Diserahkan ke masyarakat ke Masyarakat	(Rp	2.612.250)
	: Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	3.427.800)
	: Barang Konsumsi	(Rp	34.734.950)
	: Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	(Rp	2.472.000)
	: Peralatan dan Mesin untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	(Rp	6.180.000)
	: Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	(Rp	1.950.000)



- Reklasifikasi Keluar	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	27.911.536)
	: Bahan Baku	(Rp	68.742.270)
	: Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	23.513.348)
	: Barang Konsumsi	(Rp	3.422.529.406)
	: Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	(Rp	115.145.385)
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	35.667.663.572)
	: Jaringan	(Rp	9.800.000)
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	8.650.528.506)
	: Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	(Rp	2.521.640)
	: Persediaan Lainnya	(Rp	23.243.450)
	: Pita Cukai, Materai dan Leges	(Rp	2.839.000)
	: Suku Cadang	(Rp	1.892.600)
	: Tanah	(Rp	2.730.424.120)
- Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	145.672.160)
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	9.000.000)
- Reklasifikasi Masuk	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	2.177.972.854)
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	661.239.298)
Tidak ada Uraian	:	(Rp	29.485.000)
Jumlah Mutasi Kurang:			(Rp 53.821.501.145)
Saldo Koreksi atas Reklasifikasi 31 Desember 2022			Rp 643.917.275

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
Rp60.168.227.681,00

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp60.168.227.681,00 dan Rp10.612.699.511,00. Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas catatan dan koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang dilakukan selain karena revaluasi nilai.

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset yang terjadi pada nilai SIMAK-BMN periode tahun berjalan.

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar Rp59.264.739.276,00. Penjelasan dengan menggunakan perhitungan mutasi transaksi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut.

Mutasi Tambah

- Koreksi Nilai KDP Bertambah	: Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	5.526.541.088
- Koreksi Pencatatan	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	446.556.963
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	5.695.279



Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun 2022

- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	6.854.023
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	632.368.222
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	: Aset Tetap Lainnya	Rp	3.081.600
	: Gedung dan Bangunan	Rp	8.266.427.682
	: Peralatan dan Mesin	Rp	295.427.525
- Koreksi Susulan	: Gedung dan Bangunan	Rp	970.125.140
	: Peralatan dan Mesin	Rp	30
- Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	: Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	932.093.007
	: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	15.892.597.170
- Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	: Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	148.230.578
- Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	: Akm. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	980.578.150
	: Akm. Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	2.802.313.721
	: Aset Tetap Lainnya	Rp	43.020.802
	: Gedung dan Bangunan	Rp	735.520.000
	: Peralatan dan Mesin	Rp	2.671.203.695
	: Tanah	Rp	829.604.000
- Penghapusan	: Akm. Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	6.514.002
- Penghentian Aset dari Penggunaan	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	521.158.611
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	140.932.250.252
	: Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	156.747.567.795
- Saldo Awal	: Aset Tetap Lainnya	Rp	12.823.753
	: Gedung dan Bangunan	Rp	60.915.341
	: Peralatan dan Mesin	Rp	7.151.305.815
	: Tanah	Rp	66.398.766.000
- Tidak Ada Uraian	: Aset Tetap yang Belum Diregister	Rp	460.000
	: Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	Rp	11.600.000
	: Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	7.067.800
	: Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp	4.632.647.379
	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	37.000.000
	: Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	Rp	40.580.000
	: N/A	Rp	5.968.289.561



Jumlah Mutasi Tambah:		Rp	423.717.184.984
Mutasi Kurang			
- Hibah Masuk	: Akm.Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	500.000)
- Koreksi Manual	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	28.884.900)
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	235.800)
	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	21.080)
- Koreksi Nilai KDP Berkurang	: Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp	399.286.977)
- Koreksi Pencatatan	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	48.214.435)
	: Aset Tetap Renovasi	(Rp	93.663.000)
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	13.391.175.363)
	: Irigasi	(Rp	288.723.879)
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	1.036.821.247)
	: Tanah	(Rp	475.278.720)
- Koreksi Pencatatan KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp	4.107.840.713)
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	12.279.300)
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	2.355.933.136)
	: Jaringan	(Rp	31.450.000)
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	6.517.403.064)
	: Tanah	(Rp	299.104.280)
- Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	370.851.617)
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	23.495.745)
- Koreksi Susulan	: Gedung dan Bangunan	(Rp	517.170.474)
- Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan	: Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	932.093.007)
	: Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	16.505.121.212)
- Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	145.141.988)
- Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	213.289.086)
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	2.589.024.635)
- Penggunaan Aktif	: Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	1.568.925.000)
	: Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	4.279.348.497)
- Penghapusan	: Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	6.514.002)
- Penghentian Aset dari Penggunaan	: Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	141.453.408.863)
	: Aset Tetap Lainnya	(Rp	9.988.189.098)
	: Gedung dan Bangunan	(Rp	3.777.056.000)
	: Peralatan dan Mesin	(Rp	142.152.718.697)
	: Tanah	(Rp	829.604.000)
- Reklasifikasi Masuk	: Akm.Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	673.241.750)
- Saldo Awal	: Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	609.153)
	: Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	778.036.116)
- Tidak Ada Uraian	: Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	(Rp	61.943.606)



:	Beban Aset Ekstrakomtabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	(Rp	7.067.800)	
:	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	(Rp	3.397.000)	
:	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	(Rp	181.276.320)	
:	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	(Rp	2.026.789.601)	
:	N/A	(Rp	6.281.316.547)	
Jumlah Mutasi Kurang:				(Rp 364.452.445.708)
Saldo Koreksi Nilai Aet Tetap Non Revaluasi 31 Desember 2022				Rp 59.264.739.276

- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp903.488.405,00. Penjelasan dengan menggunakan perhitungan mutasi transaksi Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi adalah sebagai berikut.

Mutasi Tambah

-	Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	:	Software	Rp	1.568.925.000
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	:	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Rp	43.181.600
		:	Akumulasi Amortisasi Software	Rp	5.896.889.428
		:	Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	6.757.936.778
-	Tidak Ada Uraian	:	-	Rp	5.081.048.807
Jumlah Mutasi Tambah:					Rp 19.347.981.613

Mutasi Kurang

-	Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan Penggunaan Aktif	:	Akumulasi Amortisasi Software	(Rp	980.578.150)
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	:	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp	5.940.071.028)
		:	Lisensi	(Rp	61.688.000)
		:	Software	(Rp	6.696.248.778)
-	Tidak ada uraian	:		(Rp	4.765.907.252)
Jumlah Mutasi Kurang:					(Rp 18.444.493.208)
Saldo Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi 31 Desember 2022					Rp 903.488.405

Koreksi Lain-Lain
(Rp6.568.183.083,00)

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah (Rp6.568.183.083,00) dan Rp5.234.194.490,00. Saldo Koreksi Lain-Lain merupakan akun yang digunakan untuk mengkoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi kas, piutang, dan utang pada periode berjalan. Saldo Koreksi Lain-Lain terbentuk akibat jurnal penyesuaian yang dicatat pada periode tahun berjalan.



Transaksi Antar Entitas
Rp8.272.730.400.191,00

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.272.730.400.191,00 dan Rp3.677.562.707.294,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih Entitas yang berbeda baik dalam internal satker BPS, antar BPS dengan Kementerian Lain, maupun antar BPS dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari.

Tabel 124
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	8.308.425.095.200	3.725.835.051.960
2	Diterima dari Entitas Lain	(51.171.714.629)	(58.276.873.675)
3	Transfer Keluar	(145.531.924.514)	(39.593.499.119)
4	Transfer Masuk	143.086.639.894	38.448.326.119
5	Pengesahan Hibah Langsung	17.892.817.936	9.673.629.956
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(74.970.451)	(171.351.497)
7	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	104.456.755	1.647.423.550
	Jumlah	8.272.730.400.191	3.677.562.707.294

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, adalah masing-masing sebesar Rp51.171.714.629,00 dan Rp8.308.425.095.200,00. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Transaksi Antar Entitas atas pendapatan dan belanja pada BPS yang melibatkan Kas Negara (BUN). Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 125
Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	51.171.714.629	0
	Jumlah	51.171.714.629	0
No.	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Belanja		
	- Belanja Pegawai	0	2.282.380.174.486
	- Belanja Barang	0	5.860.512.565.577
	- Belanja Modal	0	168.338.905.192
	Jumlah	0	8.311.231.645.255

Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp8.308.425.095.200,00 jika dibandingkan dengan nilai rincian laporan realisasi belanja sebagai pembentuk nilai Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp8.311.231.645.255,00 maka terdapat selisih sebesar Rp2.806.550.055,00. Selisih tersebut berasal dari realisasi dana hibah langsung luar negeri yang berasal dari UNFPA dan UNICEF di periode tahun berjalan.

E.4.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022, adalah masing-masing sebesar Rp143.086.639.894,00 dan Rp145.531.924.514,00. Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu Entitas ke Entitas lain pada internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga, dan antara BPS dengan BUN.

Tabel 126
Rincian Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Kode Akun	Uraian	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117111	Barang Konsumsi	91.901.264.131	(91.928.972.235)
131111	Tanah	5.802.137.000	(7.347.037.000)
132111	Peralatan dan Mesin	48.738.380.515	(48.738.380.515)
133111	Gedung dan Bangunan	727.648.000	(1.761.509.000)
137111	Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.445.798.095)	4.445.798.095
137211	Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(97.100.359)	214.584.560
162151	Software	612.070.000	(612.070.000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(129.112.500)	129.112.500
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	(514.470)	0
593111	Beban Persediaan Konsumsi	(22.334.328)	66.549.081
Jumlah		143.086.639.894	(145.531.924.514)

Selisih Nilai Transfer Masuk dan Keluar pada Neraca Percobaan Akrual BPS berasal dari nilai Transfer Keluar tanpa nilai Transfer Masuk pada BPS Propinsi DI.Yogyakarta ke Instansi Lain yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Akumulasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.461.276.799. Dan terdapat jurnal penyesuaian atas pencatatan akibat penonaktifan menu Transfer Masuk/Transfer Keluar Manual di Aplikasi SAKTI yang menyebabkan satker menjurnal manual sebesar Rp15.992.179 pada sisi kredit.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahaan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp17.892.817.936,00 Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS tahun berjalan dalam bentuk uang/kas, barang, maupun jasa. Sedangkan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Saldo Pengesahan Hibah terdapat pada tabel berikut.

Tabel 127
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung

No.	Kode Wil.	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Jenis Hibah	Nilai Hibah Langsung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0199	Settama	Settama	UNFPA	370/PDA/12-2022	Uang	1.099.742.506
				UNICEF		Uang	1.781.778.000
				UNFPA		Jasa	259.127.881
2	0300	Jawa Tengah	Kab.Demak	Pemda Kab.Demak	028/612	Tanah	6.059.652
3	0300	Jawa Tengah	Kab.Rembang	Pemda Kab.Rembang	37/HK.610/11/2022	Tanah	103.790.720
4	0300	Jawa Tengah	Kab.Temanggung	Pemda Kab.Temanggung	15/HK.610/11/2022	Pagar Kantor	185.827.750
5	0300	Jawa Tengah	Kab.Karanganyar	Pemda Kab.Karanganyar	028/173.2/Pe ngelolaan.H/I X/2022	Gedung dan Bangunan	197.628.237
6	0500	Jawa Timur	Propinsi Jawa Timur	Pemda Propinsi Jawa Timur	020/010-1/HK.610/2022/PKS/03/2022	Tanah	13.830.000.000
7	0500	Jawa Timur	Kab.Trenggalek	Pemda Kab.Trenggalek	B.212/35030/PL.220/12/2022	Tanah	255.078.720
8	1500	Kalimantan Selatan	Propinsi Kalimantan Selatan	Pegawai An.Fachri Ubadiyah	01/HK.610/B A/01/2022	Gedung dan Bangunan	97.558.300
				Pegawai An.Fachri Ubadiyah		Peralatan dan Mesin	870.000
9	3400	Kepulauan Riau	Kota Batam	Pegawai An.Suparyani	12.2/HK.610/PKS/10/2022	Gedung dan bangunan	75.356.170
Jumlah							17.892.817.936

E.4.4 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Saldo Pengesahaan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp74.970.451,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung yang telah dilakukan pengesahan. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2022 berasal dari satker Settama yang merupakan pengembalian dana hibah ke donor. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung berasal dari satker Settama BPS, dengan rincian asal hibah adalah sebagai berikut:

1. UNFPA, sebesar Rp9.202.611,00.
2. UNICEF, sebesar Rp65.767.840,00.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp104.456.755,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS dalam bentuk kas, barang, maupun jasa atas hibah yang diterima pada tahun 2021 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah di tahun 2022. Saldo Pengesahan Hibah terdapat pada tabel berikut.

Tabel 128
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

No.	Kode Wil.	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Objek Hibah	Nilai Hibah Langsung TAYL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0700	Sumatera Utara	BPS Kab. Samosir	Pemda Kab. Samosir	550/01/BPKAD/BAST/VII/2019	Tanah	15.792.000
2	0800	Sumatera Barat	BPS Kab. Pasaman Barat	Pemda Kab. Pasaman Barat	970/987/BAPD/BAST/2021	Tanah	88.664.755
Jumlah							104.456.755

Ekuitas Akhir
Rp5.331.160.728.411,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 30 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.331.160.728.411,00 dan Rp5.348.258.131.794,00.

Jakarta, 10 Mei 2023
Kepala Badan Pusat Statistik,



Margo Yuwono

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Badan Pusat Statistik berdasarkan Surat Tugas Auditor Utama Keuangan Negara II BPK nomor 140/ST/XV/12/2021 tanggal 1 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan sebanyak 347 temuan dengan nilai sebesar Rp21.752.139.270,53 dan USD216.837,47;
2. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebanyak 701 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp21.752.139.270,53 dan USD216.837,47;
3. Tindaklanjut yang dilakukan oleh BPS atas rekomendasi dari BPK adalah:
 - a. Sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 544 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp18.413.725.889,66 dan USD12.389,50;
 - b. Belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 138 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp2.754.997.300,87 dan USD204.447,97;
 - c. Belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi sebesar Rp0,00;
 - d. Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 19 rekomendasi dengan nilai sebesar Rp583.416.080,00;
4. Penyerahan aset atau penyetoran ke Kas Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/Daerah sebesar Rp14.090.627.794,52 dan USD12.389,50.

Daftar temuan dan *monitoring* penyelesaian tindak lanjut atas pembahasan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta Rencana Aksi BPS atas LHP BPK terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan Tahun 2022.

F.2 REVISI DIPA

Selama periode 31 Desember 2022, BPS melakukan perubahan pagu sebanyak 11 (sebelas) kali melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Nilai pagu dalam DIPA awal sebesar Rp5.691.816.660.000,00 dan setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp8.560.888.091.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Pertama terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2021 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-760/02000/PR.440/12/2021 tanggal 10 Desember 2021. Nilai pagu awal Rp5.691.816.660.000,00 menjadi Rp5.691.816.660.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 - Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yaitu blokir 5 persen belanja sebesar Rp283.280.397.000,00, dengan rincian:



- 1) Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) berupa pemblokiran Tunjangan Kinerja yang melekat pada Gaji ke-13 dan THR sebesar 5 persen yaitu Rp137.893.643.000,00.
 - 2) Program PPIS (054.01.GG) berupa pemblokiran kegiatan Prioritas Nasional (PN) sebesar 5 persen yaitu Rp145.386.754.000,00.
2. Revisi DIPA Kedua terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 9 Februari 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-057/02000/PR.440/12/2022 tanggal 31 Januari 2022. Nilai pagu sebelum dan sesudah revisi sebesar Rp5.691.816.660.000,00 dan Rp5.691.816.660.000,00. Revisi DIPA dilakukan karena:
- a. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap.
 - 1) Pergeseran anggaran PN (pergeseran antar PN antar Satker).
 - a) Publikasi/Laporan SP (2905.QMA.006) terdapat pergeseran anggaran antar karena adanya pemutakhiran kerangka sampel, sehingga dilakukan realokasi jumlah petugas antar satker dengan tetap menjaga sampel 5 persen dari jumlah rumah tangga.
 - b) Pergeseran anggaran antar Rincian Output (RO), dari Publikasi/Laporan Sensus Pertanian (2910.QMA.006) ke RO Sarana, dari Publikasi/Laporan Sensus Pertanian ke RO Sarana Bidang TIK (2910.RAN.004) sebesar Rp18.381.600.000,00 dan Prasarana Bidang TIK (2910.RBT.005) sebesar Rp18.977.235.000,00. Sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Anggaran (DJA) nomor 6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan Pengesahan DIPA dan surat BAPPENAS nomor 05920/PP.04.03/Dt.8.2/B/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Penyampaian *Update* terkait Penyusunan RKAKL TA 2022 dan Pertemuan Tiga Pihak. Alokasi PN untuk mendukung Sensus Pertanian 2023 sebesar Rp611.711.956.000,00.
 - c) Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan (2910.QMA.010) terdapat pergeseran anggaran antar RO ke Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel (2910.QMA.007) sebesar Rp1.527.372.000,00 untuk kebutuhan *briefing* petugas, yang semula *offline-online*, menjadi *offline* semua.
 - d) BPS juga mengusulkan perubahan sampel dari provinsi ke kabupaten/kota menyesuaikan lokasi sampel.
 - 2) Pergeseran anggaran antar Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan RO antar satker Non PN.
 - a) Pergeseran antar KRO dan RO.
 - Pergeseran antar KRO dan RO antar satker pada Program PPIS sebesar Rp28.558.837.000,00 untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan dari *online* ke *offline* dan realokasi KRO IT.
 - Pergeseran antar KRO dan RO antar satker pada Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.185.656.000,00.



b) Perubahan nomenklatur KRO, RO, dan komponen.

- Pergeseran sarana dan prasarana.

Pergeseran anggaran sarana dan prasarana sebesar Rp7.900.471.000,00 untuk pemenuhan kekurangan kebutuhan satker-satker BPS diantaranya pengadaan tanah BPS Kabupaten Bandung yang tidak jadi dilaksanakan karena harga tidak terjangkau direalokasi ke beberapa satker lain untuk memenuhi kebutuhan prasarana.

- Realokasi Belanja Pegawai.

Pergeseran anggaran Belanja Pegawai antar Satker yang berasal dari internal Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) sebesar Rp1.401.872.000,00 untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai satker-satker BPS.

- Realokasi Belanja Operasional.

Pergeseran anggaran Belanja Barang Operasional antar Satker yang berasal dari internal Belanja Operasional (komponen 002) sebesar Rp213.004.000,00 untuk pemenuhan kekurangan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor satker-satker BPS.

- Ralat akun.

Perubahan yang disebabkan oleh ralat akun adalah seharusnya pagu menggunakan akun belanja modal namun menggunakan akun belanja barang (alat uji kadar air pada survey statistik harga).

b. Revisi administrasi

1) Penyesuaian nomenklatur KRO, RO, dan komponen sebagaimana Per DJA nomor 6/AG/2021 tentang Juknis Penyusunan dan Penelaahan RKAKL dan pengesahan DIPA dan surat Bappenas nomor 05920/PP.04.03/Dt.8.2/B/05/2021 tanggal 21 Mei 2021 tentang Penyampaian Update terkait Penyusunan RKAKL TA 2022 dan Hasil Pertemuan Tiga Pihak.

2) Perubahan pejabat pengelola keuangan.

3) Perubahan rencana penarikan dalam halaman III DIPA akibat penyesuaian anggaran.

4) Pencantuman halaman IV.B DIPA pada pembangunan rumah dinas.

3. Revisi DIPA ketiga terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-302/02000/PR.440/05/2022 tanggal 10 Mei 2022. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.691.816.660.000,00 berubah menjadi sebesar Rp5.692.141.933.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

a. Revisi anggaran pagu berubah.

Penambahan pagu PNBPN atas kontrak kerjasama/nota kesepahaman antara Satker BPS Kabupaten Jembrana dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jembrana sebesar Rp349.756.000,00 sehingga menambah pagu penggunaan PNBPN diusulkan sebesar Rp325.273.000,00 (93 persen besaran persetujuan penggunaan dana PNBPN).

b. Revisi anggaran pagu tetap.

1) Pergeseran anggaran PN: Pergeseran antar RO PN antar satker.

a) RO Publikasi/Laporan Sensus Penduduk terdapat optimalisasi anggaran sebesar Rp27.377.317.000,00 dengan tetap menjaga kualitas dan volume *output*, dialihkan pada:

- RO Publikasi/Laporan Statistik *E-commerce* sebesar Rp5.701.249.000,00, Wisatawan Nusantara sebesar Rp16.197.120.000,00, dan Publikasi/Laporan *Metropolitan Statistical Area* (MSA) sebesar Rp4.829.846.000,00.
- RO Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara, sebesar Rp649.101.000,00 untuk penambahan lokasi survey.

2) Pergeseran anggaran Non PN.

- a) Pergeseran antar KRO dan RO antar satker pada PPIS sebesar Rp2.090.460.000,00 untuk pemenuhan kebutuhan pelatihan survey neraca pengeluaran, pelatihan survey pariwisata, dan penambahan transportasi daerah sulit. Pergeseran antar KRO dan RO antar satker pada Program Dukman sebesar Rp9.484.429.000,00 antara lain untuk pemenuhan kegiatan Latihan Dasar (Pra-Jabatan).
- b) Realokasi anggaran belanja pegawai antar satker yang berasal dari internal Belanja Operasional Pegawai (komponen 001) sebesar Rp9.855.980.000,00 untuk pemenuhan kebutuhan kekurangan belanja pegawai satker-satker BPS.
- c) Realokasi anggaran belanja barang operasional antar satker yang berasal dari internal Belanja Barang Operasional (komponen 002) sebesar Rp1.601.782.000,00 untuk pemenuhan kekurangan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor satker-satker BPS.
- d) Realokasi anggaran belanja barang non operasional.
- e) Pergeseran anggaran belanja modal sarana dan prasarana sebesar Rp8.077.059.000,00 untuk pemenuhan kekurangan kebutuhan satker-satker BPS daerah antara lain untuk memenuhi kebutuhan sarana yang mendesak.

c. Revisi Administrasi.

1) Pembukaan blokir halaman IV A DIPA

- a) Pengadaan *server, storage, Data Protection Capacity* baru yang sudah dilengkapi *clearance* berdasarkan surat Menpan RB nomor B/383/KT.03/2022 tanggal 19 April 2022 dan rincian pengadaan *server, storage, dan Data Protection Capacity* baru.
- b) Pengadaan mobil pejabat eselon III yang sudah dilengkapi dokumen pendukung berupa RKBMN Perubahan TA 2022 sesuai surat Direktur



Jenderal Kekayaan Negara nomor S-136/MK.6/2022 tanggal 18 Maret 2022.

- c) Pembangunan gedung kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara dengan dokumen pendukung berupa RKBMN Perubahan TA 2022 berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-136/MK.6/2022 tanggal 18 Maret 2022.

2) Pencantuman halaman IV.B DIPA

Atas tunggakan uang lembur bulan Desember 2021 sebesar Rp58.752.000,00 dan honorarium narasumber TA 2021 sebesar Rp7.200.000,00 yang dilengkapi Surat Pernyataan KPA.

- 3) Perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA yang diakibatkan karena penyesuaian/pergeseran anggaran.

- 4. Revisi DIPA keempat terdapat pada 517 satuan kerja ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-410/02000/PR.440/06/2022 tanggal 6 Juni 2022. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.692.141.933.000,00 berubah menjadi sebesar Rp909.445.755.000,00 sehingga mengalami penurunan pagu sebesar Rp5.692.141.933.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:

- a. Revisi pagu anggaran tetap sebesar Rp315.975.990.000,00.

- 1) Revisi Program PPIS (054.01.GG) berupa penambahan AA pada kegiatan Prioritas Nasional dan Non Prioritas Nasional sebesar Rp285.975.335.000,00, terdiri dari:

- a) Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp285.864.861.000,00.
- b) Belanja Modal sebesar Rp110.474.000,00.

- 2) Revisi Program Dukungan Manajemen (054.01.WA) berupa penambahan AA sebesar Rp30.000.655.000,00, terdiri dari:

- a) Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp29.958.155.000,00.
- b) Belanja Modal sebesar Rp42.500.000,00.

- b. Revisi administratif yaitu penyesuaian RPD Hal. III DIPA Satker.

- c. Revisi anggaran tidak menyebabkan penambahan Pagu Anggaran.

- d. Tambahan AA sebesar Rp315.975.990.000,00 sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan oleh Menkeu pada surat Menkeu nomor S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022.

- e. Anggaran PN BPS Tahun 2022 terdapat AA sebesar Rp99,46 Miliar, karena terdapat paket meeting selain pelatihan petugas dialihkan secara *online*, penyesuaian perjalanan dinas, penyesuaian honor narasumber, dan penyesuaian pencetakan publikasi.

- 5. Revisi DIPA kelima terdapat pada 8 satuan kerja ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-445/02000/PR.440/06/2022 tanggal 28 Juni 2022. Nilai pagu yang sebelumnya



sebesar Rp5.692.141.933.000,00 berubah menjadi sebesar Rp5.693.272.474.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:

- Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan pagu anggaran berubah, dengan rincian:
 - 1) Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran berubah sebesar Rp1.130.541.000,00 karena penambahan dari PNBPN Satker BPS Kabupaten Badung (429207) sebesar Rp486.156.000,00 dan Satker Polstat STIS (690332) sebesar Rp644.385.000,00.
 - 2) Revisi administratif sebesar Rp16.398.145.000,00 yaitu:
 - a) Pembukaan blokir halaman IV.A dilengkapi dokumen ijin pembangunan gedung baru sesuai surat Sekretaris Kabinet nomor B.0275/Seskab/Polhukam/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 dan RKBMN Perubahan TA 2022 berdasarkan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor S-136/MK.6/2022 tanggal 18 Maret 2022.
 - b) Pencantuman volume pembangunan gedung kantor pada halaman IV.B DIPA Satker-satker yang telah mendapatkan izin pembangunan gedung kantor baru, terdiri dari:
 - BPS Kabupaten Pekalongan berupa Pembangunan Baru Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp2.943.636.000,00;
 - BPS Kabupaten Tulungagung berupa Pembangunan Baru Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp3.022.425.000,00;
 - BPS Kota Pematang Siantar berupa Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp2.418.165.000,00;
 - BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan berupa Pembangunan Gedung Kantor sebesar Rp2.855.162.000,00;
 - BPS Kota Prabumulih berupa Pembangunan Baru Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp2.457.733.000,00;
 - BPS Kota Serang berupa Pembangunan Baru Bangunan Gedung Kantor Permanen sebesar Rp2.701.029.000,00.
 - 3) Penambahan pagu penggunaan PNBPN:
 - a) Realisasi PNBPN Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan BPS Kabupaten Badung sampai dengan 1 Juli 2022 sebesar Rp522.749.000,00 dan sesuai surat Menkeu nomor S-748/MK.02/2021 tanggal 20 Agustus 2021 penggunaannya sebesar Rp486.156.570,00 (93 persen x Rp522.749.000,00).
 - b) Realisasi PNBPN pada Polstat STIS sampai dengan 1 Juli 2022 sebesar Rp5.481.000.000,00 sehingga kelebihan realisasi penerimaan sebesar Rp681.000.000,00 dari target Rp4.800.000.000,00 yang berdasarkan surat Menkeu, penggunaannya adalah sebesar Rp649.950.000,00 (95 persen x Rp681.000.000,00), namun usulan penggunaan PNBPN STIS masih di bawah pagu Rp644.385.000,00.



6. Revisi DIPA keenam terdapat pada 515 satuan kerja ditetapkan pada 25 Agustus 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-587/02000/PR.440/08/2022 tanggal 7 Oktober 2022. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp5.693.272.474.000,00 berubah menjadi sebesar Rp9.001.764.942.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:
 - Penambahan anggaran pada Program PPIS dari BA BUN (BA 999.08) ke BA BPS senilai Rp3.308.492.468.000,00 (SP SABA Nomor S-274/MK.02/2022 tanggal 17 Agustus 2022) untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam kondisi masih diblokir.
7. Revisi DIPA ketujuh terdapat pada 515 satuan kerja ditetapkan pada 29 Agustus 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-606/02000/PR.440/08/2022 tanggal 7 Oktober 2022. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp9.001.764.942.000,00 berubah menjadi sebesar Rp9.001.764.942.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:
 - Pembukaan blokir pada kegiatan 2905.QMA dan 2905.RAN untuk kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dalam kondisi masih diblokir.
8. Revisi DIPA kedelapan terdapat pada 517 satker ditetapkan pada 20 Oktober 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-756/02000/PR.440/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp9.001.764.942.000,00 berubah menjadi Rp8.934.080.937.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:
 - a. Pergeseran atau realokasi anggaran belanja pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sebesar Rp67.996.182.000,00;
 - b. Penambahan pagu yang bersumber dari PNBPN pada satker Pusdiklat BPS sebesar Rp312.0177.000,00.
9. Revisi DIPA kesembilan terdapat pada 5 satuan kerja terdiri dari BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Kabupaten Blitar, BPS Kabupaten Banjarnegara, dan BPS Kota Banjar, ditetapkan pada 10 November 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-918/02000/PR.440/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022. Nilai Pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.934.080.937.000,00 berubah menjadi Rp8.934.080.937.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:
 - a. Pergeseran pagu revisi RO Prioritas Nasional yaitu pergeseran anggaran antar RO Prioritas Nasional berupa realokasi belanja barang kegiatan ST2023 ke belanja modal Regsosek senilai Rp2.500.000.000,00;
 - b. Realokasi belanja operasional BPS Pusat senilai Rp453.720.000,00 ke BPS Provinsi Jawa Tengah senilai Rp378.720.000,00 dan BPS Kabupaten Blitar Rp75.000.000,00;
 - c. Realokasi belanja modal mengurukan dan pematangan tanah dari satker BPS Kabupaten Banjarnegara ke BPS Kota Banjar senilai Rp185.317.000,00.
10. Revisi DIPA kesepuluh terdapat pada BPS Pusat (Settama) ditetapkan pada 25 November 2022 berdasarkan surat KPA nomor B-1925/02100/PR.440/11/2022



tanggal 23 November 2022. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.934.080.937.000,00 berubah menjadi Rp8.936.969.424.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan karena:

- Penambahan pagu yang berasal dari hibah langsung dalam bentuk uang senilai Rp2.888.487.000,00 yang berasal dari UNFPA senilai Rp1.099.743.000,00 dan UNICEF senilai Rp1.788.744.000,00.
11. Revisi DIPA kesebelas terdapat pada 517 satker ditetapkan pada 12 Desember 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-1012/02000/PR.440/11/2022 tanggal 30 November 2022. Nilai Pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.934.080.937.000,00 berubah menjadi Rp8.560.888.091.000,00. Perubahan nilai Pagu disebabkan karena:
- Berdasarkan surat Menkeu nomor S-958/MK.02/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Realokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga TA 2022 yang terblokir ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sisa anggaran yang masih diblokir (*Automatic Adjustment*) akan direalokasi ke BA BUN pada DIPA BPS sebesar Rp376.081.333.000,00.

F.3 REKENING BPS

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa setiap satuan kerja wajib melaporkan pengelolaan rekening setiap semesteran.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja/Lingkup Kementerian Negara/Lembaga antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-174/PB.3.5/2023 tanggal 26 Januari 2023, jumlah rekening giro milik BPS sebanyak 538 rekening yang dirinci sebagai berikut:

- a. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 528 buah.
- b. Rekening Bendahara Penerimaan sebanyak 8 buah.
- c. Rekening Lainnya sebanyak 2 buah.

Daftar rekening aktif terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.4 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE I

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe I sebanyak 11 kegiatan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah/Dinas terkait dengan nilai pagu sebesar Rp576.126.500,00 dan realisasi belanja sebesar Rp109.150.000,00. Rincian pagu, realisasi belanja, dan jumlah kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 129
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe I

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sestama BPS	0	0	0	0
2	Pusdiklat BPS	0	0	0	0
3	BPS Kab. Siak	3	109.150.000	109.150.000	0
4	BPS Kab. Temanggung	2	57.600.000	0	57.600.000
5	BPS Kab. Hulu Sungai Selatan	1	87.800.000	0	87.800.000
6	BPS Kab. Tanah Bumbu	2	175.500.000	0	175.500.000
7	BPS Provinsi Kalimantan Timur	1	69.000.000	0	69.000.000
8	BPS Kab. Berau	2	77.076.500	0	77.076.500
Jumlah		11	576.126.500	109.150.000	466.976.500

F.5 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME PNBP

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme PNBP sebanyak 5 kegiatan. Nilai kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp3.108.476.151,00.

Tabel 130
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Pagu Nilai Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama BPS	3	1.851.971.151	384.000.000	2.235.971.151
Pusdiklat BPS	0	0	0	0
BPS Daerah	2	872.505.000	0	872.505.000
Jumlah	5	2.724.476.151	384.000.000	3.108.476.151

Anggaran kerja sama sebesar Rp2.917.762.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.743.476.180,00 atau 94,03 persen. Sumber dana kerja sama dengan mekanisme PNBP terdiri dari Non APBN BPS dan APBN BPS. Rincian jenis dan jumlah kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 131
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Anggaran dan Realisasi

Uraian	Jumlah Kerja Sama	APBN BPS (Rp)	BN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama BPS	2			
Anggaran		1.722.333.000	384.000.000	2.106.333.000
Realisasi		1.698.874.212	264.000.000	1.962.874.212
Saldo		23.458.788	120.000.000	143.458.788
Persentase realisasi		98,64%	68,75%	93,19%
Pusdiklat BPS	0			
Anggaran		0	0	0
Realisasi		0	0	0
Saldo		0	0	0

Persentase realisasi		0	0	0
Jumlah Pusat	2			
Anggaran		1.722.333.000	384.000.000	2.106.333.000
Realisasi		1.698.874.212	264.000.000	1.962.874.212
Saldo		23.458.788	120.000.000	143.458.788
Persentase realisasi		98,64%	68,75%	93,19%
BPS Daerah	2			
Anggaran		811.429.000	0	811.429.000
Realisasi		780.601.968	0	780.601.968
Saldo		30.827.032	0	30.827.032
Persentase realisasi		96,20%	0	96,20%
Total Pusat & Daerah	4			
Anggaran		2.533.762.000	384.000.000	2.917.762.000
Realisasi		2.479.476.180	264.000.000	2.743.476.180
Saldo		54.285.820	120.000.000	174.285.820
Persentase realisasi		97,86%	68,75%	94,03%

A. Kerja Sama PNBP-Non APBN BPS

Kerja sama mekanisme PNBP yang dibiayai dari Non APBN BPS adalah kerja sama di mana sumber pembiayaan kegiatannya berasal dari mitra kerja sama. Anggaran PNBP yang sudah tercatat dalam DIPA BPS sebesar Rp2.533.762.000,00 dan realisasi tercatat sebesar Rp2.479.476.180,00 atau 97,88 persen. Saldo sebesar Rp54.285.820,00 terdapat pada BUN. Rincian jenis dan nilai kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 132
Rekapitulasi Kerja Sama PNBP-Non APBN BPS

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
BPS Pusat		1.722.333.000	1.698.874.212	23.458.788
Settama BPS		1.722.333.000	1.698.874.212	23.458.788
623	Fungsi Statistik Harga Konsumen			
1	Perolehan Data Inflasi Inti, Indeks Harga Perdagangan Besar, dan Kajian Transmisi Harga Produsen ke Pedagang Besar Beberapa Komoditas Terpilih Tahun 2022	1.722.333.000	1.698.874.212	23.458.788
Pusdiklat BPS		0	0	0
BPS Daerah		811.429.000	780.601.968	30.827.032
510	BPS Kabupaten Jembrana			
1	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Jembrana Tahun 2022	325.273.000	315.108.438	10.164.562
	BPS Kabupaten Badung			
1	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2022	486.156.000	465.493.530	20.662.470
Jumlah		2.533.762.000	2.479.476.180	54.285.820

B. Kerja Sama PNBP- APBN BPS

Kerja sama mekanisme PNBP yang dibiayai dari APBN BPS adalah kerja sama antara BPS dengan Mitra Kerja sama dengan anggaran sebesar Rp384.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp240.000.000,00 atau 68,75 persen. Rincian jenis dan nilai kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 133
Rekapitulasi Kerja Sama PNBP- APBN BPS

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
BPS Pusat		384.000.000	264.000.000	120.000.000
Settama BPS		384.000.000	264.000.000	120.000.000
2310	Fungsi Administrasi Kepegawai			
1	Pelaksanaan Penilaian Kompetensi dalam Rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	360.000.000	240.000.000	120.000.000
2	Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pusat Statistik	24.000.000	24.000.000	0
Pusdiklat BPS		0	0	0
BPS Daerah		0	0	0
Jumlah		384.000.000	264.000.000	120.000.000

F.6 KERJA SAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME RPL

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, Badan Pusat Statistik melakukan kerja sama Swakelola Tipe II dengan mekanisme RPL sebanyak 4 kegiatan. Nilai kerja sama berdasarkan PKS yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp16.303.720,00.

Tabel 134
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Nilai PKS

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama BPS	4	0	16.303.720.000	16.303.720.000
Pusdiklat BPS	0	0	0	0
BPS Provinsi	0	0	0	0
Jumlah	4	0	16.303.720.000	16.303.720.000

Anggaran kerja sama sebesar Rp16.303.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.975.700.000,00 atau 68,75 persen. Sumber dana kerja sama dengan mekanisme RPL terdiri dari APBN BPS. Rincian jenis dan jumlah kerja sama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 135
Rekapitulasi Kerja Sama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Anggaran dan Realisasi

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPS Pusat				
Settama BPS	4			
Anggaran		0	16.303.720.000	16.303.720.000
Realisasi		0	15.975.700.000	15.975.700.000
Saldo		0	328.020.000	328.020.000
Persentase Realisasi		0	97,99%	97,99%
Pusdiklat BPS	0			
Anggaran		0	0	0
Realisasi		0	0	0
Saldo		0	0	0
Persentase Realisasi		0	0	0

Jumlah BPS Pusat	4			
Anggaran		0	16.303.720.000	16.303.720.000
Realisasi		0	15.975.700.000	15.975.700.000
Saldo		0	328.020.000	328.020.000
Persentase Realisasi		0	97,99%	97,99%
BPS Daerah	0			
Anggaran		0	0	0
Realisasi		0	0	0
Saldo		0	0	0
Persentase Realisasi		0	0	0
Total BPS Pusat dan Daerah	4			
Anggaran		0	16.303.720.000	16.303.720.000
Realisasi		0	15.975.700.000	15.975.700.000
Saldo		0	328.020.000	328.020.000
Persentase Realisasi		0	97,99%	97,99%

A. Kerja Sama RPL-APBN BPS

Kerja sama mekanisme RPL yang dibiayai dari APBN BPS adalah kerja sama antara BPS dengan Mitra Kerja sama dengan anggaran Rp16.303.720.000,00 dan realisasi sebesar Rp16.303.720.000,00 atau 68,75 persen. Rincian jenis dan nilai kerja sama terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 136
Rekapitulasi Kerja Sama RPL- APBN BPS

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
Settama BPS				
2300	Biro Sumber Daya Manusia			
1	Fungsi Kesehatan dan Pengembangan Pegawai	1.275.700.000	1.275.700.000	0
4100	Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan			
1	Fungsi Demografi	14.700.000.000	14.700.000.000	0
5100	Direktorat Statistik Tanaman Holtikultura dan Perkebunan			
1	Fungsi Statistik Tanaman Pangan	300.000.000	300.000.000	0
8100	Inspektorat			
1	Inspektorat	28.020.000	28.020.000	0
Pusdiklat BPS		0	0	0
BPS Provinsi		0	0	0
Jumlah		16.303.720.000	16.303.720.000	0

F.7 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Pada periode Tahun Anggaran 2022, Satker Settama BPS melakukan kerja sama dalam bentuk hibah uang. Kerja sama dalam bentuk hibah uang atau Hibah Langsung Luar Negeri tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 137
Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (Bentuk Uang)
Tahun Anggaran 2022

No.	Donor	No. Register	Dana Dalam DIPA (Rp)	Saldo Awal Hibah (Rp)	Pendapatan Hibah s.d. 31 Desember 2022 (Rp)	SP2HL (Rp)	SP4HL (Rp)	Saldo Sisa Dana Hibah (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNFPA	2NZ4UCWA	1.099.743.000	0	1.099.742.506	1.090.539.895	9.202.611	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
2	UNICEF	2PG3K7NA	1.788.744.000	0	1.781.778.000	1.716.010.160	65.767.840	0	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Hibah Uang			2.888.487.000	0	2.881.520.506	2.806.550.055	74.970.451	0	

Sedangkan rincian SPHL/SP3HL/MPHLBJS berdasarkan nomor dokumen Tahun Anggaran 2022 tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 138
Rincian SPHL/SP3HL/MPHLBJS Berdasarkan Nomor Dokumen
Tahun Anggaran 2022

No.	Donor	No. Register	Daftar Rincian						Keterangan
			SPHL			SP3HL/MPHL-BJS			
			Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNFPA	2NZ4UCWA	03831T/018576/2022	31-12-2022	1.090.539.895	03834T/018576/2022	31-12-2022	9.202.611	Hibah Uang
2	UNICEF	2PG3K7NA	03832T/018576/2022	31-12-2022	1.716.010.160	03835T/018576/2022	31-12-2022	65.767.840	Hibah Uang
Jumlah SP3HL								74.970.451	
3	UNFPA	2NZ4UCWA				03833T	31-12-2022	259.127.881	Hibah Jasa
Jumlah MPHL/BJS								259.127.881	
Jumlah SPHL					2.806.550.055	Jumlah SP3HL/MPHL-BJS		334.098.332	

Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) adalah sebagai berikut.

1. United Nations Population Fund (UNFPA) TA 2022

- Nama Hibah: UNFPA Siklus ke-10 (Tahun 2021-2025).
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA, sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) nomor S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Tanggal Efektif NPH: 1 Januari 2021.
- Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
- Nomor rekening RPL 140 PDHL BPS untuk 2NZ4UCWA sesuai surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah nomor S-201/WPB.12/KP.08/2021 tanggal 23 Maret 2021.
- Nilai Hibah sebesar Rp1.099.742.506,00.
- Saldo awal sebesar Rp0,00.

- Pendapatan sebesar Rp1.099.742.506,00 sudah dilakukan Revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 pada Revisi ke 14 tanggal 25 November 2022 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03831A tanggal 31 Desember 2022 dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) nomor 03831T/018576/2022 tanggal 31 Desember 2022.
- Belanja sebesar Rp1.090.539.895,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03832A tanggal 31 Desember 2022 dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) nomor 03831T/018576/2022 tanggal 31 Desember 2022.
- *Refund* sebesar Rp9.202.611,00 kepada UNFPA dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) nomor 03834A tanggal 31 Desember 2022.
- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNFPA 2021-2025, sesuai surat perjanjian hibah tanggal 21 Januari 2021 dan sesuai *Annual Workplan Tahun 2022 IDN10PDA* tanggal 26 Januari 2022, yaitu untuk kegiatan yang difokuskan pada Program-Program Dinamika Kependudukan dan Analisis Data yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang berkualitas dan analisis keterkaitannya dengan kebijakan dan program nasional.
- *Output* berupa *Capacity Building* penghitungan proyeksi penduduk metode RUP dan *Bayesian Modelling* bersama perwakilan BPS Provinsi se-Indonesia, pengembangan sistem bagi pakai data kependudukan dengan Ditjen Dukcapil (SSHI), *Workshop* evaluasi dan *digital* demografi, pengawasan pendataan lapangan Sensus Penduduk *Long Form* 2020, dan percontohan Sistem Statistik Vital Indonesia, ke Sulawesi Utara dan Jawa Barat, proses perhitungan proyeksi penduduk, diskusi teknis dan konsultasi dengan pakar kependudukan di provinsi yang memiliki program studi kependudukan (Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Jawa Timur), *Workshop* evaluasi hasil Sensus Penduduk *Short Form* 2020, *Workshop* penyusunan kerangka analisis berdasarkan hasil sensus penduduk *Long Form* 2020, dan *Workshop* penghitungan estimasi parameter demografi berdasar hasil Sensus Penduduk *Long Form* 2020.

2. United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) TA 2022

- Nama Hibah: *Country Program Action's Fund* 2021-2025.
- Nomor register 2PG3K7NA sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) nomor S-469/PR.8/2021 tanggal 5 Juli 2021.
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNICEF tanggal 5 Maret 2021.
- Tanggal Efektif NPH: 5 Maret 2021.
- Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
- Nilai hibah sebesar USD400.000.



- Nomor rekening RPL 140 PDHL SETTAMA BPS untuk 2PG3K7NA sesuai surat Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah nomor –WPB.12/KP000146-.08/2020 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya a/n Sekretariat Utama BPS.
- Saldo awal sebesar Rp0,00.
- Pendapatan sebesar Rp1.781.778.000,00 sudah dilakukan revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2022 pada revisi ke-14 tanggal 25 November 2022 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03832A tanggal 31 Desember 2022 dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) nomor 03832T/018576/2022 tanggal 31 Desember 2022.
- Belanja sebesar Rp1.716.010.160,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 03832A tanggal 31 Desember 2022 dan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) nomor 03832T/018576/2022 tanggal 31 Desember 2022.
- *Refund* sebesar Rp65.767.840,00 kepada UNICEF dan sudah dilakukan Pengesahan *refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) nomor 03835A tanggal 31 Desember 2022.
- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan dilaksanakan melibatkan direktorat lain yaitu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, dan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Penanggung jawab adalah Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF 2021-2025, sesuai *Country Programme Action Plan (CPAP)* 2021-2025 tanggal 23 Desember 2020 dan sesuai *Programme Document (ProDoc)* 2021-2025 tanggal 5 Maret 2021, yaitu untuk kegiatan Peningkatan penggunaan data statistik oleh pemangku kebijakan terutama untuk perencanaan dan *monitoring* kebijakan yang terkait tentang anak dengan menggunakan hasil survei rumah tangga, sensus, dan *big data*.
- *Output* Triwulan 4 (empat) berupa penyamaan konsep terkait kemiskinan multidimensional dan deprivasi hak-hak, penentuan variabel citra satelit dan variabel yang berkesesuaian untuk mengidentifikasi lokasi kemiskinan anak, dan pembagian tim berdasarkan rencana kerja dan tindak lanjut untuk identifikasi lokasi kemiskinan anak di Pulau Jawa. Tabulasi kemiskinan anak, moneter menurut karakteristik, dan model regresi logistik, daftar indikator kesehatan dan gizi anak yang dihasilkan dari Susenas Maret 2022, *matching* data Survei dampak sosial ekonomi Covid-19 dan Susenas, daftar penimbang (*weight*) *Joint Survey-Second Round Impact of Covid-19*, pengolahan Dokumen Hasil Uji Coba *Early Childhood Development Index (ECDI)* 2021, pemetaan kemiskinan anak di Pulau Jawa dengan Citra Satelit dan penghitungan indikator pekerja anak hasil Sakernas.

Selain itu Satker Settama BPS menerima hibah dalam bentuk Jasa dari *United Nations Population Fund (UNFPA)*, yaitu:



- Nama Hibah: UNFPA Siklus ke-10 (Tahun 2021-2025).
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA, sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) nomor S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-267/04100/12202 tanggal 30 Desember 2022.
- Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program UNFPA Siklus ke-10 nomor 370/PDA/12-2022 tanggal 26 Desember 2022.
- Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai nomor B-325/BPS/2200/12/2022 tanggal 30 Desember 2022.
- Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar USD17,496 atau Rp259.127.881,00 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 03833A tanggal 31 Desember 2022.
- Digunakan untuk membiayai kegiatan *Capacity Building* penghitungan Proyeksi Penduduk menggunakan *Bayesian Modelling*.
- *Output* berupa pendampingan *Capacity building* Penghitungan Proyeksi Penduduk menggunakan *Bayesian Modelling*, partisipasi dalam pengumpulan data Sensus Penduduk *Long Form* 2020, di daerah perkotaan, partisipasi pada *Workshop* penyusunan kerangka analisis berdasarkan hasil sensus penduduk *Long Form* 2020, diskusi teknis dan konsultasi dengan pakar kependudukan di provinsi yang memiliki program studi kependudukan, dan partisipasi *Workshop* penghitungan estimasi parameter demografi berdasar hasil Sensus Penduduk *Long Form* 2020.

Badan Pusat Statistik dalam melakukan pengelolaan kerja sama mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Kerja sama dalam bentuk Swakelola, pembiayaan bersumber pada pagu yang tercantum dalam DIPA mitra kerja sama. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban atas pencatatan realisasi belanja ada pada mitra kerja sama. Dengan demikian maka Badan Pusat Statistik tidak mencatat realisasi belanja pada Laporan Realisasi Anggaran. Namun demikian tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Lampiran Pendukung II pada Laporan Keuangan atas penjelasan rinci kerja sama tersebut.

Rekapitulasi kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) beserta realisasinya terdiri dari Satker Settama BPS dan satker BPS di daerah yang terdiri dari Satker BPS Provinsi dan Satker BPS Kabupaten/Kota, terdapat pada Lampiran Pendukung II Laporan Keuangan.

F.8 HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Badan Pusat Statistik menjalin kerja sama dengan pihak lain melalui mekanisme



Hibah Langsung Dalam Negeri baik sebagai penerima Hibah dari mitra kerja sama dan pemberi Hibah dengan nilai sebesar Rp1.570.128.751,00 dalam bentuk barang dan sudah dilakukan pengesahan.

A. BPS sebagai pihak yang menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp14.189.566.672,00 berupa tanah. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 139
Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS

No.	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hibah Barang berupa Bangunan Gedung Tempat Ibadah kepada BPS Provinsi Kalsel (Bangunan gedung tempat ibadah seluas 40 m ² dan kipas angin)	Perseorangan (Fachri Ubadiyah)	Fachri Ubadiyah	98.428.300	
2	Hibah barang milik negara berupa tanah seluas 302 m ² dan 620 m ²	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur	Pemprov Jawa Timur	13.830.000.000	
3	Hibah barang milik daerah berupa tanah dan bangunan kepada BPS	Pemkab Trenggalek	Bupati Trenggalek	255.078.720	
4	Hibah BMN berupa tanah seluas 1.214 m ² dan	Pemkab Demak	Bupati Demak	6.059.652	
Jumlah				14.189.566.672	

B. BPS sebagai pihak yang menghibahkan barang kepada Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp4.471.509.000,00 berupa gudang kantor permanen, tempat kerja dan pagar permanen. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 140
Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Tanah Bangunan Kantor Permanen dan Bangunan Gedung Kantor Permanen kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau berupa tanah bangunan permanen seluas 600 m ² dan bangunan gedung kantor permanen seluas 280 m ²	Pemkab Kota Lubuk Linggau	Kepala BPS	326.215.000	
2	Hibah Barang Milik Negara berupa Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen seluas 110 m ² dan Bangunan Gedung Kantor Permanen seluas 112 m ² kepada Pemerintah Kab. Magetan	Pemerintah Kab. Magetan	Kepala BPS	335.927.000	
3	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya Permanen seluas 520 m ² dan bangunan gudang tertutup permanen seluas 54 m ² kepada Pemerintah Kab. Kapuas	Pemerintah Kab. Kapuas	Kepala BPS	1.217.019.000	

4	Hibah Barang Milik Negara berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Bangunan Gedung Kantor Permanen, dan Pagar Permanen kepada Pemerintah Kab. Pasaman Barat, berupa tanah seluas 16.029 m ² , bangunan gedung kantor dan pagar permanen	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	Kepala BPS	1.810.326.000	
5	Hibah Barang Milik Negara berupa Bangunan Tempat Kerja Lainnya Permanen kepada Pemerintah Kab. Gorontalo berupa tanah bangunan kantor seluas 750 m ² dan bangunan gedung kantor permanen seluas 300 m ²	Pemerintah Kab. Gorontalo	Kepala BPS	862.252.000	
6	Hibah barang milik negara berupa rumah negara golongan 1 tipe C permanen kepada Pemerintah Desa Balokang seluas 95 m ²	Pemerintah Kota Banjar, Desa Balokang, Jawa Barat	Kepala BPS	219.770.000	
Jumlah				4.771.509.000	

F.9 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 disusun berdasarkan aplikasi MonSAKTI dengan pedoman dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, yaitu:
 - Surat nomor S-54/PB/PB.6/2022 tanggal 29 Desember 2022 perihal Pelaksanaan Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- Rincian Penggolongan Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS periode Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.
- BPS telah melaksanakan Sensus BMN pada tahun 2021 dan 2022 yang nilainya telah tersaji pada laporan keuangan tahun 2022. Namun demikian BPS masih menyelesaikan tindak lanjut BMN yang berkaitan dengan penghapusan, daftar BMN hilang, dan aset TDOP yang belum ditemukan.
- Rincian tindak lanjut temuan Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada Badan Pusat Statistik dan penjelasan yang berkaitan dengan Sensus BMN terdapat pada Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) yang terlampir pada laporan keuangan ini.


 Jakarta, 10 Mei 2023
 Kepala Badan Pusat Statistik,

 Margo Yuwono